

JURNAL

AKUNTANSI & MANAJEMEN



Terakreditasi No. 26/DIKTI/Kep/2005

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TRANSPARANSI:
STUDI EMPIRIS DI PASAR MODAL INDONESIA**

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan

**GOING BEYOND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE CRITICAL
FACTORS OF CORPORATE SOCIAL INNOVATION—AN EMPIRICAL STUDY**

Dwi Astuti Ningsih, SE., MM dan Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM.

**RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI UNTUK PASAR SAHAM:
PROBLEMA DAN PELUANG RISET**

Dr. Andreas Lako, M.Si.

**VALIDASI ITEM-ITEM KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL:
APLIKASI STRUCTURAL EQUATION MODELING
DENGAN CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA)**

Heru Kurnianto Tjahjono, SE., MM.

**REORIENTASI KEPENTINGAN KORPORASI DARI SHAREHOLDERS KE
STAKEHOLDERS UNTUK MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI DI MASA DEPAN**

St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum.

**MANAJEMEN STRES: BAGAIMANA MENGHIDUPI STRES
UNTUK MENCAPAI KEEFEKTIFAN ORGANISASI**

Conny Tjandra Rahardja, SE., MM., dan N.H. Setiadi Wijaya, SE., M.Si.



Rp7.500,-

JAM STIE YKPN YOGYAKARTA	VOL. 18	NO. 2	Hal 65-148	YOGYAKARTA AGUSTUS 2007	ISSN: 0853-1259
-----------------------------	---------	-------	------------	----------------------------	--------------------

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Editorial Staff Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)

Editor in Chief

Djoko Susanto
STIE YKPN Yogyakarta

Managing Editor

Sinta Sudarini
STIE YKPN Yogyakarta

Editors

Drs. Al. Haryono Jusup, MBA., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Dr. Harsono, M.Sc.
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Arief Suadi, MBA.
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Dr. Baldric Siregar, MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Prof. Dr. Jogiyanto H.M., MBA., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Basu Swastha Dharmmesta, MBA.
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Soeratno, M.Ec.
Universitas Gadjah Mada

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Su'ad Husnan, MBA.
Universitas Gadjah Mada

Dr. Eko Widodo Lo, SE., M.Si., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Suwardjono, M.Sc., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Prof. Dr. Tandililin Eduardus, MBA.
Universitas Gadjah Mada

Dr. Gudono, MBA., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan
Universitas Gadjah Mada

Editorial Secretary

Rudy Badrudin
STIE YKPN Yogyakarta

Editorial Office

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 · Fax. (0274) 486155
<http://www.stieykpn.ac.id> · e-mail: rudy@stieykpn.ac.id
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 – 0095042814

DARI REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Selamat berjumpa kembali dengan Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM) STIE YKPN Yogyakarta Vol. 18, No. 2, Agustus 2007. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM STIE YKPN Yogyakarta dimaksudkan sebagai media penuangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen.

Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang telah dimuat pada JAM edisi sebelumnya dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (www://stieykp.ac.id). Semua itu kami lakukan sebagai konsekuensi ilmiah dengan telah Terakreditasinya JAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Kep/ 2005 dengan Nilai B.

JAM Vol. 18, No. 2, Agustus 2007, menyajikan 6 artikel sebagai berikut: Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia; *Going Beyond Corporate Social Responsibility: The Critical Factors of Corporate Social Innovation—An Empirical Study*; Relevansi Nilai Informasi Akuntansi untuk Pasar Saham: Problema dan Peluang Riset; Validasi Item-Item Keadilan Distributif

dan Keadilan Prosedural: Aplikasi *Structural Equation Modeling* dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA); Reorientasi Kepentingan Korporasi dari *Shareholders* ke *Stakeholders* untuk Menjawab Tantangan Globalisasi di Masa Depan; dan Manajemen Stres: Bagaimana Menghidupi Stres untuk Mencapai Keefektifan Organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penerbitan JAM Vol. 18, No. 2, Agustus 2007 ini. Kami juga mengundang para pembaca untuk mengirimkan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen ke *Editorial Office* JAM Jalan Seturan, Yogyakarta 55281 atau melalui *e-mail* rudy@stieykp.ac.id. Bagi pembaca atau instansi yang ingin berlangganan JAM dapat mengirim wesel pos ke *Editorial Office* JAM Jalan Seturan, Yogyakarta 55281 atau transfer ke rekening STIE YKPN Yogyakarta di Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta no. rekening **137 – 0095042814**.

Harapan kami, mudah-mudahan artikel-artikel pada JAM tersebut dapat memberikan nilai tambah informasi dan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan manajemen bagi para pembaca. Selamat menikmati sajian kami pada JAM kali ini dan sampai jumpa pada JAM Vol. 18, No. 3, Desember 2007 dengan artikel-artikel yang lebih menarik.

Redaksi

DAFTAR ISI

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TRANSPARANSI:
STUDI EMPIRIS DI PASAR MODAL INDONESIA**

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan
65-85

**GOING BEYOND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
THE CRITICAL FACTORS OF CORPORATE SOCIAL INNOVATION—AN EMPIRICAL STUDY**

Dwi Astuti Ningsih, SE., MM dan Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM.
87-98

**RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI UNTUK PASAR SAHAM:
PROBLEMA DAN PELUANG RISET**

Dr. Andreas Lako, M.Si.
99-113

**VALIDASI ITEM-ITEM KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL:
APLIKASI STRUCTURAL EQUATION MODELING
DENGAN CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA)**

Heru Kurnianto Tjahjono, SE., MM.
115-125

**REORIENTASI KEPENTINGAN KORPORASI DARI SHAREHOLDERS KE STAKEHOLDERS
UNTUK MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI DI MASA DEPAN**

St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum.
127-134

**MANAJEMEN STRES: BAGAIMANA MENGHIDUPI STRES
UNTUK MENCAPAI KE EFEKTIFAN ORGANISASI**

Conny Tjandra Rahardja, SE., MM., dan N.H. Setiadi Wijaya, SE., M.Si.
135-148

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TRANSPARANSI: STUDI EMPIRIS DI PASAR MODAL INDONESIA

*Dody Hapsoro*¹

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the effect of the corporate governance mechanisms, especially the firm's ownership structure on the company's transparency. The firm's ownership structure consists of four variables, which are the proportion of management ownership, the proportion of domestic institutional ownership, the proportion of foreign institutional ownership, and the proportion of public ownership. The company's transparency consists of two variables, which are the level of non-compliance mandatory disclosures and the level of voluntary disclosures.

In this study, have been developed 8 hypotheses. All hypotheses are developed based on the relationship of two constructs, which are the corporate governance mechanisms and the company's transparency. This study uses the sample of 285 firms listed at the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange in 2003. The hypotheses are tested by using ordinary least squares regressions.

The results of this study are as follows: (1) the effect of ownership structures on transparency is not statistically significant, (2) only the effect of public ownership on the level of non-compliance mandatory disclosures is statistically significant. However, the effect of public ownership on the level of voluntary disclosures is not statistically significant.

Keywords: corporate governance mechanisms (the firm's ownership structure) and the transparency (the level of non-compliance mandatory disclosures and the level of voluntary disclosures).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1990-an studi tentang pengungkapan (*disclosure*), baik pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) telah banyak dilakukan di Indonesia. Sebagian besar studi tersebut berkaitan dengan pengujian tentang hubungan dan atau pengaruh berbagai karakteristik perusahaan terhadap perilaku pengungkapan perusahaan publik. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan wajib antara lain dilakukan Subiyantoro (1997) yang menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dengan kelengkapan laporan keuangan, Fitriany (2001) menguji signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan, serta Subroto (2003) menguji pengaruh variabel kualitas kantor akuntan publik, struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat ketaatan pengungkapan wajib.

¹ Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta

Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela antara lain dilakukan oleh Susanto (1992) yang menguji luas pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan, Suropto (1998) menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, Na'im dan Rakhman (2000) menguji hubungan antara struktur modal dan tipe kepemilikan perusahaan dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, Marwata (2001) menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dengan kualitas pengungkapan sukarela, serta Gunawan (2002) menguji pengaruh kelompok industri, basis perusahaan dan tingkat *return* terhadap kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa terdapat variabel penjelas lain yang perlu diidentifikasi untuk tujuan pengujian tentang perilaku pengungkapan (Ho and Wong, 2000). Para peneliti mengakui bahwa mekanisme *corporate governance* juga memiliki pengaruh kuat terhadap praktik *disclosure* korporat. Struktur *corporate governance* secara spesifik telah banyak direkomendasi oleh berbagai lembaga otoritas dalam rangka memperbaiki transparansi, mencegah perusahaan dari kemungkinan terjadinya pelaporan keuangan yang tidak jujur dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Berbagai hasil studi mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan *disclosure* korporat di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya telah banyak dipublikasi. Atribut *corporate governance* yang diuji di dalam penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah variabel struktur kepemilikan (Ruland, Tung and George, 1990; Mckinnon and Dalimunthe, 1993; Malone, Fries, and Jones, 1993; Brennan, 1995; Raffournier, 1995), proporsi atau keberadaan komisaris independen (Foraker, 1992; Malone, Fries, and Jones, 1993; Chen and Jaggi, 1998), penunjukan komisaris independen sebagai ketua dewan komisaris (Foraker, 1992), keberadaan komite audit (Foraker, 1992; Chen and Jaggi, 1998; Ho and Wong, 2000), ukuran perusahaan dan persentase anggota keluarga pada dewan komisaris (Ho and Wong, 2000). Namun, hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh sebagian besar atribut *corporate governance* terhadap *disclosure* adalah tidak konklusif (*mixed*).

Permasalahan Penelitian

Menurut Lins and Warnock (2004), secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Pertama, mekanisme internal spesifik perusahaan (*firm-specific internal mechanisms*), yang terdiri atas struktur kepemilikan perusahaan (*firm's ownership structure*) dan struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan (*firm's control structure*). Kedua, mekanisme eksternal spesifik negara (*country-specific external mechanisms*), yang terdiri atas aturan hukum (*the rule of law*) dan pasar pengendalian korporat (*the market for corporate control*).

Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar di dalam pengelolaan kegiatan korporasi dapat dilakukan secara terbuka, sehingga pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan yang diambil manajemen serta menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, baik tidaknya *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari dimensi keterbukaan (transparansi). Sebagaimana dikemukakan oleh Cadbury (1996) bahwa prinsip dasar di dalam pengelolaan suatu korporasi adalah terjadinya *disclosure*.

Disclosure memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang buruk berkorelasi dengan transparansi yang rendah, yang secara negatif akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena *corporate governance* yang buruk dan rendahnya transparansi dapat meningkatkan risiko estimasi bagi investor luar (Lins and Warnock, 2004).

Penelitian yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, khususnya mekanisme spesifik internal perusahaan yang berkaitan dengan variabel struktur kepemilikan terhadap transparansi belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sedemikian jauh hasil penelitian belum mampu memberikan bukti empiris yang memadai. Sebagai

contoh, Na'im dan Rakhman (2000) menguji hubungan antara persentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan. Hasil penelitian mereka tidak berhasil menemukan hubungan signifikan antara persentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan. Khomsiyah (2005) menguji pengaruh kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan informasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi. Pada penelitian ini akan diuji lebih lanjut pengaruh berbagai variabel struktur kepemilikan perusahaan terhadap transparansi. Dengan kata lain, permasalahan yang akan diteliti adalah apakah struktur kepemilikan (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik) berpengaruh terhadap transparansi?

Motivasi Penelitian

Keberadaan *corporate governance* terutama dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku eksekutif puncak perusahaan dalam rangka melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Sebagaimana dinyatakan oleh Denis and McConnell (2003) bahwa *corporate governance* merupakan sekumpulan mekanisme—baik berbasis institusi maupun pasar—yang mengarahkan pengelola perusahaan (pengelola perusahaan biasanya cenderung mementingkan kepentingannya sendiri) untuk membuat keputusan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan sehingga memberi manfaat bagi pemilik (penyedia dana). Hal tersebut didasari alasan karena pada pengelolaan perusahaan korporasi, pemilik perusahaan tidak lagi berada dalam posisi yang dapat mengendalikan jalannya kegiatan perusahaan secara langsung, sehingga pengelolaan terhadap kegiatan perusahaan harus diserahkan kepada manajer profesional. Oleh karena itu, kewenangan untuk menggunakan sumber daya perusahaan sepenuhnya berada di tangan para eksekutif perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan agar manajemen bertindak secara profesional di dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil manajemen didasarkan pada kepentingan pemegang saham, serta sumber daya

yang ada semata-mata digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan.

Sejalan dengan pengertian di atas, pengendalian terhadap perusahaan seharusnya lebih diarahkan terhadap pengawasan perilaku manajer (eksekutif) agar yang dilakukan manajer dapat dinilai manfaatnya bagi perusahaan (pemilik) dan/atau bagi kepentingan manajer sendiri. Dengan kata lain, pengendalian seharusnya tidak diarahkan pada upaya pengekanan kreativitas dan potensi manajemen, tetapi lebih pada upaya untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara terbuka (*transparent*), sehingga pemilik perusahaan dapat melaksanakan proses monitoring secara efektif terhadap manajemen. Sedangkan yang harus dikendalikan di dalam perusahaan atau yang menjadi target pengendalian di dalam perusahaan korporasi adalah *discretion* (kebijakan) dan *decision* (keputusan) manajemen. Apabila proses monitoring dapat berjalan secara efektif, diharapkan akan tercipta suatu *good corporate governance*, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap terciptanya *good corporate governance*. Bagi pemegang saham dan investor, *good corporate governance* memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh *returns* (imbal hasil) yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan. Sedangkan bagi badan-badan otoritas (*authority bodies*), *good corporate governance* akan meningkatkan efisiensi, integritas, dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi yang pada gilirannya akan menentukan alokasi dana masyarakat kepada kegiatan ekonomi yang produktif (Shleifer and Vishny, 1997). Oleh karena itu, penelitian ini didasari motivasi bahwa *corporate governance* seharusnya dapat mendorong transparansi, karena keberadaan *corporate governance* terutama dimaksudkan agar pengelolaan kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka (*transparent*).

Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat transparansi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan manajemen terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

2. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan manajemen terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusi domestik terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
4. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusi domestik terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
5. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusi asing terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
6. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusi asing terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
7. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan publik (masyarakat) terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
8. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan publik (masyarakat) terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

TELAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Telaah Literatur

Cadbury Committee (1996) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Pada umumnya *corporate governance* dipandang sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di dalam perusahaan. Manajer merupakan agen dan pemilik merupakan prinsipal. Pemilik perusahaan ingin memperoleh jaminan untuk mendapatkan *return* atas investasinya, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat di dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kegiatan internal perusahaan. Di lain pihak, manajer yang tidak menyukai risiko (*risk averse*) akan bertindak secara oportunistik dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976; Fama

and Jensen, 1983). Oleh karena itu, agar perusahaan dikelola dengan efisien, maka tindakan atau perilaku manajer harus dapat dimonitor.

Menurut Lins and Warnock (2004), mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Pertama, mekanisme internal spesifik perusahaan (*firm-specific internal mechanisms*), yang terdiri atas struktur kepemilikan perusahaan dan struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan. Kedua, mekanisme eksternal spesifik negara (*country-specific external mechanisms*), yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan akan menentukan sifat permasalahan keagenan, yaitu apakah konflik yang dominan terjadi antara manajer dengan pemegang saham atau antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dengan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Secara spesifik, Shleifer and Vishny (1997) memberi argumen bahwa di dalam perusahaan-perusahaan besar pada sebagian besar negara di dunia, masalah keagenan yang fundamental bukan dalam bentuk konflik seperti yang digambarkan oleh Berle and Means (1934) yaitu antara investor luar dengan para manajer, tetapi antara investor luar dengan para pemegang saham pengendali yang hampir sepenuhnya dapat mengendalikan para manajer. Struktur kepemilikan perusahaan yang berbeda di berbagai negara menyebabkan isu *corporate governance* yang berbeda pula. Isu *corporate governance* di negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon* dengan struktur kepemilikan tersebar adalah bagaimana menyamakan kepentingan pemilik dan kepentingan manajer. Sedangkan isu *corporate governance* di negara-negara Asia yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi adalah bagaimana menyamakan kepentingan pemilik mayoritas dengan pemilik minoritas.²

¹ Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa bentuk masalah keagenan yang paling lazim terjadi adalah antara pemilik sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agen pada struktur kepemilikan tersebar. Namun, masalah keagenan juga dapat terjadi pada setiap situasi yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih meskipun tidak terdapat pemisahan hubungan yang tegas antara prinsipal dan agen.

Oleh karena itu, isu *corporate governance* di negara-negara Asia (termasuk Indonesia) pada umumnya berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Menurut Wang, Liao, and Deng (2003), perlindungan terhadap investor antara lain mencakup tingkat dan kualitas pengungkapan informasi (*level and quality disclosure*), keterlibatan investor di dalam pembuatan keputusan-keputusan penting, serta perlindungan investor dari kemungkinan terjadinya tindakan oleh para manajer dan pemegang saham besar yang menguntungkan diri mereka sendiri.

Dalam konteks perusahaan yang sahamnya dimiliki secara luas, pemilik individual tidak akan bersedia untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan yang dimilikinya karena adanya masalah *free riders*. Dalam kondisi seperti ini, konsentrasi kepemilikan akan mengurangi *political costs* dan *free rider problem*. Oleh karena itu pemegang saham yang proporsinya cukup besar dibanding pemegang saham lainnya akan bersedia untuk melakukan pengendalian. Dengan kata lain, konsentrasi kepemilikan akan mempengaruhi *corporate governance*, karena pemegang saham yang memiliki saham dalam jumlah besar akan bersedia untuk melakukan pengendalian. Sebagaimana dikemukakan oleh Demsetz and Lehn (1985) serta Denis et al. (1999) bahwa konsentrasi kepemilikan merupakan salah satu bentuk *corporate governance* yang dapat menyamakan kepentingan pemilik dengan kepentingan pengelola perusahaan. Dengan menggunakan argumen yang sama, beberapa kelompok pemegang saham (institusi, individual, dan korporasi) juga akan dapat mempengaruhi *corporate governance*.

Dengan demikian, agenda penelitian yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik (masyarakat) akan mendorong terciptanya transparansi?

Transparansi

Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan terdiri atas bagian laporan manajemen, bagian ikhtisar data keuangan, bagian analisis dan pembahasan umum oleh manajemen,

serta bagian laporan keuangan. Laporan tahunan mengkomunikasikan informasi kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders* (atau calon *stakeholders*) lainnya. Laporan tersebut juga menjadi alat utama bagi para manajer untuk menunjukkan keefektifan pencapaian tugas dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi.

Informasi yang diungkap di dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan ke dalam pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Pada tanggal 27 Desember 2002, peraturan tersebut disempurnakan melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam surat edaran tersebut telah diatur tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk 13 (tiga belas) industri.

Pengungkapan wajib di Indonesia selain diatur melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, juga diatur berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Tahun 1996 tentang Laporan Tahunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini pengukuran terhadap tingkat pengungkapan wajib akan dihitung berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek, Robert, and Gray, 1995). Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pengungkapan sukarela memang dimungkinkan (Suripto, 1998). Pada penelitian ini, tingkat transparansi diprosikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh proporsi kepemilikan manajemen terhadap tingkat transparansi

Secara teoritis ketika proporsi kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Oleh karena itu, pada mulanya permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila manajer adalah juga sekaligus sebagai pemilik. Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen and Meckling, 1976). Hal tersebut diperkuat oleh hasil studi Warfield, Wild, and Wild (1995) yang menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi secara positif berhubungan dengan tingkat kepemilikan manajemen.

Namun, akhir-akhir ini beberapa teoritis telah memberikan argumen yang bertolak belakang dengan pernyataan di atas yaitu bahwa peningkatan kepemilikan manajemen tidak selalu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham secara keseluruhan. Fama and Jensen (1983) memberi argumen bahwa manajer-manajer dapat meningkatkan persentase kepemilikan mereka pada suatu tingkat tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi dewan komisaris, sehingga mengisolasi kepentingan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pengendalian internal maupun pengendalian eksternal. Hal ini pada akhirnya memungkinkan bagi pemegang saham mayoritas untuk menggunakan kewenangannya di dalam mengekspropriasi atau mengonsumsi kesejahteraan korporat secara substansial. Morck, Shleifer, and Vishny (1988) menemukan bahwa kepemilikan manajemen dan kinerja perusahaan tidak selalu berhubungan secara monotonik.

Rerangka kerja yang menghubungkan *corporate governance* dengan kualitas *disclosure* ditunjukkan oleh Williamson (1985). Beberapa penelitian empiris yang menghubungkan antara *corporate governance* dengan *disclosure* antara lain Forker (1992) serta Chen and Jaggi (2000). Berdasarkan studi mereka ditunjukkan bahwa struktur kepemilikan akan menentukan tingkat monitoring dan juga tingkat *disclosure*. Diekspektasi bahwa *disclosure* secara negatif berhubungan dengan kepemilikan manajemen dan kepemilikan blok (*blockholders ownership*). Apabila

kepemilikan manajemen rendah, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan pemegang saham luar untuk melakukan monitoring. Peningkatan kebutuhan monitoring juga terjadi di dalam kepemilikan yang tersebar (kepemilikan blok yang rendah). Dengan memiliki proporsi komisaris independen yang lebih besar dari pihak luar akan menghasilkan monitoring yang lebih baik oleh dewan komisaris dan membatasi aktivitas oportunistik manajemen (Fama, 1980; Fama and Jensen, 1983).

Penelitian Eng and Mak (2001) menguji apakah *corporate governance* berasosiasi dengan *disclosure*. Secara spesifik, penelitian tersebut menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris dengan *disclosure*. Hasil penelitian Eng and Mak (2001) menunjukkan bahwa semakin kecil kepemilikan manajemen berhubungan dengan terjadinya peningkatan *disclosure*. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini diekspektasi bahwa peningkatan kepemilikan manajemen akan berakibat pada terjadinya penurunan transparansi.

Oleh karena dalam penelitian ini tingkat transparansi diprosikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

- H₁: Proporsi kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- H₂: Proporsi kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

2. Pengaruh proporsi kepemilikan institusi domestik terhadap tingkat transparansi

Di beberapa negara, investor institusi dan investor asing—jika bukan merupakan mayoritas—merupakan bagian atau komponen yang signifikan di dalam pasar ekuitas selama lima puluh tahun terakhir (Gillan and Starks, 2003). Meskipun investor institusi belum memainkan peranan yang sangat penting di dalam berbagai pasar modal yang ada di negara-negara yang sedang berkembang (*emerging markets*), berbagai reformasi di dalam pengelolaan dana pensiun dan terjadinya berbagai privatisasi di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh negara (*state-owned enterprises*) telah mulai pula

mempengaruhi kepemilikan finansial di berbagai institusi, sehingga secara langsung akan mempengaruhi pasar modal di negara-negara yang sedang berkembang (Iglesias-Palau, 2000; Lefort and Walker, 2000).

Diamond and Verrecchia (1991) serta Kim and Verrecchia (1994) memberikan argumen bahwa *disclosure* akan mengurangi asimetri informasi antara investor berinformasi dengan investor tidak berinformasi. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat *disclosure* tinggi, investornya secara relatif lebih mempunyai keyakinan bahwa setiap transaksi saham yang terjadi adalah pada suatu tingkat harga yang wajar (*fair price*), sehingga meningkatkan likuiditas saham yang dimiliki perusahaan. Selain itu, studi tersebut juga memberikan argumen bahwa perluasan *disclosure* dan likuiditas saham akan berasosiasi dengan kepemilikan institusi.

Penelitian investor institusi yang dilakukan Brickley, Lease, and Smith (1988) menunjukkan bahwa investor institusi memberikan suara yang lebih aktif pada amandemen *takeover* dibandingkan pemilik yang lain. Selain itu Brickley, Lease, and Smith juga menunjukkan bahwa investor institusi lebih aktif menentang proposal yang akan merugikan pemegang saham. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa investor institusi melakukan monitoring yang lebih baik dibandingkan dengan investor lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Bathala, Moon, and Rao (1994) yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan ekuitas manajemen, *financial leverage*, dan kepemilikan institusi saling berhubungan di antara yang satu dengan yang lain di dalam situasi yang konsisten dan sistematis untuk mengurangi biaya keagenan.

Investor besar atau pemegang saham dalam jumlah besar selain memberikan manfaat juga dapat menimbulkan kerugian. Shleifer and Vishny (1997) menjelaskan bahwa investor besar merepresentasikan keinginan mereka sendiri yang perlu disamakan dengan kepentingan investor lain atau dengan kepentingan pekerja dan manajer perusahaan. Dalam proses penggunaan hak pengendalian untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri, investor besar dapat mendistribusikan kekayaan baik dengan cara yang efisien maupun tidak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di negara industri, kepemilikan dalam jumlah besar selain menimbulkan manfaat juga berpotensi menimbulkan

kerugian. Gunarsih (2002) menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, kepemilikan institusi domestik dalam jumlah besar justru merepresentasikan kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian Gunarsih menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan oleh institusi domestik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini diekspektasi bahwa kepemilikan institusi domestik dalam jumlah besar akan menurunkan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemegang saham institusi domestik dan sebagai akibatnya menurunkan transparansi.

Oleh karena dalam penelitian ini tingkat transparansi diproksikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₃: Proporsi kepemilikan institusi domestik berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

H₄: Proporsi kepemilikan institusi domestik berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

3. Pengaruh proporsi kepemilikan institusi asing terhadap tingkat transparansi

Berdasarkan perspektif *corporate governance*, terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dalam jumlah besar di negara yang memiliki pasar likuid (negara maju) dengan negara yang memiliki pasar kurang likuid (negara yang sedang berkembang). Maug (1998) menjelaskan bahwa pada pasar modal yang likuid, pemilik saham dalam jumlah besar kurang memiliki insentif untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan karena dimungkinkan bagi mereka untuk menjual saham apabila mereka menerima informasi yang kurang menguntungkan mengenai perusahaan. Sebaliknya, pada pasar yang kurang likuid, pemilik saham dalam jumlah besar akan dipaksa tetap memiliki saham tersebut dan menggunakan hak suara yang mereka miliki untuk mempengaruhi perusahaan guna memperoleh *return* yang lebih baik.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa investor institusi asing akan melakukan diversifikasi secara internasional dalam rangka mengurangi variasi *return*

portofolio. Investor institusi asing cenderung lebih konservatif di dalam melakukan investasi pemilihan saham yang dibelinya dibandingkan dengan investor institusi domestik. Pada pasar yang kurang likuid, investor institusi asing akan melakukan monitoring terhadap perusahaan dalam rangka memperoleh imbal hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, pada pasar yang kurang likuid akan terjadi mekanisme *corporate governance* yang lebih baik oleh investor institusi asing.

Khanna and Palepu (1999) melakukan penelitian terhadap investor institusi asing yang ada di *emerging market* dengan menggunakan sampel lembaga investasi asing yang ada di India pada awal tahun 1990-an. Peneliti melakukan pengujian terhadap interaksi di antara tiga bentuk konsentrasi kepemilikan yang pada umumnya terdapat di *emerging market*, yaitu kelompok perusahaan keluarga, lembaga investasi domestik, dan lembaga investasi asing. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa lembaga investasi domestik lebih lemah di dalam melakukan kegiatan monitoring dibandingkan dengan lembaga asing. Kinerja perusahaan dengan proksi *Tobin's Q* secara positif berhubungan dengan kepemilikan institusi asing dan secara negatif berhubungan dengan kepemilikan institusi domestik. Afiliasi kelompok perusahaan dengan lembaga investasi asing lebih mudah melakukan monitoring terhadap perilaku manajemen perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berafiliasi dengan lembaga investasi asing. Kelompok yang lebih transparan cenderung menggunakan lembaga investasi asing. Penelitian Khanna dan Palepu menyimpulkan bahwa lembaga investasi asing memberikan fungsi monitoring yang lebih baik pada saat *emerging market* berinteraksi dengan perekonomian global. Oleh karena keunggulan yang dimiliki oleh institusi asing sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diekspektasi bahwa investor institusi asing mempunyai kemampuan monitoring yang lebih baik dibanding dengan investor institusi domestik.

Oleh karena dalam penelitian ini tingkat transparansi diproksikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_5 : Proporsi kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

H_6 : Proporsi kepemilikan institusi asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

4. Pengaruh proporsi kepemilikan publik (masyarakat) terhadap tingkat transparansi

Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik (masyarakat) merupakan hal yang lazim dijumpai di negara-negara yang sudah maju. Sebaliknya hal tersebut masih merupakan sesuatu yang langka terjadi di lingkungan negara-negara yang sedang berkembang. Pola kepemilikan yang lazim terjadi di negara-negara yang sedang berkembang adalah terjadinya dominasi kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan publik atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan publik pada umumnya hanya dimiliki oleh lingkungan keluarga yang sangat dekat. Di dalam pola kepemilikan terkonsentrasi, dimungkinkan bagi *insiders* untuk melakukan pengendalian secara ketat terhadap perusahaan, meskipun di sisi lain juga membuka peluang kemungkinan terjadinya ekspropriasi oleh *insiders* terhadap pemegang saham luar dan penyedia modal lainnya.

Terdapat variasi yang sangat kompleks di antara pola kepemilikan yang terdapat di dalam perekonomian yang telah maju, yang sedang berkembang, dan yang sedang dalam masa transisi. Di dalam perekonomian yang telah maju, pola kepemilikan saham yang tersebar dan terkonsentrasi telah memberikan basis yang efisien bagi terciptanya pertumbuhan dan akumulasi modal sesuai aturan dan kerangka kerja regulasi. Di dalam perekonomian yang sudah maju, aturan dan kerangka kerja regulasi telah dapat berfungsi dengan baik, sehingga terdapat pengawasan yang secara aktif dilakukan oleh agen-agen yang memiliki reputasi dan didukung oleh infrastruktur pengelolaan yang memadai serta institusi yang profesional.

Tidak seperti perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (US) dan Inggris (UK) yang struktur kepemilikan sahamnya tersebar, struktur kepemilikan saham di Indonesia pada umumnya terkonsentrasi pada beberapa anggota keluarga yang hubungannya sangat dekat. Sebagian besar perusahaan yang berafiliasi (*interlocking*) dikendalikan oleh keluarga yang sama. Pada kepemilikan tersebar, masalah perbedaan kepentingan

utama yang terjadi adalah antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Permasalahan perbedaan kepentingan ini berbeda dengan perusahaan yang mempunyai struktur kepemilikan terkonsentrasi. Pada kepemilikan terkonsentrasi, masalah perbedaan kepentingan yang utama adalah antara pemilik mayoritas (*controlling shareholders*) sebagai pengendali perusahaan dengan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Shleifer and Vishny (1997) bahwa permasalahan keagenan (*agency problem*) atau permasalahan *moral hazard* tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan manajer, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dengan kreditor dan antara pemegang saham pengendali dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, misalnya pemasok dan karyawan. Secara lebih spesifik, mereka memberikan argumen bahwa di dalam perusahaan-perusahaan besar pada sebagian besar negara di dunia, permasalahan keagenan yang fundamental bukan dalam bentuk konflik seperti yang digambarkan oleh Berle and Means (1934) yaitu antara investor luar dengan para manajer, tetapi merupakan konflik antara investor luar dengan para pemegang saham pengendali yang hampir sepenuhnya dapat mengendalikan para manajer.

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa struktur kepemilikan korporasi akan mempengaruhi sifat permasalahan keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham luar (*outside shareholders*) dan antar pemegang saham. Apabila kepemilikan saham bersifat tersebar, seperti yang terdapat di berbagai perusahaan Amerika Serikat dan Inggris, permasalahan keagenan akan terjadi dalam bentuk konflik kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajer yang memiliki jumlah ekuitas perusahaan dalam jumlah yang tidak signifikan. Dalam situasi demikian, pemegang saham luar (masyarakat) diasumsikan akan lebih memiliki keinginan dan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan monitoring secara ketat dalam rangka mendisiplinkan manajemen.

Oleh karena dalam penelitian ini tingkat transparansi diprosikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis

alternatif sebagai berikut:

H₇: Proporsi kepemilikan publik (masyarakat) berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

H₈: Proporsi kepemilikan publik (masyarakat) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

METODOLOGI

Sampel dan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar secara aktif di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada periode pelaporan tahun 2003. Periode tersebut dipilih karena penelitian ini dilaksanakan setelah diberlakukannya Surat Edaran Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang baru mulai diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 2002.
2. Perusahaan termasuk dalam salah satu di antara tiga belas kelompok industri sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Namun, karena di antara perusahaan sampel terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu dari tiga belas industri yang diatur di dalam surat edaran (industri perbankan, asuransi dan jasa keuangan) serta terdapat satu jenis industri (industri investasi) yang jumlah item *checklist disclosure*nya tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah item *checklist disclosure* industri yang lain, maka terhadap keempat kelompok industri tersebut akan digunakan item *checklist disclosure* untuk industri manufaktur sesuai Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan untuk tahun 2003 dan memiliki laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003.
4. Perusahaan tidak memiliki *leverage ratio* negatif. *Leverage ratio* negatif menunjukkan bahwa

perusahaan sedang bermasalah di dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Berdasarkan kriteria sampel, diperoleh 285 perusahaan yang merupakan sampel di dalam penelitian ini. Perolehan sampel penelitian dilakukan secara bertahap. Pertama, jumlah total perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003 adalah 329 perusahaan. Kedua, dari sejumlah 329 tersebut, yang teridentifikasi memiliki atau menerbitkan laporan tahunan dan laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sejumlah 318 perusahaan. Ketiga, dari sejumlah 318 perusahaan tersebut yang memiliki *leverage ratio* negatif adalah sejumlah 25 perusahaan dan yang nilai bentang tawar-minta, volume perdagangan saham atau volatilitas harga saham sama dengan nol adalah sejumlah 8 perusahaan. Dengan demikian jumlah total perusahaan yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini adalah sejumlah 285 perusahaan.

wajib. Pada tahap kedua (Persamaan 2), variabel proporsi kepemilikan manajemen diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap ketiga (Persamaan 3), variabel proporsi kepemilikan institusi domestik diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap keempat (Persamaan 4), variabel proporsi kepemilikan institusi domestik diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap kelima (Persamaan 5), variabel proporsi kepemilikan institusi asing diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap keenam (Persamaan 6), variabel proporsi kepemilikan institusi asing diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap ketujuh (Persamaan 7), variabel proporsi kepemilikan publik diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap kedelapan (Persamaan 8), variabel proporsi kepemilikan publik diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela.

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada tahun 2003	329
Perusahaan yang teridentifikasi tidak memiliki atau menerbitkan laporan tahunan dan laporan auditor independen	(11)
Perusahaan yang teridentifikasi memiliki atau menerbitkan laporan tahunan dan laporan auditor independen	318
Perusahaan yang memiliki <i>leverage ratio</i> negatif	(25)
Perusahaan yang memiliki nilai bentang tawar-minta, volume perdagangan saham atau volatilitas harga saham sama dengan nol	(8)
Perusahaan yang dipilih sebagai sampel	285

Variabel-variabel yang Diteliti

Penelitian dilakukan dalam 8 tahap regresi. Pada setiap tahap regresi, yang ditetapkan sebagai variabel kontrol adalah jenis industri, ukuran (*size*) perusahaan, rasio *leverage*, status kantor akuntan publik, periode waktu *listing* dan status *listing*.

Pada tahap pertama (Persamaan 1), variabel proporsi kepemilikan manajemen diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan

Pengukuran Variabel Independen

- a. Proporsi kepemilikan manajemen**
Proporsi kepemilikan manajemen dihitung dengan cara membagi jumlah saham beredar yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah total saham yang beredar.
- b. Proporsi kepemilikan institusi domestik**
Proporsi kepemilikan institusi domestik dihitung dengan cara membagi jumlah saham beredar yang

dimiliki oleh institusi domestik dengan jumlah total saham yang beredar.

c. Proporsi kepemilikan institusi asing

Proporsi kepemilikan institusi asing dihitung dengan cara membagi jumlah saham beredar yang dimiliki oleh institusi asing dengan jumlah total saham yang beredar.

d. Proporsi kepemilikan publik

Proporsi kepemilikan masyarakat dihitung dengan cara membagi jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat dengan jumlah total saham yang beredar.

Pengukuran Variabel Dependen

a. Pengukuran Variabel Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib merupakan selisih antara tingkat pengungkapan wajib maksimum yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan (100%) dengan tingkat pengungkapan wajib yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Tingkat pengungkapan wajib dihitung berdasarkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap ketentuan pengungkapan wajib (Baridwan, Machfoedz, dan Tearney, 2001). Perhitungan tingkat pengungkapan wajib adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pengungkapan wajib} = \frac{\text{Ya}}{\text{Ya} + \text{Tidak}}$$

Ya = Pengungkapan informasi secara tepat telah dibuat

Tidak = Pengungkapan informasi secara tepat tidak dibuat

Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib (TPW) dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

TPW= 100% - Tingkat pengungkapan wajib

b. Pengukuran Variabel Tingkat Pengungkapan Sukarela

Pengukuran tingkat pengungkapan sukarela dilakukan melalui dua tahap, yaitu (1) Mengembangkan daftar item pengungkapan sukarela dan (2) Mengukur tingkat atau luas pengungkapan sukarela terhadap sampel laporan tahunan. Daftar item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dikembangkan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Cerf, 1961; Singhvi and Desai, 1971; Buzby, 1974; Benjamin and Stanga, 1977; McNally, Eng, and Hasseldine, 1982; Chow and Wong-Boren, 1987; Susanto, 1992; Choi and Mueller, 1992; Meek, Robert, and Gray, 1995; Botosan, 1997; Suripto, 1997; Gunawan, 2002).

Item-item pengungkapan sukarela yang dimasukkan dalam daftar meliputi (1) Item-item pengungkapan informasi yang diwajibkan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang lain yang tidak diwajibkan menurut peraturan Bapepam dan (2) Item-item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya yang tidak diwajibkan menurut peraturan Bapepam mengenai laporan tahunan. Dengan prosedur tersebut diperoleh 35 item informasi yang dapat diungkapkan secara sukarela oleh manajemen dalam laporan tahunan.

Daftar item yang dikembangkan tersebut kemudian digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela terhadap sejumlah sampel laporan tahunan perusahaan. Tingkat pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan untuk penentuan skor tingkat pengungkapan sukarela pada dasarnya bersifat dikotomi, artinya sebuah item diberi skor satu jika diungkapkan dan nol jika tidak diungkapkan.
2. Menggunakan model pengungkapan informasi yang tidak diberi bobot, sehingga memperlakukan semua item pengungkapan informasi secara sama. Penggunaan model ini (tanpa pembobotan) didasari alasan sebagai berikut (1) Laporan tahunan disampaikan untuk tujuan umum pemakai dan (2) Terdapat kemungkinan terjadinya subjektivitas dalam pemberian bobot, sehingga masing-masing pemakai laporan akan memberikan bobot yang

berbeda untuk item yang sama.

3. Luas pengungkapan informasi relatif setiap perusahaan diukur dengan indeks, yaitu rasio total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut.

Model Penelitian

Pada model penelitian, dapat dirumuskan beberapa persamaan sebagai berikut:

$$TPW = \alpha + \beta_1 PKM + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (1)$$

$$TPS = \alpha + \beta_1 PKM + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (2)$$

$$TPW = \alpha + \beta_1 PID + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (3)$$

$$TPS = \alpha + \beta_1 PID + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (4)$$

$$TPW = \alpha + \beta_1 PIA + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (5)$$

$$TPS = \alpha + \beta_1 PIA + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (6)$$

$$TPW = a + \beta_1 PKP + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (7)$$

$$TPS = \alpha + \beta_1 PKP + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + \cdot \quad (8)$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

a. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajemen Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan wajib

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai d (Durbin Watson) adalah sebesar 1,701

atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai F tidak signifikan (1,238). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R² adalah sebesar 0,119. Meskipun nilai R² rendah, namun model secara statistik signifikan (F= 5,324 dan *p-value*= 0,000). Nilai R² yang rendah menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib yang tidak tercakup di dalam model.

b. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajemen Terhadap Tingkat Pengungkapan sukarela

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai d (Durbin Watson) adalah sebesar 1,859 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai F adalah tidak signifikan (0,468). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R² adalah sebesar 0,098. Meskipun nilai R² rendah, namun model secara statistik signifikan (F= 4,309 dan *p-value*= 0,000). Nilai R² yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

c. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Domestik Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan wajib

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,689 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* adalah tidak signifikan (1,667). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,120. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 5,420$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

d. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Domestik Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Sukarela

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,860 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* tidak signifikan (0,495). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,097. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 4,264$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

e. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Asing Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan wajib

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,698 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* adalah tidak signifikan (1,264). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,117. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 5,225$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

f. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Asing Terhadap Tingkat Pengungkapan sukarela

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,850 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* adalah tidak signifikan (0,828). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,099. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 4,357$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

g. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan wajib

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,678 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* adalah tidak signifikan (1,116). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,135. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 6,175$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

h. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan sukarela

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah di bawah 10 dan nilai TOL mendekati 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Hasil regresi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* menunjukkan bahwa nilai *d* (Durbin Watson) adalah sebesar 1,858 atau di sekitar 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi autokorelasi. Hasil regresi dengan menggunakan *Glejser Test* terhadap nilai-nilai absolut residual variabel independen menunjukkan bahwa nilai *F* adalah tidak signifikan (0,619). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,098. Meskipun nilai R^2 rendah, namun model secara statistik signifikan ($F= 4,307$ dan $p\text{-value}= 0,000$). Nilai R^2 yang rendah menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak tercakup di dalam model.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajemen Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan manajemen (PKM) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,435. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

b. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajemen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan manajemen (PKM) adalah positif tidak seperti yang dihipotesiskan dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,567. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

c. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Domestik Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan institusi domestik (PID) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,272. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi domestik tidak berpengaruh terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

d. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Domestik Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan institusi domestik (PID) adalah positif tidak seperti yang dihipotesiskan dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,837.

Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi domestik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

e. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Asing Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan institusi asing (PIA) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan p -value sebesar 0,974. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi asing tidak berpengaruh terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

f. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusi Asing Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan institusi asing (PIA) adalah negatif, seperti yang dihipotesiskan dengan p -value sebesar 0,427. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusi asing tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

g. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan publik (PKP) adalah negatif seperti yang dihipotesiskan dengan p -value sebesar 0,016. Dengan menggunakan tingkat α 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

h. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi kepemilikan publik (PKP) adalah positif, seperti yang dihipotesiskan dengan p -value sebesar 0,577. Dengan menggunakan tingkat α

0,05, maka hipotesis nol tidak berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap transparansi pengelolaan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian ditunjukkan bahwa penelitian ini gagal mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan manajemen, proporsi kepemilikan institusi domestik, dan proporsi kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap tingkat transparansi. Hanya proporsi kepemilikan publik yang secara statistis signifikan berpengaruh terhadap tingkat transparansi. Proporsi kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Namun, hasil pengujian gagal mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa tingkat keterbukaan perusahaan publik di Indonesia untuk mengungkapkan informasi kepada publik lebih disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sanksi berat yang akan diterima perusahaan apabila mereka melanggar ketentuan yang diwajibkan oleh lembaga otoritas (Baepem dan BEJ). Proporsi kepemilikan publik belum mampu mendorong perusahaan publik untuk secara sukarela lebih terbuka di dalam mengungkapkan informasi yang perlu disampaikan kepada publik (pengungkapan sukarela).

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, meskipun di dalam penelitian ini pengukuran terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib telah berpedoman pada Surat Edaran Ketua Baepem No. 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, namun di dalam pedoman tersebut belum terdapat ketentuan yang secara khusus berlaku

untuk industri perbankan, asuransi, dan jasa keuangan. Kedua, di antara tigabelas kelompok industri yang diatur di dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Informasi dan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, jumlah item *checklist disclosure* untuk industri investasi hanya 271, sedangkan jumlah item industri yang lain adalah antara 632 item sampai dengan 711 item. Jumlah item yang terlalu kecil untuk industri investasi dibandingkan dengan industri yang lain menyebabkan pengukuran tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib antar industri menjadi tidak proporsional.

Implikasi

Pada penelitian ini, implikasi untuk penelitian yang akan datang terkait dengan variabel-variabel yang belum didukung signifikansinya. Proporsi kepemilikan manajemen, proporsi kepemilikan institusi domestik, dan proporsi kepemilikan institusi asing yang tidak didukung pengaruhnya, baik terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib maupun tingkat pengungkapan sukarela, menunjukkan bahwa beberapa jenis kepemilikan tersebut tidak mempengaruhi tingkat transparansi. Sedangkan, proporsi kepemilikan publik hanya didukung pengaruhnya terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Oleh karena itu, pada penelitian yang akan datang perlu dipertimbangkan jenis struktur kepemilikan atau cara pengukuran struktur kepemilikan lain yang lebih tepat untuk diuji pengaruhnya terhadap transparansi.

Sebelum La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer (1999) mengkaji struktur kepemilikan di 27 negara yang perekonomiannya dianggap mengalami pertumbuhan yang pesat, belum ada bukti empiris yang mampu menunjukkan pola kepemilikan perusahaan publik yang sesungguhnya. Oleh karena itu, La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer berusaha melakukan penelusuran kepemilikan perusahaan publik dengan menggunakan konsep baru yang lebih komprehensif, yaitu konsep kepemilikan ultimat (*ultimate ownership*).

Pada penelitian ini masih digunakan konsep kepemilikan imediat (*immediate ownership*). Dari berbagai pengujian hipotesis, khususnya pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat transparansi, terbukti bahwa struktur kepemilikan imediat belum

mampu menangkap fenomena kepemilikan yang sesungguhnya, karena hampir semua struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena struktur kepemilikan imediat memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Kepemilikan imediat tidak mempertimbangkan rantai kepemilikan (*chain of ownership*). Dalam kepemilikan perusahaan publik telah diungkapkan nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya. Pemegang saham tersebut dapat berupa perusahaan (institusi) atau individu. Sebuah perusahaan dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan yang lain dan sebaliknya perusahaan lain tersebut juga dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan pertama.
2. Kepemilikan imediat tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) atau pemilik ultimat (*ultimate owner*) yang sesungguhnya. Walaupun seseorang tidak terdaftar atas nama dirinya sendiri sebagai pemegang saham pada sebuah perusahaan publik, namun orang tersebut dapat mengendalikan perusahaan publik tersebut melalui perusahaan lain. Hal ini terjadi apabila terdapat rantai kepemilikan antarperusahaan.
3. Kepemilikan imediat tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi hak arus kas (*cash flow right*), hak kontrol (*control right*), dan *leverage* hak arus kas (*cash flow right leverage*) pemegang saham pengendali. Hak arus kas adalah klaim pemegang saham untuk mendapatkan dividen. Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan. Sedangkan *leverage* hak arus kas adalah deviasi (selisih) antara hak arus kas dengan hak kontrol yang disebabkan oleh adanya peningkatan hak kontrol pemegang saham pengendali terhadap perusahaan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme.
4. Konsep kepemilikan imediat tidak dapat mengidentifikasi mekanisme peningkatan kontrol oleh pemegang saham pengendali. Mekanisme peningkatan hak kontrol digunakan untuk memperbesar *leverage* hak arus kas. Seorang pemegang saham pengendali dapat meningkatkan hak kontrol jauh melebihi hak arus kas dengan

berbagai mekanisme, seperti struktur kepemilikan piramida, lintas kepemilikan (*crossholdings*), dan saham dengan hak suara yang berbeda. Besarnya *leverage* hak arus kas menunjukkan besarnya kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dengan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Ekspropriasi adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens, Djankov, Fan, and Lang, 2000). Oleh karena itu, besarnya *leverage* hak arus kas menunjukkan besarnya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Oleh karena itu, di dalam penelitian selanjutnya pengujian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat transparansi perlu dilakukan dengan menggunakan konsep baru yang disebut kepemilikan ultimat. Dengan menggunakan konsep kepemilikan ultimat, diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang lebih objektif, karena konsep baru tersebut mampu menunjukkan pola atau struktur kepemilikan perusahaan publik yang sesungguhnya.

Implikasi lain adalah berupa implikasi kebijakan, terutama bagi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada penelitian yang akan datang, pengukuran terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib perlu menggunakan Surat Edaran Ketua Bapepam No. 02/PM/2002, tetapi telah dikembangkan dengan memperhatikan pedoman yang berlaku untuk setiap industri, termasuk industri perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan investasi

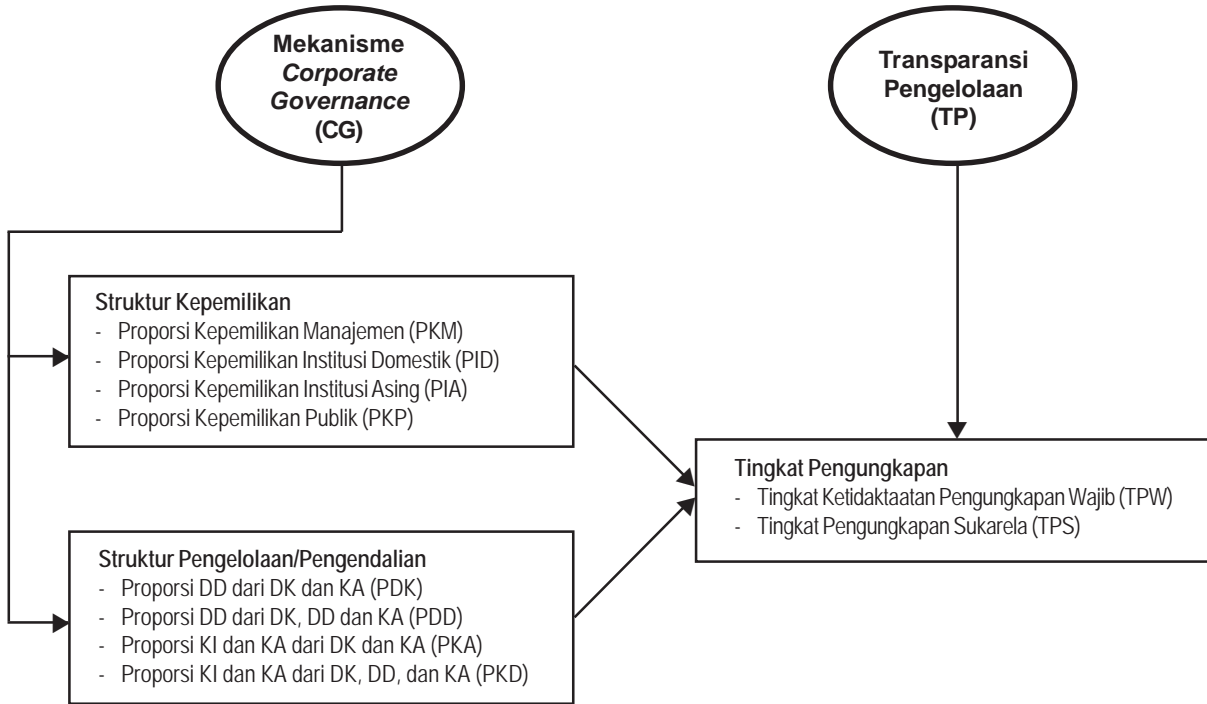
Selanjutnya, dari hasil penelitian juga ditunjukkan bahwa pada tahun 2003 rata-rata tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib adalah sebesar 23,09%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan publik di Indonesia yang belum menaati ketentuan pengungkapan wajib sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan, Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada tahun 2003, rata-rata tingkat pengungkapan sukarela adalah sebesar 38,40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan publik di Indonesia yang belum mempunyai sikap sukarela untuk mengungkapkan informasi selain yang diwajibkan oleh peraturan Bapepam.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Persamaan	Variabel Dependen	Variabel Independen Utama	Koefisien Variabel Independen Utama	Nilai t	Signifikan	VIF	DW	Glejser-test	Nilai F Model	R ²
1	TPW	PKM	4,801E-02	0,782	0,435	1,021	1,701	1,238	5,324	0,119
2	TPS	PKM	5,782E-02	0,573	0,567	1,021	1,859	0,468	4,309	0,098
3	TPW	PID	1,940E-02	1,100	0,272	1,208	1,689	1,667	5,420	0,120
4	TPS	PID	5,991E-03	0,206	0,837	1,208	1,860	0,495	4,264	0,097
5	TPW	PIA	5,860E-04	0,033	0,974	1,266	1,698	1,264	5,225	0,117
6	TPS	PIA	-2,308E-02	-0,795	0,427	1,266	1,850	0,828	4,357	0,099
7	TPW	PKP	-6,211E-02	-2,425**	0,016**	1,048	1,678	1,116	6,175	0,135
8	TPS	PKP	2,374E-02	0,559	0,577	1,048	1,858	0,619	4,307	0,098

- *** Signifikan pada tingkat 1%
- ** Signifikan pada tingkat 5%
- * Signifikan pada tingkat 10%



Catatan:

- DD = Jumlah anggota dewan direksi
- DK = Jumlah anggota dewan komisaris
- KA = Jumlah anggota komite audit
- KI = Jumlah komisaris independen

Gambar 1
Rerangka Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki, Mas'ud Machfoedz, and M. G. Tearney (2001). "An Evaluation of Disclosure of Financial Information by Public Companies in Indonesia". *Hasil Penelitian SIAGA-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi UGM*.

Benjamin, J. J. and Keith G. Stanga (1977). "Differences in Disclosure Needs of Major Users of Financial Statements". *Accounting and Business Research*, Summer, pp. 187-192.

Berle, Adolf A. and Gardiner C. Means (1933). "The Modern Corporation and Private Property". (New York, NY: Macmillan, 1933).

Brennan, N. (1995). "Disclosure in Profit Forecast: Evidence from UK Takeover Bids". *Unpublished Conference Paper, 18th Annual Congress of the European Accounting Association*, Birmingham, England.

- Brickley, James A., Ronald C. Lease and Clifford W. Smith, Jr. (1988). "Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments". *Journal of Financial Economics* 20, pp. 267-291.
- Buzby, Stephen L. (1974). "Selected Items of Information and Their Disclosure in Annual Reports". *The Accounting Review*, July, pp. 423-435.
- Cadbury, Sir Adrian (1996). "Corporate Governance: Brussels". Instituut voor Bestuurders, Brussel".
- Cerf, Alan R. (1961). "Corporate Reporting and Investment Decisions". Berkeley, CA: The University of California Press.
- Chen, Charles and Jaggi (1998). "The Association Between Independent Non Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures". *Working Paper*. Department of Accountancy, City University of Hong Kong.
- Chow and Wong-Boren (1987). "Voluntary Financial Disclosures by American Corporations". *The Accounting Review*, Vol. LXII, No. 3, July, pp. 533-541.
- Choi, Frederick D. S. and Gerhard G. Mueller. (1992). "International Accounting. Second Edition". London: Prentice-Hall, Inc.
- Demsetz and K. Lehn (1985). "The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences". *Journal of Political Economy* 88, pp. 1155-1177.
- Denis, David J., Diane K. Denis, dan Atulya Sarin (1999). "Agency Theory and the Influence of Equity Ownership Structure on Corporate Diversification Strategies". *Strategic Management Journal* 20, 1071-1076.
- Denis, Diane K. and John J. McConnell (2003). "International Corporate Governance". *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 38, 1-36.
- Diamond, D. and Verrecchia, R. (1991). "Disclosure, Liquidity, and the Cost of Equity Capital". *The Journal of Finance*, September, pp. 1325-1360.
- Eng, Li Li and Y. T. Mak (2001). "Corporate Governance and Voluntary Disclosure."
- Fama, E. F. (1980). "Agency Problems and the Theory of the Firm". *The Journal of Political Economy*, 88, pp. 28-307.
- Fama, E. and M. Jensen (1983). "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics* Vol. 26, pp. 301-326.
- Fitriany (2001). "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Symposium Nasional Akuntansi IV*.
- Forker, John J. (1992). "Corporate Governance and Disclosure Quality". *Accounting and Business Research*, pp. 111-124.
- Gillan, Stuart L. and Laura T. Starks (2003). "Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: A Global Perspective". *Working Paper Series*, 01.
- Gunarsih, Tri (2002). "Struktur Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan: Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan." *Disertasi Doktor UGM* Yogyakarta.
- Gunawan, Inge (2002). "Pengaruh Kelompok Industri, Basis Perusahaan, dan Tingkat Return Terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. Tesis UGM.
- Ho, Simon S. M. and K. S. Wong (2000). "A Study of the Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure". *Working Paper*.
- Iglesias-Palau, A. (2000). "Pension Reform and Corporate Governance: Impact in Chile". *ABANTE* 3, pp. 109-141.

- Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Keasy, Kevin and Mike Wright (1997). "Corporate Governance: Responsibilities, Risks and Remuneration". New York, NY: John Wiley & Sons.
- Khanna, Tarun and Krishna Palepu (1999). "Emerging Market Business Groups, Foreign Investors and Corporate Governance". *National Bureau of Economic Research. Working Paper*.
- Kim, Oliver and R. E. Verrecchia (2001). "The Relation Among Disclosure, Returns, and Trading Volume Information". *Accounting Review*, Vol. 76. No. 4, pp. 633-654.
- Khomsiyah (2005). "Analisis Hubungan Indeks dan Struktur Corporate Governance Dengan Kualitas Pengungkapan". Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer (1999). "Corporate Ownership Around the World". *Journal of Finance* 54, 471-517.
- Lefort, F. and E. Walker (2000). "Ownership and Capital Structures of Chilean Conglomerates: Facts and Hypotheses for Governance". *ABANTE* 2, 3-27.
- Lins, Karl V. and Francis E. Warnock (2004). "Corporate Governance and the Shareholder Base".
- Malone, D., C. Fries, and T. Jones (1993). "An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Financial Disclosure in the Oil and Gas Industry". *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, pp. 249-273.
- Maug, E. (1998). "Large Shareholders as Monitors: Is There a Trade-off Between Liquidity and Control?" *Journal of Finance* 53, pp. 65-98.
- Marwata (2001). "Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia". Makalah, SNA IV Bandung.
- McNally, Graeme M, Lee Hock Eng, and C. Roy Hasseldine (1982). "Corporate Financial Reporting in New Zealand: An Analysis of User Preferences, Corporate Characteristics and Disclosure Practices for Discretionary Information". *Accounting and Business Research*, Winter, pp. 11-20.
- Mckinnon, J. L. and L. Dalimunthe (1993). "Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies". *Accounting and Finance*, May, pp. 33-50.
- Meek, G. K., C. B. Robert and S. J. Gray (1995). "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK, and Continental Europe Multinational Corp". *Journal of International Business Studies* Vol. 26, No. 3, pp. 555-572.
- Morck, R., A. Shleifer and R. W. Vishny (1988). "Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis". *Journal of Financial Economics* Vol. 20, pp. 293-315.
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman (2000). "Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1, hal 70-82.
- Ruland, W., S. Tung and N. E. George (1990). "Factors Associated with the Disclosure of Managers' Forecasts". *The Accounting Review* 16(1): 41-55.
- Shingvi, S. S. and H. B. Desai (1971). "An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure". *The Accounting Review*, January, 129-138.
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1997). "A Survey of Corporate Governance". *Journal of Finance*, 52: 737-783.

Subiyantoro, Edy (1997). "Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia". Tesis S2 UGM Yogyakarta.

Williamson, O. E. (1985). "The Modern Corporation: Evolution and Attributes" *Journal of Economic Literature*. December, pp. 1537-1568.

Subroto, Bambang (2003). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib oleh Perusahaan-Perusahaan Publik dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Para Investor di Pasar Modal". *Disertasi Doktor UGM Yogyakarta*.

Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 tentang Pengungkapan dalam Laporan Tahunan di Indonesia.

Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Suripto, Bambang (1998). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Dalam Laporan Tahunan". Tesis S2 UGM Yogyakarta.

Surat Edaran No. 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Susanto, Djoko (1992). "An Empirical Investigation of the Corporate Disclosure in Annual Reports of Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange". *Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi Jakarta. Disertasi S3: University of Arkansas*.

Wang, Yihui, Li Liao, and Xiaotie Deng (2003). "The Effect of Investor Protection on Information Asymmetry in a Stock Market". August.

Warfield, T., J. J. Wild, and K. Wild (1995). "Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings". *Journal of Accounting and Economics* 20: 61-91.

GOING BEYOND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE CRITICAL FACTORS OF CORPORATE SOCIAL INNOVATION—AN EMPIRICAL STUDY¹

Dwi Astuti Ningsih dan Wakhid Slamet Ciptono²

ABSTRACT

Corporations are continually looking for new sources of innovation. Innovation is a new way of doing things that is commercialized. The process of innovation cannot be separated from a firm's strategic and competitive context. Today several leading companies are beginning to find inspiration in an unexpected place: the social sector. That includes natural disaster recovery programs, welfare-to-work programs, and public education development program. Indeed, a new paradigm for innovation is emerging: a partnership between private enterprise and public interest that produces profitable and sustainable change for both sides—successful private-public partnerships or corporate social innovation.

The development of strategic innovation through corporate social innovation has grown in importance in recent years. This study examines the critical factors which facilitate the corporate social innovation for developing strategic innovation in banking organizations. The factor analysis of data emphasizes the importance of external innovation aspects, internal

innovation aspects, accountability innovation, and citizenship innovation in strategic innovation initiatives; and offers support to the growing literature arguing for a greater consideration of the human dimension in corporate social innovation implementation program. It is proposed that further research needs to be carried out to examine managerial attitudes towards the implementation process of corporate social innovation and to assess some of the practical issues involved in developing strategic innovation in banking organizations.

Keywords: *corporate social innovation, corporate social responsibility, strategic innovation.*

INTRODUCTION

On Saturday, 27 May 2006 at 05.53.58, an earthquake rated 6.2 on the Richter scale struck in the Jogjakarta Special District and nearby areas of Central Java. The quake claimed over six thousand lives and devastated many areas of the two provinces. Heavy damage was sustained by public facilities and infrastructure, caus-

¹ This article was presented on the 2nd Indonesian Business Management Conference—"Mastering Innovation for Corporate Growth" held by Prasetiya Mulya Business School, Jakarta: January 30, 2007.

² Dwi Astuti Ningsih, SE., MM., adalah alumni Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM., adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UGM, *Ph.D. Candidate* of Faculty of Business and Accountancy University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia and Faculty of Economics, Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia

ing severe impact on the local economy and tourism industry. Residents on the slopes of Merapi Mountain, who also felt the quake, believed that the earthquake was connected with the activity of the volcano, which was in “alert” status at the time. This, however, was not the case; this was not a volcanic earthquake, but a tectonic one, centered in the Oya River. The massive quake created panic among residents, who feared that a tsunami might follow, as occurred last year in Aceh. Luckily, no tsunami ensued (The Magazine of Garuda Indonesia, 2006).

This tectonic earthquake in Jogjakarta was the second recent major natural disaster to strike the country, after the major earthquake and enormous tsunami that struck at the end of 2004. Trauma and misery continue to haunt Jogjakarta’s residents. Repeated aftershocks have added to their panic and depression. Merapi Mountain’s volcanic activity also resumed on 8 June 2006, with continuous and increasing large-scale emissions of scalding steam and toxic gases.

Natural disasters in Indonesia (including tsunami in Pangandaran Beach, West Java Province) attract much sympathetic attention, both domestically and internationally. As part of their Corporate Social Responsibility (CSR) programs, many state-owned and private companies in Indonesia (including Bank Rakyat Indonesia or Bank BRI as a retail banking institution) delivered donations from their companies in the form of cash, medicines, foodstuffs, milk, tents, blankets, and clothing, which were given directly to the victims. In connection with the earthquake, Bank BRI also opened a “Bank BRI Cares” command post at its Branch Offices in Jogjakarta Special Province to assist its customers and employees whose homes were damaged by the quake. These facts determine what are arguably the most distinctive feature of the current focus on and attitudes towards CSR—the demonstration by businesses of a responsiveness to societal and environmental concerns. Now more than ever before, CSR is developing along practical lines with crucial implications for the strategies and performance of firms as well as for industry structure (Decker, 2004).

Decker (2004) stated that businesses see CSR, somewhat paradoxically, as a source of business risk as well as a source of business opportunity. If not properly managed, CSR could have a direct negative impact on a business. Alternatively, CSR could yield benefits

when appropriate mechanisms are put in place for CSR management. There is broad consensus among financial and non-financial firms that CSR is of strategic importance to ensure long-term business success. Kanter (1995) found a number of companies that are breaking the mold—they are moving beyond corporate social responsibility (CSR) to corporate social innovation (CSI). These companies are viewing community needs as opportunities to develop ideas and demonstrate business technologies, find and serve new markets; and solve long-standing business problems. They focus on inventing sophisticated solutions through a hands-on approach. This is not charity; it is R&D, a business investment for strategic innovation. Indeed, CSI is emerging—a partnership between private enterprise and public interest that produces profitable and sustainable change for both sides.

This paper examines the developing strategic innovation through corporate social innovation (CSI) program of retail banking institution (Bank BRI Jogjakarta) in the marketplace, which is where the industry perceives CSI issues present the most significant and unique challenges. The Bank BRI specializes in providing services to individuals and small-medium businesses. These services include money transmission, payments, savings, lending, and investments. The structure of the paper is as follows: The next section examines how the concept of CSI relates to the Bank BRI, considering how the defining characteristics of the Bank BRI gives rise to areas of societal concern. This is followed by an outline of a conceptual framework. The penultimate section considers the cause and approaches of the operating environment and business practice that development of strategic innovation through CSI in Bank BRI is likely to affect. It is also outlines the implications of these for evolutionary trends in the Banking industry. The final section concludes.

THE CSI OF BANK BRI AND BANKING SERVICES

Investment in CSR promotes product differentiation at the product and firm levels (McWilliams and Siegel, 2000). Some firms (e.g. Bank BRI as a state-owned bank) produce goods or services with attributes or characteristics that signal to the consumer that the company is concerned about certain social and environmental

issues. Bank BRI has tried to establish a socially responsible corporate image. Both of these strategies will encourage consumers to believe that, by consuming the product, they are directly or indirectly supporting a cause. These strategies (strategic innovation) are effective with those consumers who wish to champion firms that devote resources to CSR (consumer-oriented CSR). Consumer-oriented CSR may also involve intangible attributes such as a reputation for service quality or reliability. The service process occurs simultaneously as the consumption of the service and cannot be separated from the consumption of the service itself. As a result of the degree of simultaneity or inseparability between the production and consumption of services, services tend to be place dependent—proximity to the society (Decker, 2004).

As banking services are intangible and cannot be sampled before purchase, Decker (2004) argues that image and trustworthiness of the suppliers are important for demand. In addition the banks have an inherent social responsibility to “know the customer” (Decker, 2004). The characteristics of banking services highlight the important of trust, customer knowledge, and prudent management of funds, proximity and accessibility as responsibilities that banks have in the marketplace. The banking industry provides society with tools for managing, saving, and investing money (Decker, 2004).

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CSI

The last twenty years (1986-2006) have seen a radical change in the private sector’s relationship both with the government and civil society. Globalization, regionalization, reformation, privatization, and a redrawing of the lines between government and business have changed the basis on which private enterprises are expected to contribute to the public good. Meanwhile, the relationship between companies and civil society has moved on from paternalistic philanthropy to a re-examination of the roles, rights, and responsibilities of business society (UNIDO, 2002).

The dynamics combined with the macro changes have led to the emergence of a new approach to Corporate Social Responsibility (CSR), with companies recognizing that improving their own impacts and addressing wider social and environmental problems

will be crucial in securing their long-term success. Increasingly, high profile companies are implementing CSR processes such as public commitment to standards, community investment, continuous improvement and innovation, stakeholder engagement and corporate reporting on social and environmental performance.

As CSR has developed and become more mainstream, leadership companies have become more ambitious in their approach to each of these dimensions; the focus of external aspects, internal aspects, accountability, and citizenship. At each dimension the restrictions and contradictions imposed by a limited approach to CSR has led them to become more ambitious in tackling issues in a more strategic and integrated way (i.e. strategic innovation through corporate social innovation). In addition, CSR is needed in order to make a significant contribution to addressing poverty, exclusion and environmental degradation. This will go beyond CSR to corporate social innovation (CSI). CSI is emerging a partnership between private (business) companies and public interest that produces profitable and sustainability—what companies must do to create a sustainable society (achieving sustainability through profitable and sustainable change for both sides? Figure 1 shows the conceptual research framework. There are four causes should be considered by the policy makers in order to develop four approaches of CSR/CSI—corporate scandals, transforming the company-centered, limits of global capacity, and fear, conflict and pressure.

Table 1 identified four elements of CSR/CSI and 20 items of CSR/CSI which were used in this study. These elements were developed by Welford (2003) in his study of corporate social responsibility in Europe and Asia: critical elements and best practice.

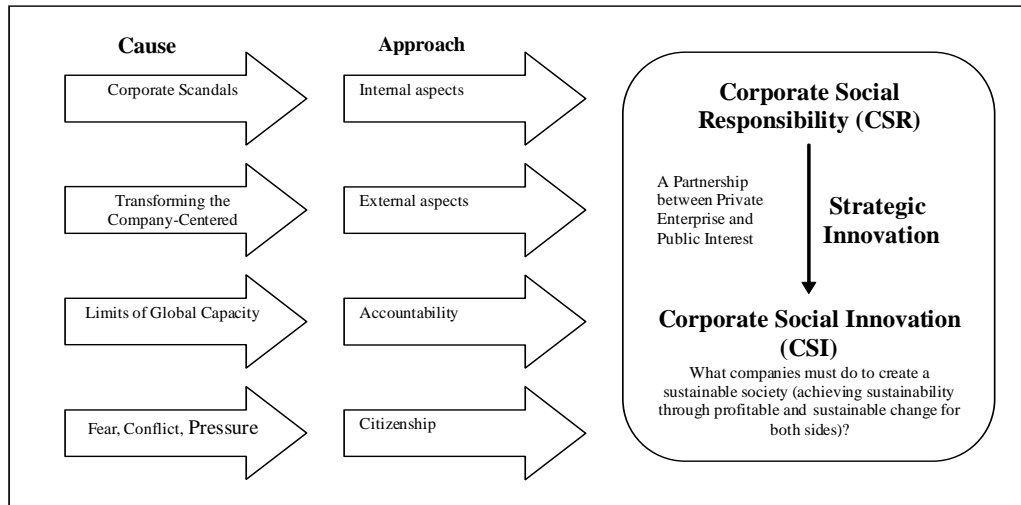


Figure 1
Four Approaches of Corporate Social Innovation
 Source: Kawamura, 2005, p. 8 and Kanter, 1999.

Table 1
Element of Corporate Social Responsibility and Corporate Social Innovation

Element of CSR and CSI		Source of Guidance
Internal Aspects		
1	Written policies on non-discrimination in the workplace	UN Universal Declaration of Human Right, 1948
2	Equal Opportunities statements and implementation plans	ILO Convention 100, 110, and 111
3	Statement on normal working hours, maximum overtime and fair wage structures	ILO Conventions 1, 30, and 47
4	Staff development, in-house education and vocational training	UNESCO Project on Technical and Vocational Education (UNIVOC)
5	The right of freedom of association, collective bargaining and complaints procedures	ILO Convention 98
6	The protection of human rights within the company's own operations	UN Global Compact
External Aspects		
7	Policy on labor standards adopted by suppliers in developing countries	ILO International Labor Standards Convention, 144
8	Policy on restrictions on the use of child labor by suppliers	International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC)
9	commitment to the protection of human right in the company's sphere of influence	UN Global Compact
10	Inspection of suppliers' facilities for health, safety, and environmental aspects	ILO Working Environment Convention, 148

11	Commitment to local community protection and engagement	UNESCO World Heritage Initiative
12	Policy on responding to stakeholders including procedures for the resolution of complaints	Industry best practice
13	Policy on fair trade, equitable trade and price auditing	Ethical Trading Initiative
14	Policy on the protection of indigenous populations and their rights	ILO Indigenous and Tribal Populations Convention, 169
15	Code of ethics (including bribery and corruption)	Transparency International
Accountability		
16	Commitment to reporting on corporate social responsibility and/or sustainable development	Global Reporting Initiative
17	Policy and procedures for engaging a wide range of stakeholders in two-way dialogue	Industry best practice, AA 1000 standard
Citizenship		
18	Direct support for third party social and sustainable development related initiatives	Industry best practice
19	Educational program for the promotion of corporate citizenship	Industry best practice
20	External campaign program for raising social and sustainable development issues	Activities of 'leading edge' companies

Source: Welford, 2003, p. 24.

METHODOLOGY

According to Yin (2003), there are three conditions that determine the applicability of certain research strategies. The three conditions consist of (1) the type of research question posed, (2) the extent of control an investigator has over actual behavioral events, and (3) the degree of focus on contemporary as opposed to historical events. Yin suggests that various strategies are not mutually exclusive, but that certain situations exist in which a specific strategy has a distinct advantage. For the case study approach (i.e. a single industry and/or multiple case study) to have a distinct advantage, a "how" and "why" questions (an explanatory research approach) should be asked about a contemporary set of events over which the investigator has little or no control. Smith and Reece (1999) used this criterion in their article of the relationship of strategy, fit, productivity, and business performance in a service setting.

The particulars of this study, in terms of the condition suggested by Yin (2003) and implemented

by Smith and Reece (1999), strongly suggest the case study (a single industry and/or multiple case studies) as the most appropriate research methodology. A single industry was chosen for the study because the restriction permitted the control of several potential confounding variables that often differ between industries, including the scope and complexity of innovation (CSR) issues (Curkovic *et al.*, 2000). The most important contribution of the present investigation (factor analysis) is in the analysis of a sample of banking institution (Bank BRI) at the management level from the banking industry (a single industry). The advantage of concentrating on a single industry is that the factor analysis of the twenty dimensions of CSR-CSI can be more complete because unique characteristics of the industry can be included (Simpson and Kohers, 2002).

Empirical data for the cross-sectional study was collected from Bank BRI's branch offices in Jogjakarta. Yin (2003) lists six sources of evidence that can be the focus of data collection for case studies. These sources are documentation, archival records, interviews, direct observations, participant observation, and physical

artifacts. Three of these sources are used in this study. Structured interviews of a majority of the managers at each Bank BRI's branch office are used for the twenty dimensions of CSR-CSI. Archival records in the form of operating reports are used for all twenty dimensions. Finally, direct observation is used for the practices of the CSR-CSI dimensions, primarily to corroborate and validate the findings from the structured interviews. The use of multiple informants (the three level of management—top, middle, and low) helps with both the validity and reliability of the study. In addition, a database containing the various field notes, documents, and narratives collected over the course of the study was maintained to improve reliability (Smith & Reece, 1999).

The structured interviews (the questionnaire development) were based on a previous assessing study (Welford, 2003). The questionnaire asked the managers at the Bank BRI's branch office to respond to a set of twenty dimensions of CSR-CSI, synthesized from Welford's study of the establishments on a five-point interval scale (1 = not at all true; 2 = slightly true; 3 = somewhat true; 4 = mostly true; and 5 = completely true). The researcher borrowed the original version of the questionnaires (in English) from the previous studies and then translated it into Indonesian language using the back-translation method, so nothing any discrepancies (Brislin, 1986). During the translation process, the wording of some items adapted to achieve a meaning in Indonesian language closer to the original meaning in English. All negatively worded items were reworded into a positive form. Participants answered using a five-point Likert-type scale ranging from not at all true to completely true. The second version of the questionnaire in Indonesian language was used in the survey. Reliability and convergent validity assessment were performed after the survey has been accomplished by examining item-to-total correlation and employing confirmatory factor analysis, where several items were dropped for further analysis.

A total of 90 individual usable questionnaires were returned thus qualified for analysis, representing an effective response rate of 45 percent. Of these, 12 were from high level managers, 36 from middle level managers, and 42 from low level managers.

RESULTS AND DISCUSSION

The results of the survey on CSR-CSI elements are summarized in Table 2. This Table outlines the means and standard deviations for the individual element of CSR-CSI in the scale and for the overall scale. The average scores of 20 elements of CSR-CSI range from 3.32 for element 20 (Q20) to 4.44 for element 1 (Q1). Element 5 (Q5) has the largest standard deviation, at 0.906. Issue on which the score is relatively low is item 5. It would be seem that many of the respondents do not recommend that element 5 does not important to develop strategic innovation through corporate social innovation (CSI) program.

Table 2
Descriptive Statistic

	N	Mean	Std. Deviation
Q1	90	4.44	0.583
Q2	90	4.14	0.855
Q3	90	4.38	0.646
Q4	90	4.20	0.706
Q5	90	3.86	0.906
Q6	90	4.23	0.637
Q7	90	4.06	0.606
Q8	90	3.84	0.886
Q9	90	3.99	0.571
Q10	90	3.97	0.741
Q11	90	4.08	0.622
Q12	90	3.99	0.711
Q13	90	3.91	0.856
Q14	90	3.78	0.614
Q15	90	3.98	0.653
Q16	90	3.99	0.742
Q17	90	3.91	0.697
Q18	90	3.96	0.702
Q19	90	3.47	0.810
Q20	90	3.32	0.832
Valid N (Listwise)	90		

Source: Ningsih, 2006.

Instrument Reliability

In determining the reliability of the multi-item scale, item to total correlations and coefficient alpha (Cronbach, 1951) were calculated. The results of the reliability analysis for the importance and performance of 20 CSR-CSI dimensions (20 elements) are outlined in Table 3. The scale purification was carried out because elements number 2,5,14, and 18 with item-total correlations of lower than 0.50. These elements were eliminated. The eliminations were improving the standardize item alpha from 0.8992 (Table 3) to 0.9047 (Table 4), reliabilities of 0.70 or higher will suffice. These confirm the reliability of the 16 elements of CSR-CSI for Bank BRI Jogjakarta.

Table 3
Reliability Analysis –Scale (Alpha)—20 Elements of CSR-CSI

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Q1	75.0444	66.9868	0.5282	0.8947
Q2	75.3444	68.1834	0.2442 (d eleted)	0.9036
Q3	74.1111	66.2797	0.5387	0.8942
Q4	75.2889	65.8257	0.5270	0.8944
Q5	75.6333	65.2910	0.4268 (d eleted)	0.8983
Q6	75.2556	66.3722	0.5384	0.8942
Q7	75.4333	65.7539	0.6349	0.8921
Q8	75.6444	63.6924	0.5580	0.8937
Q9	75.5000	65.5337	0.7041	0.8909
Q10	75.5222	63.8703	0.6706	0.8903
Q11	75.4111	66.1774	0.5730	0.8935
Q12	75.5000	64.0281	0.6883	0.8900
Q13	75.5778	63.6849	0.5813	0.8929
Q14	7.7111	69.3988	0.2531 (d eleted)	0.9008
Q15	75.5111	64.7695	0.6820	0.8906
Q16	75.5000	65.3764	0.5366	0.8941
Q17	75.5778	65.8197	0.5354	0.8942
Q18	75.5333	67.0831	0.4267 (d eleted)	0.8973
Q19	76.0222	64.4265	0.5600	0.8935
Q20	76.1667	64.5674	0.5312	0.8944

Reliability Coefficients

N of Cases = 90

N of Items = 20

Alpha = **0.8992**

Source: Ningsih, 2006.

Table 4
Reliability Analysis –Scale (Alpha)—16 Elements of CSR-CSI

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Q1	59.3111	49.0707	0.5052	0.9014
Q3	59.3778	48.5523	0.5070	0.9013
Q4	59.5556	47.8901	0.5264	0.9008
Q6	59.5222	48.5894	0.5113	0.9012
Q7	59.7000	47.6955	0.6533	0.8971
Q8	59.9111	45.7448	0.5847	0.8994
Q9	59.7667	47.5517	0.7188	0.8956
Q10	59.7889	45.9212	0.7032	0.8946
Q11	59.6778	48.0411	0.5921	0.8988
Q12	59.7667	46.4955	0.6739	0.8958
Q13	59.8444	45.7733	0.6064	0.8984
Q15	59.7778	46.9164	0.6922	0.8956
Q16	59.7667	47.7315	0.5124	0.9013
Q17	59.8444	48.0205	0.5202	0.9009
Q19	60.2889	46.5898	0.5687	0.8996
Q20	60.4333	47.0348	0.5087	0.9021

Reliability Coefficients

N of Cases = 90 N of Items = 16

Alpha = **0.9047**

Source: Ningsih, 2006.

Factor Analysis

In order to apply the factor analysis approach a number of issues had to be addressed. Firstly, the appropriateness of data for factor analysis was examined using Bartlett’s test of Sphericity. The test result for sphericity was large at 772.311 with a corresponding small level of associated significance 0.000. Second, the Kaiser-Meyer Olkin (KMO) measures of sampling adequacy were also employed to measure the strength of the relationship among 20 elements of CSR-CSI. The test result at 0.819 can be classed as meritorious and provides further justification for using factor analysis.

Factor Loadings

Table 5 presents the total variance explained. It shows the factors and their associated eigenvalues, the percentage of variance explained and the cumulative percentages. The study found that there are four factors. These four factors accounted for 68.105 per cent of the total variance.

Table 5
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.820	42.623	42.623	6.820	42.623	42.623	4.457	27.859	27.859
2	1.691	10.569	53.191	1.691	10.569	53.191	2.583	16.141	44.000
3	1.363	8.520	61.711	1.363	8.520	61.711	2.007	12.546	56.546
4	1.023	6.394	68.105	1.023	6.394	68.105	1.849	11.559	68.105
5	0.866	5.410	73.515						
6	0.689	4.306	77.822						
7	0.664	4.149	81.970						
8	0.539	3.369	85.340						
9	0.456	2.850	88.189						
10	0.415	2.595	90.785						
11	0.395	2.470	93.255						
12	0.337	2.106	95.361						
13	0.262	1.636	96.997						
14	0.183	1.141	98.138						
15	0.173	1.084	99.222						
16	0.124	0.778	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis

Source: Ningsih, 2006.

Table 6 shows four groups of CSR-CSI elements. The first group has eight significant loadings, the second group has four, the third group has two, and the fourth group has two. To ensure that only very significant loadings are considered, the variables for a factor selected only when the absolute size of their factor loading is above 0.60. For the first group, the researchers identified one group of eight elements of CSR-CSI as External Aspects of Innovation. For the second group, which have four elements can be assigned as Internal Aspects of Innovation. For the third group, which have two elements can be assigned as Accountability. For the fourth group, which have two elements can be assigned as Citizenships.

Table 6
Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
Q1	0.351	0.559	0.256	-0.272
Q3	0.158	0.563	0.262	0.128
Q4	0.143	0.742	0.002	0.380
Q6	0.244	0.768	0.022	0.083
Q7	0.740	0.141	0.298	0.015
Q8	0.828	0.023	-0.027	0.150
Q9	0.750	0.313	0.133	0.108
Q10	0.726	0.177	0.174	0.256
Q11	0.510	0.378	0.095	0.221
Q12	0.595	0.301	0.358	0.117
Q13	0.737	0.240	-0.090	0.147
Q15	0.765	0.190	0.248	0.053
Q16	0.123	0.221	0.847	0.199
Q17	0.198	0.067	0.826	0.275
Q19	0.283	0.140	0.246	0.790
Q20	0.169	0.139	0.262	0.826
Critical Factors of CSI	External Aspects	Internal Aspects	Accountability	Citizenships

Extraction Method: Principal Component Analysis
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
 a. Rotation Converged in 6 Iterations
 Source: Ningsih, 2006.

CONCLUSION

The empirical analysis found that there are four critical factors of corporate social innovation— **External Aspects, Internal Aspects, Accountability, and Citizenships**. Empirical data for this study (a cross-sectional study) were collected from 90 respondent’s managers in the Bank BRI Jogjakarta. The survey indicates that these four factors accounted for 68.105 per cent of the total variance. This investigation is believed to make a contribution to the strategic innovation by providing empirical evidence from a single Bank that has a set of unique characteristics that offer additional insights.

The Bank BRI Jogjakarta must continue to evolve and learn with perseverance four elements CSI, especially related to the real-time strategic innovation. Presentation of these results on the four elements of

CSI facilitates management interpretation of the information and increases their usefulness in making strategic innovation decisions. Its results show that decision makers of Bank BRI in Jogjakarta can gain considerably from articulating and adapting a comprehensive (corporate) strategy for their innovation activities. The gains that materialize from such a strategy can enhance a company’s growth and value—economic value-added (EVA) and market value-added (MVA).

Corporate social innovation is a comprehensive management system (an integrative approach) for achieving continuous society improvement in stakeholder satisfaction. Corporate social innovation is not one-short deal, but rather a commitment for the life of the organization. For it to be successful there must be strong visionary leadership which earnestly believes in the company’s development program, and more important, its society involvement and empowerment.

A bank service must translate customer (client) requirements into objectives for operations of corporate social innovation known as competitive priorities. Common competitive priorities include low cost, quality, delivery, and flexibility (Ward *et al.*, 1998). It has been widely accepted that competitive priorities in service-manufacturing can be expressed by at least four basic factors: cost, quality, delivery, and flexibility (Fine and Hax, 1985; Hayes and Wheelwright, 1984 in Zhao *et al.*, 2002: p. 287). With the severe competition in the global marketplace, product (goods and services) life cycle is becoming increasingly shorter; so a fifth factor, innovativeness, is now a critical factor in determining the success of a company (Leong *et al.*, 1990). It is commonly known that the first innovative product available in the marketplace can usually be sold at a higher profit margin (Zhao *et al.*, 2002).

It is important to note that the first potential limitation of this study stems from the use of a cross sectional analysis. Cross sectional analysis only give us portrayed at a particular point of time. The researcher can not examine the dynamic nature of trade-off which is changing over time (Silveira and Slack, 2001). In addition the researcher encourages thinking about whether the link between quality factors and customer satisfaction vary over time, either because other time the sustainable community developments are theoretically important or because this link is unstable for some reason. Next research should be conducted longitudinally to observe the progress of the development of strategic innovation through corporate social innovation program.

REFERENCES

- Brislin, R.W. (1986). *The Wording and Translation of Research Instruments*. In W.J. Lonner & J.W. Berry (Eds.), *Field Methods in Cross-Cultural Research*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Bryman, A., & Cramer, D. (1997). *Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows: A Guide for Social Scientists*. Rutledge, New Fetter Lane, London.
- Bryman, A., & Bell, E. (2003). *Business Research Methods*. Oxford University Press, Inc., New York.
- Budiman A., Prasetijo, A., & Rudito B. (2004). *Corporate Social Responsibility, ISCD*, Jakarta.
- Cronbach, I.J. (September, 1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-333.
- Curkovic, S., Melnyk, S., Calantone, R. & Handfield, R. (2000). Validating the Malcolm Baldrige National Quality Award Framework through Structural Equation Modelling. *International Journal of Production Research*. 38 (4), 765-791.
- Decker, O.S. (2004). Corporate Social Responsibility and Structural Change in Financial Services. *Managerial Auditing Journal*, 19 (6), 712-728.
- Fine, C.H. and Hax, A.C. (1985). Manufacturing strategy: a methodology and an illustration, *Interfaces*, Vol. 15 (6); pp. 28-46.
- Hayes, R.H., and Wheelwright, S.C. (1984). *Restoring our competitive edge: Competing through manufacturing*, New York: John Wiley & Sons.
- Kanter, R.M. (1995). *World-class: Thriving Locally in the Global Economy*. New York, N.Y: Simon and Schuster.
- Kawamura, M. (2005). The Evolution of Corporate Social Responsibility in Japan (Part 2)—How CSR “Swells” Have Impacted Corporate Values. *NLI Research*: 1-9.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Case*, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
- Leong, G.K., Snyder, D.L., and Ward, P.T. (1990). Research in the process and content of manufacturing strategy, *OMEGA*, Vol. 18 (2); pp. 109-122.

- McWilliams, A., & Siegel, D. (2000). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Correlation or Misspecification? *Strategic Management Journal*, 21, 603-609.
- Ningsih, D.A. (2006). Implementation Analysis of Corporate Social Responsibility in Bank BRI Jogjakarta. *MM Thesis*. Gadjah Mada University, Jogjakarta.
- Schilling, M.A. (2005). *Strategic Management of Technological Innovation*. New York: McGraw-Hill.
- Sekaran, U. (2000). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 3rd edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Silveira, G.D., and Slack, N. (2001). Exploring the Trade-Off Concept, *International Journal of Operation and Production Management*, 21 (7): 919-964.
- Simpson, W.G., and Kohers, T. (2002, January). The Link between Corporate Social and Financial Performance: Evidence From the Banking Industry. *Journal of Business Ethics*. 2 (2), 97-109.
- Smith, T.M. & Reece, J.S. (1999). The Relationship of Strategy, Fit, Productivity, and Business Performance in a Service Setting. *Journal of Operations Management*. 17, 145-161.
- The Magazine of Garuda Indonesia. (August, 2006). Tackling Independence's Unfinished Project, 30-33.
- Tidd, J., Bessant, J., and Pavitt, K. (2005). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. 3rd Edition. The Atrium, Southern Gate, Chichester, England: John Wiley and Sons.
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2002). Corporate Social Responsibility: Implication for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, Vienna, 1-67.
- Welford, R. (2003). Corporate Social Responsibility in Europe and Asia: Critical Elements and Best Practice, *Corporate Environmental Governance Programme*, 1-9.
- Yin, R.K. (2003). *Case Study Research: Design and Method*. Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc.
- Zhao, X., Yeung, J.H.Y., and Zhou, Q. (2002). Competitive priorities of enterprises in mainland China, *Total Quality Management*, Vol. 13 (3); pp. 285-300.

RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI PASAR SAHAM: PROBLEMA DAN PELUANG RISET

Andreas Lako¹

ABSTRACT

This paper reviews the development, theoretical basis, empirical studies and crucial issues of value relevance literature over last two decades. This review is crucial because there is a considerable debate in recently accounting literature that the value relevance of financial statements numbers to investors has declined or lost a significant portion over time. However, numerous empirical studies investigated the claim reported inconclusive empirical results.

The review finds that there are two main problems with respect to those mixed results. First, it is related to the misspecification of using the theoretical basis between valuation theory plus contextual accounting arguments and market efficiency theory. The other problem is related to the misspecification of applying the measurement methodology in assessing the value relevance of accounting numbers to stock markets. The review also finds that the declining of value relevance of accounting numbers over time is triggered by the ignorance of intangible assets, dramatic changes of business environment, and raise of competing information sources in most empirical studies. For the future research, this study suggests to the researchers to consider accurately the identified factors, besides the firm specific factors such as systematic risk,

firm size, corporate governance and firm quality.

Keywords: *value relevance, explanatory power, return model, price model, association study, dan intangible assets.*

PENDAHULUAN

Sejak Lev (1989) melaporkan hasil evaluasinya terhadap hasil-hasil riset akuntansi berbasis pasar modal di Amerika Serikat (AS) bahwa kegunaan informasi laba untuk pasar saham sangat terbatas, yaitu berkisar 2%-5% untuk periode jendela pendek dan 1%-10% untuk periode jendela panjang, dalam dua dekade terakhir berkembang klaim dalam literatur akuntansi keuangan bahwa relevansi nilai (*value relevance*) dari informasi akuntansi untuk investor pasar saham telah menurun atau memburuk kualitasnya dari waktu ke waktu. Sejumlah studi empiris di AS dan negara-negara berbasis *Internasional Accounting Standards (IAS)*, termasuk Indonesia, telah menginvestigasi klaim tersebut. Namun, bukti-bukti empiris yang dilaporkan masih belum konklusif.

¹ Dr. Andreas Lako, M.Si., adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Belum konklusifnya hasil-hasil studi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan badan-badan penetap standar akuntansi (*standard setters*) dan pembuat regulasi pasar modal tentang apakah perlu atau tidak perlu membuat atau merevisi standar-standar dan regulasi-regulasi yang telah ada untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan informasi laporan keuangan untuk pasar saham (Holthausen dan Watts, 2001). Berdasarkan perspektif akademis, belum konklusifnya hasil-hasil studi tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan riset (*research questions*) berikut ini: Mengapa hasil-hasil studi *value relevance* belum konklusif? Apa problema dan bagaimana solusinya agar hasil-hasil riset selanjutnya dapat dipercaya dan bermanfaat dalam rekomendasi kebijakan untuk *standard setters* dan *regulatory bodies*?

Tulisan singkat ini memaparkan hasil telaah literatur (*literature review*) penulis untuk menjawab sejumlah pertanyaan krusial tersebut. Bagian kedua memaparkan perkembangan dan area riset *value relevance* untuk pasar saham. Bagian ketiga memaparkan tinjauan teoritis literatur *value relevance*, sementara bagian keempat memaparkan riset-riset empirisnya. Bagian terakhir membahas problema dalam riset *value relevance* selama ini dan peluang-peluang risetnya di masa depan.

TELAAH RISET VALUE RELEVANCE

Secara historis, perkembangan riset *value relevance*² informasi akuntansi untuk pasar saham (selanjutnya disingkat studi *value relevance*) telah berkembang sejak akhir dekade 1960an sejak Ball dan Brown (1968) dan Beaver (1968) melakukan pengujian secara empiris untuk mengungkap kegunaan dari angka-angka akuntansi (khususnya laba) untuk pasar saham. Kedua studi tersebut sama-sama melaporkan bahwa laba akuntansi memiliki kandungan informasi (*information*

content) dan berguna untuk investor saham pada periode sekitar pengumuman laba.

Metode studi peristiwa (*event study*) dan desain riset yang dikembangkan, serta hasil-hasil empiris yang dilaporkan Ball dan Brown (1968) dan Beaver (1968) tersebut menjadi peletak fondasi awal dan menginspirasi bagi pengembangan riset-riset akuntansi berbasis pasar modal (*market-based accounting research-MBAR*) pada dekade-dekade berikutnya [Lev dan Ohlson (1982), Watts dan Zimmerman (1986), Bernard (1989), Kothari (2001), Beaver (2002)]. Bukti-bukti empiris yang dilaporkan para periset berikutnya secara konklusif menyimpulkan bahwa pengumuman informasi akuntansi, khususnya laba, memiliki kandungan informasi atau daya penjabar (*explanatory power*) terhadap perubahan harga-harga atau *return* saham di sekitar periode peristiwa (*event window*) pengumuman laba atau laporan keuangan (Lako, 2007). Berdasarkan inspirasi bukti-bukti empiris yang cukup ekstensif tersebut, Lev (1989) melakukan evaluasi terhadap sejumlah hasil riset empiris dari tiga jurnal terkemuka AS selama periode 1980-1988. Lev melaporkan bahwa nilai R^2 informasi laba untuk investor sangat terbatas, yaitu hanya berkisar 2%-5% untuk periode jendela yang pendek dan 1%-10% untuk periode jendela yang panjang³. Sementara nilai R^2 relasi *return* dengan rasio-rasio profitabilitas hanya berkisar 5%-7%. Lev menyatakan bahwa rendahnya kontribusi laba untuk keputusan investasi saham investor tersebut kemungkinan disebabkan oleh: 1) adanya misspesifikasi metodologi pengukuran dan basis teoritis, khususnya dalam penggunaan *price model* dan *return model* dalam sejumlah riset empiris; 2) adanya irasionalitas investor (*noise trading*) atau pasar modal yang tidak efisien (*inefficient market*); atau 3) rendahnya kualitas atau *information content* laba yang dilaporkan tampak begitu besar.

² Holthausen dan Watts (2001) mengkategorikan studi-studi *value relevance* yang menginvestigasi relasi antara nilai pasar saham dengan angka-angka akuntansi untuk tujuan menilai atau menyajikan suatu basis penilaian terhadap kegunaan angka-angka akuntansi di dalam suatu standar akuntansi sebagai literatur *value relevance*. Namun Easton (1999), Barth et al. (2001), Kothari (2001), Beaver (2002) dan lainnya menggunakan istilah literatur *value relevance* berkenaan dengan studi-studi yang menginvestigasi relasi antara angka-angka akuntansi dengan nilai pasar saham (yang tercermin dalam perubahan harga-harga saham) untuk mengungkapkan relevansi nilai informasi akuntansi untuk investor pasar saham pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, Lev (1989) mengusulkan perlunya paradigma baru dalam riset akuntansi untuk menguji kembali paradigma lama riset relasi *return-earnings* untuk menginvestigasi kualitas laba yang dilaporkan. Lev mengusulkan dua agenda riset akuntansi di masa depan, yaitu: 1) menginvestigasi proses diseminasi informasi finansial dalam pasar modal untuk memahami penggunaan aktual data akuntansi yang dilaporkan, dan 2) menginvestigasi kebijakan-kebijakan akuntansi untuk perbaikan dalam pengukuran akuntansi dan teknik-teknik valuasi yang mempengaruhi kemampuan laba dan item-item laporan keuangan lainnya untuk memudahkan prediksi terhadap arus kas untuk investor.

Hasil evaluasi dan usulan Lev (1989) tersebut telah memberi dampak yang sangat luas terhadap arah dan fokus baru dalam riset-riset akuntansi berbasis pasar modal (MBAR) dalam dua dekade terakhir, khususnya perkembangan literatur *value relevance* informasi akuntansi. Hasil telaah literatur yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil riset *value relevance* yang telah diterbitkan sejumlah jurnal akuntansi dan keuangan terkemuka maupun yang masih dalam bentuk *working paper* dalam 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa fokus utama dari riset-riset MBAR dan pengembangan model-model empiris *value relevance* adalah searah dengan usulan Lev (1989). Arah, fokus, dan ekstensi riset-riset empiris *value relevance* dapat digolongkan dalam tujuh kelompok atau area berikut.

Kelompok *pertama* adalah riset-riset yang mengembangkan model-model empiris untuk mengukur dan memperbaiki misspesifikasi metodologi pengukuran dan basis teoritis untuk relasi harga/*return* saham dengan angka-angka akuntansi (Olhson 1995, 2001; Feltham-Olhson 1995, 1996). Ada tiga model yang dikembangkan meliputi *balance sheet model*, *earnings model*, dan *Olhson model*. Namun, model yang banyak digunakan dalam riset empiris adalah model *Olhson 1995* [Easton (1999) Holthausen dan Watts (2001), Barth et al. (2001), Ota (2001), Beaver (2002)].

Kelompok *kedua* adalah riset-riset yang menguji relasi harga/*return* saham dengan angka-angka

akuntansi untuk mengkonfirmasi apakah item-item laporan keuangan masih memiliki relevansi nilai yang substansial untuk pasar saham atau telah menurun atau memburuk kualitasnya dari waktu ke waktu [Easton et al. (1993), Amir dan Lev (1996), Collins et al. (1997), Harris dan Muller (1998), Ely dan Waymire (1999), Francis dan Schipper (1999), Lev dan Zarowin (1999), Brief et al. (2000), Brown et al. (1999), Charitou dan Clubb (2000), Chen et al. (2001), Jorin dan Talmor (2001), Arce dan Mora (2002), Sami dan Zhou (2002), Ryan dan Zarowin (2003), Chen dan Zhang (2003), dan Yaekura (2003)]. Di Indonesia, sejumlah periset [Warsidi (2002), Arsyah (2003), Pinasti (2004), Lako (2007), Lako dan Hartono (2005)] juga telah menguji isu tersebut. Secara umum, riset-riset tersebut melaporkan bukti-bukti empiris yang belum konklusif.

Kelompok *ketiga* adalah riset-riset yang menguji validitas empiris dari hasil-hasil riset *value relevance* yang berkembang dengan mengajukan perbaikan model-model pengukuran empiris [Kothari dan Zimmerman (1995), Brown et al. (1999), Ota (2001), Landsman dan Maydew (2002), Ryan dan Zarowin (2003), Easton dan Sommers (2003)]. Secara umum, dilaporkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi, khususnya laba, tidak menurun seperti dilaporkan oleh sejumlah riset sebelumnya. Perbedaan penggunaan model (*price model* versus *return model*) dan masalah-masalah ekonometrik dalam penggunaan model-model pengukuran diduga menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan hasil-hasil yang dilaporkan (Brown et al. 1999, Easton 1999, Ota 2001, Kothari dan Zimmerman 1995, Holthausen dan Watts 2001, Barth et al. 2001, Beaver 2002).

Kelompok *keempat* adalah riset-riset yang menguji klaim Lev (1989) bahwa rendahnya kualitas laba disebabkan adanya *investor irrationality* atau pasar modal yang tidak efisien [Bhushan (1994), Ball dan Bartov (1996), Soffer dan Lys (1999), Bartov et al. (2000), Hoitash et al. (2002), Aboody et al. (2002), Mendenhall (2002), dan Kothari et al. (2004)]. Secara umum, sejumlah riset tersebut melaporkan bahwa menurunnya respon pasar terhadap pengumuman laba atau memburuknya kualitas laba dari waktu ke waktu,

³ Tiga jurnal terkemuka tersebut adalah *The Accounting Review*, *Journal of Accounting Research*, dan *Journal of Accounting & Economics*. Jumlah artikel empiris yang dievaluasi Lev berjumlah 19 artikel.

dan terjadinya fenomena *post-earnings announcement drifts* (PEAD) seperti yang dilaporkan oleh sejumlah studi disebabkan oleh perilaku investor yang tidak rasional (*noise trading*) atau *inefficient market*. Setelah mengontrol perilaku spekulatif investor, friksi pasar, dan *confounding effects* lainnya, sejumlah riset tersebut melaporkan bahwa relevansi laba tidak menurun dan bahkan cenderung meningkat secara agregat.

Kelompok *kelima* adalah riset-riset yang menginvestigasi proses diseminasi informasi finansial dalam pasar modal untuk memahami penggunaan aktual angka-angka akuntansi yang dilaporkan [Botosan (1997), Healy et al. (1999), Bushee dan Noe (2000), Lundholm dan Myers (2002), dan Miller (2002)]. Secara umum, sejumlah riset tersebut menyimpulkan bahwa level dan luas pengungkapan, serta *timeliness* aktivitas pengungkapan memiliki dampak yang signifikan terhadap relasi laba dan angka-angka akuntansi lainnya dengan harga/*return* saham.

Kelompok *keenam* adalah riset-riset yang mengklaim bahwa rendahnya relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham seperti dilaporkan sejumlah periset disebabkan karena riset-riset tersebut tidak mempertimbangkan item-item aset tidak berwujud (*intangible assets*). Kelompok periset ini antara lain Lev dan Sougiannis (1996), Amir dan Lev (1996), Barth et al. (1998), Ittner dan Larcker (1998), Aboody dan Lev (1998), Lev dan Zarrowin (1999), dan Gu dan Lev (2001). Mereka menilai bahwa *intangible assets* memainkan peran yang semakin bertambah penting dalam ekonomi, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan teknologi maju.

Kelompok *ketujuh* adalah riset-riset yang mengevaluasi apakah hasil-riset *value relevance* telah memberi kontribusi yang signifikan kepada *standard setters* dalam proses penetapan standar-standar akuntansi keuangan (Ely dan Waymire 1999, Holthausen dan Watts 2001, dan Barth et al. 2001). Secara umum, hasil evaluasi Holthausen dan Watts (2001) dan Barth et al. (2001) memberi kesimpulan yang bertentangan. Ely dan Waymire (1999) dan Holthausen

dan Watts (2001) menyimpulkan bahwa hasil-hasil riset *value relevance* hanya memberikan sedikit kontribusi untuk *standard setters*. Sebaliknya, Barth et al. (2001) menyimpulkan bahwa hasil-hasil riset *value relevance* memberikan *fruitful insights* untuk *standard setters* dalam proses penetapan standar-standar akuntansi keuangan. Perbedaan perspektif dalam mendefinisikan *value relevance* secara operasional dan penggunaan metoda valuasi tampaknya menjadi titik pangkal penyebab munculnya perbedaan konklusi tersebut.

Secara umum, hasil-hasil riset *value relevance* dengan *settings* sampel perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di pasar modal AS memberi bukti-bukti yang masih belum konklusif. Demikian pula riset-riset *value relevance* yang menggunakan *settings* laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik dari sejumlah negara anggota International Accounting Standards (IAS), termasuk Indonesia, juga melaporkan bukti-bukti yang belum konklusif. Karena itu, evaluasi secara kritis terhadap penyebab terjadinya kesimpulan yang belum konklusif tersebut menjadi sangat penting.

TELAAH TEORITIS STUDI VALUE RELEVANCE INFORMASIAKUNTANSI

Dalam literatur akuntansi keuangan, suatu angka akuntansi didefinisikan sebagai *value relevance* jika angka tersebut berasosiasi secara signifikan dengan nilai-nilai pasar ekuitas [Ohlson (1995, 2001), Barth (2000), Holthausen dan Watts (2001) dan Barth et al. (2001)]. Menurut Barth et al. (2001), suatu angka akuntansi dikatakan *value relevance*, yaitu memiliki relasi yang signifikan dengan harga-harga atau *return* saham, jika angka tersebut mencerminkan informasi relevan untuk investor dalam menilai perusahaan dan diukur dengan cukup reliabel yang tercermin dalam harga-harga atau *return* saham.⁴

Easton (1999) dan Beaver (2002) menyatakan bahwa riset *value relevance* bertujuan untuk menguji asosiasi antara variabel dependen berbasis harga sekuritas dengan sejumlah variabel akuntansi funda-

⁴ Barth et al. (2001) menyebut konsepsi ini sebagai *value relevance hypothesis* (VRH), yaitu bahwa suatu angka akuntansi didefinisikan sebagai *value relevant* jika angka tersebut memiliki suatu asosiasi yang dapat diprediksikan dengan nilai-nilai pasar sekuritas. Hipotesis ini tampaknya merujuk pada pendekatan studi asosiasi (*association study*) dengan periode jendela yang panjang dalam menguji relasi antara angka-angka akuntansi dengan harga-harga atau return sekuritas.

mental. Suatu angka akuntansi disebut “*value relevant*” jika angka tersebut secara signifikan berasosiasi dengan variabel dependen (harga/return sekuritas). Menurut Barth et al. (2001) dan Beaver (2002), riset *value relevance* berperan penting untuk memberikan bukti-bukti empiris tentang apakah angka-angka akuntansi berhubungan dengan nilai pasar sekuritas yang diprediksikan. Jika relasi antara harga/return saham dengan angka-angka akuntansi (diukur dengan koefisien regresi atau nilai R^2) lebih besar atau tidak sama dengan nol, maka angka-angka akuntansi tersebut memiliki *value relevance* untuk pasar saham. Demikian pula sebaliknya.

Secara umum, ada dua perspektif teori yang mendasari hipotesis *value relevance*. Perspektif pertama adalah *information perspective on decision usefulness*. Perspektif ini mengakui bahwa tanggung jawab individual untuk memprediksikan kinerja perusahaan di masa depan dan memfokuskan pada penyajian informasi yang berguna untuk tujuan tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa pasar saham akan bereaksi terhadap pengumuman informasi yang berguna dari sumber mana saja (termasuk dari laporan keuangan) dan juga mengakui bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang sangat kompleks dan nilai sosial serta privasinya tidak sama. Perspektif ini menerima *historical costs* sebagai basis akuntansi dan mengandalkan *full disclosure* untuk meningkatkan kegunaan informasi laporan keuangan kepada investor. Perspektif kedua adalah *measurement perspective on decision usefulness*. Perspektif ini mengakui bahwa akuntan bertanggung jawab untuk menyatukan *fair values* dalam laporan keuangan utama, menjamin bahwa penyatuan itu dilakukan dengan reliabilitas yang tinggi, dan membantu investor memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Perspektif ini mengandalkan pendekatan studi asosiasi (*association studies*) untuk mengukur relevansi nilai angka-angka akuntansi untuk pasar saham.

Berkenaan dengan karakteristik dari riset *value relevance*, Beaver (2002) menyatakan ada dua karakteristik menonjol. *Pertama*, riset *value relevance* memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang institusi-institusi dan standar-standar akuntansi, serta gambaran spesifik tentang angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Pengetahuan ini mencakup tujuan pelaporan keuangan yang dinyatakan, kriteria yang

digunakan *standard setters*, basis untuk standar-standar spesifik, dan rincian bagaimana mengkonstruksi angka-angka akuntansi dalam suatu standar tertentu. *Kedua*, *timeliness* informasi bukanlah suatu isu yang dikesampingkan. Walaupun riset *value relevance* mencakup *event study* (studi peristiwa), namun riset *value relevance* juga mencakup studi-studi yang menguji relasi antara level dari harga-harga saham dengan data akuntansi. *Level studies* (studi level) mengidentifikasi *drivers of value* yang mungkin tercermin dalam harga-harga saham selama periode waktu yang lama. Riset *value relevance* menguji nilai pasar sekuritas pada suatu titik waktu tertentu sebagai suatu fungsi linear dari variabel-variabel akuntansi.

Berdasarkan pengertian dan tujuan di atas, dapat dituliskan bahwa riset *value relevance* bertujuan untuk menginvestigasi relevansi nilai atau kegunaan dari angka-angka laporan keuangan untuk investor pasar saham dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu periode. Relevansi nilai itu pada suatu periode tertentu tersebut biasanya diukur dengan besaran nilai R^2 regresi. Besar-kecilnya nilai R^2 mencerminkan tinggi-rendahnya relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham.

Permasalahan krusial yang timbul dan menjadi perdebatan serius di kalangan para periset akuntansi selama ini adalah bahwa tinggi-rendahnya nilai R^2 yang dihasilkan tersebut sangat tergantung pada pendekatan studi dan model pengukuran yang digunakan oleh para peneliti. Jika para periset menggunakan pendekatan studi peristiwa (*event study*) dan model *return* dalam menilai relevansi nilai informasi akuntansi, maka koefisien estimasi dan R^2 regresi yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah daripada jika mereka menggunakan pendekatan studi asosiasi (*association study*) dan model harga (*price model*). Tabel 1 memperlihatkan nilai R^2 dari *price model* (model harga) lebih tinggi dibanding *return model* (model return).

Karena itu, ketepatan dalam penggunaan pendekatan studi dan model pengukuran empiris dengan mempertimbangkan basis teoritis dan asumsi-asumsi yang mendasarinya secara tepat serta memperhatikan isu-isu ekonometrik yang melekat pada penggunaan suatu model pengukuran perlu menjadi pertimbangan utama para peneliti dalam mengukur relevansi nilai informasi akuntansi.

Secara teoritis dan ekonometrik, penggunaan

event study dengan periode jendela yang pendek dan *return model* lebih tepat digunakan untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham (Lako, 2007). Pengukuran relevansi nilai informasi akuntansi yang menggunakan pendekatan *event study* dengan periode jendela yang pendek adalah sesuai dengan teori pasar efisien (EMH). Teori pasar modal efisien memprediksikan bahwa harga-harga dari sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan pada suatu pasar modal pada setiap waktu secara wajar merefleksikan semua informasi yang diketahui secara publik berkaitan dengan harga-harga sekuritas tersebut (Scott, 2003).

Secara eksplisit, teori pasar efisien memprediksikan bahwa pasar saham akan merespon secara cepat dan tepat terhadap suatu pengumuman informasi baru atau peristiwa-peristiwa spesifik tertentu, dan respon tersebut terrefleksi dalam perubahan atau pergerakan harga-harga saham selama periode pengumuman informasi atau kejadian suatu peristiwa. Jika terjadi perubahan harga-harga sekuritas, maka pengumuman informasi baru atau kejadian suatu peristiwa tersebut memiliki kandungan informasi dan berguna bagi pasar saham. Demikian pula sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan harga-harga sekuritas, maka pengumuman informasi baru atau kejadian tersebut tidak memiliki kandungan informasi dan tidak bermakna bagi pasar saham (Dyckman dan Morse 1986, Beaver 1998, Kothari 2001, Scott 2003).

BUKTI-BUKTI EMPIRIS STUDI VALUE RELEVANCE INFORMASI AKUNTANSI

Secara umum, sejumlah studi empiris yang menginvestigasi relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham, seperti dilakukan Easton et al. (1993), Amir dan Lev (1996), Collins et al. (1997), Chang (1999), Ely dan Waymire (1999), Francis dan Schipper (1999), Lev dan Zarowin (1999), Brief dan Zarowin (2002), Brown et al. (1999), Charitou dan Clubb (2000), Jorin dan Talmor (2001), Sami dan Zhou (2002), Ryan dan Zarowin (2003), Chen dan Zhang (2003), melaporkan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai. Namun demikian, bukti-bukti empiris berkenaan dengan tren dan besaran relevansi nilai informasi akuntansi cenderung saling bertentangan satu sama lain.

Riset-riset empiris di AS untuk menguji klaim yang berkembang dalam literatur akuntansi keuangan bahwa relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar saham telah menurun atau memburuk kualitasnya dari waktu ke waktu melaporkan bukti-bukti yang belum konklusif. Misalnya, studi Lev (1989), Amir dan Lev (1996), Collins et al. (1997), Francis dan Schipper (1999) dan Ely & Waymire (1999) melaporkan telah terjadi penurunan relevansi nilai laba dan kenaikan nilai buku neraca. Namun, Amir dan Lev (1996), Chang (1999) dan Brown et al (1999) memberi bukti bahwa terjadi penurunan relevansi nilai laba dan nilai buku. Lev & Zarowin (1999) melaporkan bahwa relevansi nilai laba, arus kas, dan nilai buku sedang memburuk selama 20 tahun terakhir. Sementara Ball dan Bartov (1996), Soffer dan Lys (1999), Brown et al. (1999), Landsman dan Maydew (2002), Hoitash et al. (2002), Aboody et al. (2002), dan Kothari et al. (2004) memberikan bukti empiris bahwa relevansi nilai laba tidak menurun dan memburuk kualitasnya dari waktu ke waktu.

Studi-studi *value relevance* yang menggunakan *settings* informasi laporan keuangan di sejumlah negara anggota International Accounting Standards Board (IASB) juga memberikan bukti-bukti empiris yang sama dengan bukti-bukti empiris di AS. Sejumlah studi yang membandingkan relevansi nilai informasi akuntansi berbasis USA-GAAP dengan GAAP domestik negara-negara non AS Harris et al. (1994), Charitou dan Clubb (2000), dan Yaekura (2003)] melaporkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi antar dua negara yang berbeda basis GAAP sering berbeda arah dan besarnya. Demikian pula studi-studi komparasi relevansi nilai informasi akuntansi antar negara, baik yang berbasis IAS, *code law versus common law*, *bank oriented versus equity oriented* maupun GAAP domestik juga melaporkan bukti-bukti empiris bahwa relevansi nilai dari angka-angka akuntansi untuk para investor pasar saham berbeda-beda antar negara [Ali dan Hwang (2000), Garcia-Ayuso et al. (1998), Canibano et al. (2000), Bodnar et al. (2002), Jaggi dan Li (2002), Dumontier dan Labelle (1998), Sami dan Zhou (2002), dan Lopes (2003)].

Misalnya, Muller et al. (1994) melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan dari negara-negara yang menganut *bank-oriented system* semakin menurun dibanding negara-negara yang *market/equity oriented* karena di negara-negara penganut *bank-oriented system*, bank-bank memiliki akses langsung

terhadap informasi keuangan korporat. Ali dan Hwang (2000) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi untuk negara-negara yang menganut *bank-oriented systems* dan negara-negara penganut sistem *continental* lebih rendah dari AS dan Inggris yang menganut *market-oriented*. Selain itu juga dilaporkan bahwa relevansi nilai akuntansi lebih rendah jika aturan-aturan perpajakan secara signifikan mempengaruhi pengukuran akuntansi keuangan. Hal ini disebabkan aturan-aturan perpajakan dipengaruhi oleh tujuan politik, ekonomi, dan sosial daripada kebutuhan informasi dari para investor.

Garcia-Ayuso et al. (1998) yang menguji relevansi nilai informasi akuntansi di beberapa pasar modal negara-negara Uni Eropa, Jepang dan AS melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam relevansi nilai angka-angka akuntansi untuk investor. Namun, perbedaan itu tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam tingkat konservatisme antar sistem akuntansi. Canibano et al. (2000) yang menguji *explanatory power* dari laba dan nilai buku untuk harga-harga saham dari beberapa negara Uni Eropa melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam relevansi nilai laba dan nilai buku antar negara Eropa. Mereka juga melaporkan bahwa laba dan nilai buku tidak kehilangan relevansi nilainya selama beberapa dekade terakhir.

Bodnar et al. (2002) menguji relevansi nilai dari *geographical earnings disclosures* dari perusahaan-perusahaan yang tercatat dan berdomisili di Australia, Canada, dan Inggris. Dilaporkan bahwa laba *foreign* untuk tiga negara itu dinilai secara berbeda dari laba domestik. Hasil estimasi terhadap koefisien asosiasi untuk perubahan dalam *foreign earnings* dengan *returns* adalah positif untuk tiga negara dan secara statistik lebih besar dari koefisien asosiasi untuk perubahan laba domestik di Canada dan Inggris.

Jaggi dan Li (2002) menguji relevansi nilai laba berdasarkan IAS untuk 35 negara anggota IASC. Mereka melaporkan bahwa laba berbasis IAS lebih relevan dibanding laba berbasis GAAP domestik untuk perusahaan-perusahaan Jerman, Italia dan Swiss. Namun, laba berbasis GAAP domestik secara komparatif lebih memiliki relevansi nilai untuk perusahaan-perusahaan Perancis. Evaluasi komparatif relevansi nilai laba berbasis IAS antarnegara menunjukkan bahwa relevansi nilai laba berbeda

antarnegara. Hasil ini mengindikasikan bahwa relevansi nilai laba berbasis IAS berbeda antarnegara, bahkan antardua negara berbasis *code law*.

Sementara studi Brimble (2003) menguji asosiasi antara laba akuntansi dan nilai buku dengan harga-harga saham dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan Australia selama periode 1973-2001 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relevansi nilai laba untuk pasar saham tampak merosot dari waktu ke waktu, sementara nilai buku tampak tetap stabil. Relevansi nilai buku dari perusahaan-perusahaan kecil tampak mengalami penurunan secara signifikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Secara keseluruhan, relevansi laba dan nilai buku tidak menurun selama tiga dekade terakhir.

Sejumlah hasil studi *value relevance* informasi akuntansi di Indonesia (Warsidi, 2002; Arsyah, 2003; Lako, 2006; Lako dan Hartono 2005) juga melaporkan bukti-bukti yang masih saling bertentangan. Dengan menggunakan pendekatan studi asosiasi dan *price model*, Warsidi (2002) dan Arsyah (2003) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi laporan keuangan emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari waktu ke waktu adalah cukup tinggi, yaitu masing-masing berkisar 19% - 75% dan 14% - 61% untuk periode 1990-2000 dan 1991-2000. Namun dengan mengaplikasikan studi asosiasi dan *return model* serta angka-angka akuntansi nominal dari emiten manufaktur BEJ selama 1991-2003, Lako (2006) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi adalah sangat rendah, yaitu berkisar 1% - 11%. Sementara Lako (2007) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar saham berkisar 2%-8,5% selama periode 1995-2004 dan cenderung menurun pada periode peristiwa publikasi laporan keuangan. Sementara pada tanggal publikasi, tren relevansi nilainya cenderung meningkat.

Secara keseluruhan, hasil-hasil studi yang menguji klaim bahwa *value relevance* informasi akuntansi sudah menurun atau memburuk kualitasnya dalam beberapa dekade terakhir belum konklusif. Ada sejumlah problema krusial yang diduga sebagai penyebab utamanya. Pembahasan berikut ini difokuskan pada sejumlah problema krusial tersebut.

PROBLEMA DALAM RISET VALUE RELEVANCE

Berdasarkan hasil evaluasi yang penulis lakukan, paling sedikit ada dua faktor yang diduga sebagai penyebab utama belum konklusifnya hasil-hasil studi *value relevance* selama ini. *Pertama*, adanya miskonsepsi dalam penggunaan basis teoritis studi *value relevance* [Easton (1999), Holthausen dan Watts (2001), Barth et al. (2001), Beaver (2002)]. Kebanyakan studi yang menginvestigasi relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham dari waktu ke waktu menggunakan teori valuasi dari model Ohlson (1995) dan argumen-argumen akuntansi kontekstual (*contextual accounting arguments*) sebagai basis valuasi⁵. Sementara sisanya menggunakan basis teori pasar efisien atau teori *efficient market hypothesis* (EMH) dan asumsi-asumsi yang mendasarinya yang biasanya digunakan dalam studi *information content* untuk menilai kegunaan dari suatu pengumuman informasi akuntansi untuk investor pasar saham. Namun, hasil-hasil studi *value relevance* yang mengaplikasikan kedua teori tersebut memberikan kesimpulan akhir yang bertentangan.

Hasil telaah Holthausen dan Watts (2001) menunjukkan bahwa dari 63 paper yang memfokuskan pada studi *value relevance* informasi akuntansi untuk pasar saham, hanya 7 (11%) paper menggunakan studi *marginal information content*. Sementara selebihnya menggunakan *association study* dan *measurement study*, yang mengabaikan teori EMH dan asumsi-asumsi yang mendasarinya dalam pengukuran. Perbedaan pendekatan studi yang berbeda basis teoritis tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang besaran relevansi nilai (koefisien estimasi dan R² regresi) informasi akuntansi untuk pasar saham. Holthausen dan Watts (2001) bahkan secara pedas mengkritik bahwa riset-riset *value relevance* selama ini tidak memiliki basis teoritis yang jelas karena tidak berkaitan atau tidak menghubungkan antara *value relevance* dan *value reliability* informasi akuntansi seperti disyaratkan dalam SFAC No. 2 (1980). Oleh karena itu, kontribusi dari hasil-hasil studi *value relevance* selama ini sangat kecil, bahkan tidak membawa implikasi

terhadap perbaikan/perubahan proses penetapan standar (*standard setting*) untuk meningkatkan kualitas akuntansi. *Kedua*, ada misspesifikasi dalam metodo valuasi untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham dan juga terdapat sejumlah isu ekonometrika yang tidak diperhatikan para periset [Lev (1989), Easton (1999), Brown et al (1999); Holthausen & Watts (2001); Barth et al. (2001), Ota (2001), Aboody et al. (2002), Beaver (2002), Hoitash et al. (2002), Kothari (2004)].

Hasil evaluasi Holthausen dan Watts (2001) terhadap riset-riset *value relevance* selama dekade 1990an hingga 2000an menunjukkan bahwa ada tiga pendekatan studi dan tiga basis model empiris yang banyak digunakan para periset akuntansi. Tiga pendekatan tersebut adalah: 1) *relative association study*, yaitu menguji asosiasi antara nilai pasar saham dengan ukuran-ukuran *bottom-line* akuntansi (15 artikel); 2) *incremental association study*, yaitu menguji apakah angka-angka akuntansi dapat berguna untuk menjelaskan nilai pasar saham perusahaan dalam periode jendela yang panjang dibanding faktor-faktor lain (53 artikel); dan 3) *marginal information content study*, yaitu menguji apakah suatu angka akuntansi tertentu menambah *information set* yang tersedia untuk para investor (7 artikel). Studi ini umumnya menggunakan *event study* dengan periode jendela pendek. Sementara tiga model empiris yang sering digunakan adalah model neraca, model laba dan model Ohlson (1995). Hasil telaah penulis terhadap artikel-artikel yang dievaluasi Holthausen dan Watts (2001) tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam penggunaan pendekatan studi dan model valuasi dapat menghasilkan besaran relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham yang berbeda pula.

Berdasarkan tiga pendekatan dan tiga model tersebut, pendekatan *incremental association study* dan model Ohlson (1995) adalah yang paling banyak digunakan. Kebanyakan studi *value relevance* berbasis model Ohlson (1995) menggunakan *price model* dan *return model* untuk menginvestigasi relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham. Sejumlah studi melaporkan bahwa, meskipun dua model valuasi

⁵ Teori valuasi dari model Ohlson (1995) memprediksikan bahwa harga/return saham merupakan suatu fungsi linear dari nilai buku ekuitas dan laba abnormal masa sekarang yang diekspektasikan serta informasi-informasi lainnya.

tersebut memiliki basis teoritis yang sama, namun koefisien respon dan nilai R² regresi yang dihasilkan dari kedua model tersebut berbeda secara signifikan dimana *price model* cenderung lebih tinggi daripada *return model* (Easton 1999, Holthausen dan Watts 2001, Ota 2001, dan Beaver 2002). Hasil-hasil studi yang melaporkan perbedaan relevansi nilai (R²) dari dua model tersebut disajikan dalam Tabel 1.

mempertimbangkan problema-problema ekonometrik dibandingkan *price model*. Hasil pengujian Dontoh et al. (2001) bahkan secara tegas menyatakan bahwa *price model* berbasis harga-harga saham bukanlah suatu ukuran (*benchmark*) yang tepat untuk mengukur kandungan informasi laba akuntansi karena harga-harga saham memiliki banyak gangguan (*noisy*).

Berkenaan dengan isu rendahnya relevansi nilai

Tabel 1
Perbandingan Relevansi Nilai (R²) antara Price Model dan Return Model dalam Studi Value Relevance Informasi Akuntansi Untuk Pasar Saham

Periset & Tahun	Sampel		R ²	
	Periode & Obs.	Deskripsi	Price Model	Return Model
Harris et al. (1994)	1982-1991 & 1.200 Obs	Korporat Jerman	0,14	0,07
		Korporat USA	0,34	0,07
Nwaeze (1998)	1970-1990 & 2.400 obs	Utilities	0,78	0,33
		Manufaktur	0,51	0,15
Ely dan Waymire (1999)	1927-1993 & 6.700 obs	Korporat USA	0,44	0,18
Francis dan Chipper (1999)	1952-1994 & 78.000 obs.	Korporat USA	0,62	0,22
Lev dan Zarowin (1999)	1977- 1996 & 100.000 obs.	Korporat USA	0,76	0,07
Ota (2001)	1979-1999 & 27.000 Obs	Korporat Jepang	0,46	0,06

Sumber: Ota (2001)

Sejumlah periset, seperti Landsman dan Mogdiliani (1988), Kothari dan Zimmerman (1995), Easton (1999), Ota (2001), Kothari (2001), dan Beaver (2002) telah melakukan analisis teoritis untuk menilai model mana yang secara ekonometrik lebih unggul untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham. Namun kesimpulan yang dilaporkan juga masih belum konklusif.

Kothari dan Zimmerman (1995) dan Ota (2001) menyarankan bahwa penggunaan terhadap kedua model tersebut secara bersama-sama lebih cocok untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi. Namun, Easton (1999), Barth et al. (2001), Kothari (2001) dan Beaver (2002) menyarankan agar para periset lebih tepat menggunakan *return model* karena model tersebut

informasi akuntansi untuk pasar saham seperti diklaim dalam sejumlah literatur akuntansi dalam satu dekade terakhir, hasil telaah penulis menunjukkan paling sedikit ada dua faktor yang diduga sebagai penyebab utamanya. *Pertama*, kebanyakan riset *value relevance* selama ini tidak mempertimbangkan item *intangible assets* dalam pengujian relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham. Hasil studi Lev dan Sougiannis (1996), Amir dan Lev (1996), Barth et al. (1998), Aboody dan Lev (1998), Lev dan Zarowin (1999), Gu dan Lev (2001) dan Lako (2007) melaporkan bahwa *intangible assets* lebih *value relevant* dibandingkan item-item fundamental laporan keuangan lainnya dan memberi kontribusi yang signifikan meningkatkan relevansi informasi akuntansi secara

gabungan untuk penilaian ekuitas perusahaan. Lev dan Sougiannis (1996), Amir dan Lev (1996), Barth et al. (1998), Ittner dan Larcker (1998), Aboody dan Lev (1998), Lev dan Zarrowin (1999), Gu dan Lev (2001), Maines et al. (2003)] menilai bahwa peran *intangible assets* semakin bertambah penting dalam ekonomi, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan teknologi.

Kedua, telah terjadi perubahan yang drastis dalam lingkungan ekonomi dan bisnis serta munculnya sumber-sumber informasi bersaing (*competing information*) sehingga pelaporan informasi akuntansi tidak lagi menjadi sumber utama informasi bagi para investor pasar saham (Collins et al. 1997, Sinha dan Watts 2001, Healy dan Palepu 2001, Francis et al. 2003). Healy dan Palepu (2001) mengidentifikasi ada empat kekuatan ekonomi makro yang dapat mereduksi peran pengungkapan pelaporan keuangan untuk investor pasar saham, yaitu inovasi teknologikal yang cepat, *network organizations*, perubahan iklim ekonomi dan bisnis dari perusahaan-perusahaan audit dan analisis keuangan dan globalisasi.

Sementara penyebab terjadinya perbedaan relevansi nilai informasi akuntansi antarnegara kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam orientasi sistem pasar modal, kualitas pasar modal, rejim pelaporan keuangan, tipe entitas bisnis, level penegakan regulasi, sistem dan kondisi ekonomi dan politik, dan kerangka konseptual standar akuntansi antarnegara. Hasil studi Muller et al. (1994), Ali dan Kwang (2000), Bodnar et al. (2002), Jaggi dan Li (2002), dan Sami dan Zhou (2002) memperkuat dugaan tersebut.

SIMPULAN DAN PELUANG RISET

Tulisan ini bertujuan memaparkan perkembangan, basis teoritis, problema, dan peluang riset dalam literatur *value relevance* informasi akuntansi untuk pasar saham. Dalam dua dekade terakhir, topik ini menjadi salah satu agenda kajian yang mendapat perhatian besar dalam riset-riset akuntansi berbasis pasar modal (*market-based research in accounting-MBAR*). Topik ini mendapat perhatian serius dari para periset akuntansi karena berkembangnya klaim pada awal tahun 1990an bahwa relevansi nilai atau kegunaan dari informasi laporan keuangan untuk pasar saham telah menurun atau memburuk kualitasnya dari waktu ke waktu selama

beberapa dekade terakhir.

Hasil telaah menunjukkan bahwa pasca Lev (1989) melaporkan bahwa kegunaan informasi laporan keuangan (khususnya laba) untuk pasar saham sangat kecil, muncul berbagai upaya riset untuk menginvestigasi klaim tersebut. Secara umum, ada tujuh area riset *value relevance* yang berkembang, yaitu:

- 1) Riset yang mengembangkan model-model valuasi untuk mengukur dan memperbaiki misspesifikasi metodologi pengukuran dan basis teoritis untuk relasi harga/*return* saham dengan angka-angka akuntansi;
- 2) Riset yang menguji relasi harga/*return* saham dengan angka-angka akuntansi untuk mengkonfirmasi apakah informasi akuntansi masih memiliki relevansi nilai yang substansial untuk pasar saham ataukah telah menurun kualitasnya;
- 3) Riset yang menguji validitas empiris dari hasil-hasil riset *value relevance* yang berkembang dengan mengajukan perbaikan model-model valuasi empiris;
- 4) Riset yang menguji klaim Lev (1989) bahwa rendahnya kualitas laba disebabkan adanya *investor irrationality* atau pasar modal yang tidak efisien;
- 5) Riset yang menginvestigasi proses disseminasi informasi finansial di pasar modal untuk memahami penggunaan aktual data akuntansi yang dilaporkan;
- 6) Riset yang menguji klaim bahwa rendahnya relevansi nilai informasi akuntansi karena riset-riset tersebut tidak mempertimbangkan *intangible assets*; dan
- 7) Riset yang mengevaluasi apakah hasil-hasil studi *value relevance* selama ini memberi kontribusi yang signifikan kepada *standard setters* dalam proses penetapan standar akuntansi keuangan.

Secara keseluruhan, hasil-hasil studi *value relevance* tersebut melaporkan bukti-bukti yang belum konklusif. Paling sedikit, ada dua penyebab utama belum konklusifnya hasil-hasil studi *value relevance*. *Pertama*, adanya miskonsepsi penggunaan basis teoritis dalam riset-riset *value relevance*. Kebanyakan studi *value relevance* menggunakan teori valuasi dari model Ohlson (1995) sebagai basis valuasi, sementara sisanya menggunakan teori pasar efisien (*efficient market hypothesis*). Hasil-hasil studi yang mengaplikasikan dua teori tersebut melaporkan kesimpulan yang berbeda tentang *trend* relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham.

Kedua, ada misspesifikasi dalam pemakaian metoda pengukuran dan terdapat sejumlah isu ekonometrik yang tidak diperhatikan periset. Hasil evaluasi Holthausen dan Watts (2001) terhadap riset-riset *value relevance* selama dekade 1990an-2000an menunjukkan bahwa ada tiga pendekatan studi dan tiga model valuasi yang banyak digunakan. Tiga pendekatan tersebut adalah *relative association study*, *incremental association study* dan *marginal information content study*. Sementara tiga model valuasi yang digunakan adalah model neraca, model laba dan model Ohlson (1995). Hasil telaah menunjukkan bahwa perbedaan dalam penggunaan pendekatan studi dan model valuasi dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Selain dua masalah krusial tersebut, studi-studi *value relevance* selama ini juga mengabaikan dua faktor penting berikut: 1) tidak mempertimbangkan *intangible assets* dalam desain riset, dan 2) tidak mempertimbangkan faktor-faktor perubahan dalam lingkungan ekonomi dan bisnis, serta sumber-sumber informasi bersaing lainnya selain pelaporan informasi akuntansi. Perbedaan dalam orientasi sistem pasar modal, kualitas pasar modal, rejim pelaporan keuangan, tipe entitas bisnis, level penegakan regulasi, sistem dan kondisi ekonomi dan politik, dan kerangka konseptual standar akuntansi antarnegara juga diduga menjadi penyebab belum konklusifnya simpulan hasil-hasil studi *value relevance* di sejumlah negara anggota IASB. Oleh karena itu, studi-studi *value relevance* di masa depan perlu menggunakan basis teoritis dan spesifikasi model valuasi (desain riset) yang tepat. Selain mempertimbangkan angka-angka akuntansi fundamental (*bottom-line*) yang berasal dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas sebagai variabel independen, studi-studi selanjutnya juga perlu mempertimbangkan *intangible assets*, risiko sistematis korporat, *corporate governance*, kualitas perusahaan, perubahan lingkungan bisnis, *setting* pasar modal, dan rezim pelaporan keuangan di Indonesia sebagai variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut, secara teoritis maupun intuitif, diduga memiliki pengaruh yang signifikan atau berasosiasi dengan nilai pasar sekuritas pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel tersebut dapat diperlakukan sebagai variabel kontrol, pemoderasi, atau *intervening*.

Dengan mempertimbangkan secara cermat terhadap faktor-faktor tersebut maka hasil-hasil studi *value relevance* di masa datang diharapkan akan menghasilkan bukti-bukti empiris yang lebih valid dan reliabel. Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi atau implikasi kebijakan yang berarti untuk badan-badan penetap standar (*standard setters*) akuntansi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan otoritas pembuat regulasi pasar modal (*regulatory bodies*) seperti Bapepam dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk membuat standar-standar dan regulasi-regulasi baru yang dapat meningkatkan kualitas dan relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboody, D., J. Hughes dan J. Liu. 2002. Measuring Value Relevance in a (Possibly) Inefficient Market. *Journal of Accounting Research*. Vol 40. No 4. 965-986
- Ali, A., dan L.S. Kwang. 2000. Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting Data. *Journal of Accounting Research*. Vol. 38. No.1. 1-21
- Amir, E. dan B. Lev. 1996. Value Relevance of Nonfinancial Information. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 22. 3-30
- Arce, M., dan A. Mora. 2002. Empirical Evidence of the Effect of European Accounting Differences on the Stock Market Valuation of Earnings and Book Value. *The European Accounting Review*. Vol. 11. No.3.573-599
- Arsjah, R.J. 2003. Hubungan Penilaian, Pendapatan dan Nilai Buku Ekuitas (Bukti Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang bertahan di BEJ lebih dari Sepuluh Tahun). *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya 16-17 Oktober. 637-646
- Ball, R. dan P. Brown. 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research*. Vol. 6. 159-178

- _____, dan E. Bartov. 1996. How Naive Investor is the Stock Market's Use of Earnings Information. *Journal of Accounting and Economics*. Vol.21. 319-337
- Barth, M.E., W.H. Beaver dan W.R. Landsman. 2001. The Relevance of Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another Review. *Journal of Accounting and Economics*. Vol.31. 77-104
- Bartov, E., S. Radhakrishnan dan I. Krisnsky. 2000. Investor Sophistication and Patterns in the Stock Returns after Earnings Announcements. *The Accounting Review*. Vol.75. 43-63
- _____, S.R. Goldberg dan M. Kim. 2002. *Comparative Value Relevance among German, U.S., and International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective*. Working Paper.
- Beaver, W.H. 1968. The Information Content of Annual Earning Announcements. *Journal of Accounting Research*. Vol. 6. No.2. Hlm 67-1000
- _____, 1998. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*. Third Edition. Prentice Hall International, Inc.
- _____. 2002. Perspectives on Recent Capital Market Research. *The Accounting Review*. Vol. 77 (April), No 2. 453-474
- Bernard, V.L. 1989. Capital Market Research in Accounting during the 1980's: A Critical review. Dalam Frecka, T.J. (Ed.). *The State of Accounting Research as We Enter the 1990s*. University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana.
- Bhushan, R., 1994. An Informational Efficiency Perspective on the Post-Earnings Announcement Drift. *Journal of Financial Economics*. Vol. 18. 45-65
- Bodnar, G.M., L.S. Hwang dan N.J. Weintrop. 2002. The Value Relevance of Foreign Income: An Australian, Canadian, and British Comparison. *Working Paper*. 1-26
- Botosan, C. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *The Accounting Review*. Vol. 72. 323-350
- Brief, R.P., dan P. Zarowin. 2002. *The Valuer relevance of Dividend, Book Value and Earnings*. Working Paper.
- Brown, S., K. Lo dan T. Lys. 1999. Use of R² in Accounting Research: Measuring Changes in Value Relevance over the Last Four Decades. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 28. 83-115
- Bushee, B. dan C. Noe. 2000. Disclosure Equity, Institutional Investors, and Stock Return Volatility. *Journal of Accounting Research*. Vol.38 (Supplement). 171-202
- Canibano, L., M. Gracia-Ayuso dan J.A. Rueda. 2000. Is Accounting Information Loosing Relevance? Some Answers from European Countries. *Working Paper*. 1-21
- Chang, J. 1999. *The Decline in Value Relevance of Earnings and Book Values*. Working Paper. Harvard University
- Charitou, A., C. Clubb dan A. Andreou. 2000. The Value Relevance of Earnings and Cash Flows: Empirical Evidence for Japan. *Journal of International Financial Management and Accounting*. Vol. 11. No. 1. 1-20
- Cheng, C.S.A. dan S.S.M. Yang. 2003. The Incremental Information Content of Earnings and Cash Flows from Operations Affected by their Extremity. *Journal of Business Finance & Auditing*. Vol.30 (1) & (2). January/March. 73-116
- Christensen, A.C. dan J.S. Demski. 2003. *Accounting Theory: An Information Content Perspective*. McGraw-Hill. New York
- Christie, A.A. 1987. On Cross-Sectional Analysis in Accounting Research. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 9. 231-258

- Collins, D., E. Maydew dan L. Weis. 1997. Changes in the Value Relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Years. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 24. 39 –67
- Dyckman, T.R dan D. Morse. 1986. *Efficient Capital Markets and Accounting: A Critical Analysis*. Prentice- Hall. Inc. New Jersey
- Dontoh, A., S. Radhakrishnan dan J. Ronen. 2001. *Is Stock Prices a Good Measure for Accessing Value Relevance of Earnings? An Empirical Test*. Working Paper.
- Easton, P.D. 1999. Security Returns and the Value Relevance of Accounting Data (Commentary). *Accounting Horizons*. Vol.13. No.4. 399-412.
- _____, dan G.A. Sommers. 2003. Scale and the Scale Effect in the Market-based Accounting Research. *Journal of Business Finance & Accounting*. Vol. 31 (1) & 2. January/March. 25-55
- Eli, K. dan G. Waymire. 1999. Accounting Standard-Setting Organizations and Earnings Relevance: Longitudinal Evidence from NYSE Common Stocks, 1927–1993. *Journal of Accounting Research*. Vol 37. No.1. 293 —317
- Feltham, G, dan J.A. Ohlson. 1995. Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. *Contemporary Accounting Research*. Vol 11. No 2. 689-731
- _____. 1996. Uncertainty Resolution and the Theory of Depreciation Measurement. *Journal of Accounting Research*. Vol 34. 209-234
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1978. *Statement of Financial Accounting Concepts No.1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Financial Accounting Standards Board.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Financial Accounting Standards Board
- Francis, J. dan K. Schipper. 1999. Have Financial Statements Lost Their Relevance?. *Journal of Accounting Research*. Vol 37. No.1. 319 – 352.
- Gracia-Ayuso, M., J. Monterry dan C. Pineda. 1998. A Comparative Analysis of the Value Relevance of Accounting Information in the Capital Markets of the European Union. *Working Paper*.
- Harris, T.S., M. Lang, dan H.P. Moller. 1994. The Value relevance of German Accounting Measures: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*. Vol. 32. No. 2. 187-223
- Healy, P. dan K.G. Pelepu. 2001. A Review of the Voluntary Disclosure Literature. *Journal of Accounting & Economics*. Vol 31. 105-231
- _____, P., A. Hutton dan K.G. Palepu. 1999. Stock Performance and Intermediation Changes surrounding Sustained Increases in Disclosure. *Contemporary Accounting Research*. Vol 16. 485-520
- Hoitash, R., M. Krishnan dan S. Sankaraguruswamy. 2002. *Earnings Quality and Price Quality*. Working Paper.
- Holthausen, R.W. dan R.L. Watts. 2001. The Relevance of Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 31. 3 –75
- Jaggi, B. dan C. Li. 2002. *Value Relevance of Earnings Based on International Accounting Standards*. Working Paper.
- Jorion, P. dan E. Talmor. 2001. *Value Relevance of Financial and Non Financial Information in Emerging Countries: The Changing Roles of Web Traffic Data*. Working Paper.
- Kothari, S.P. 2001. Capital Market Research in Accounting. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 31. 105-231

- _____, dan J.D. Zimmerman. 1995. Price and Returns Model. *Journal of Accounting and Economics*. Vol.20. 155-192
- _____, J. Lewellen dan J.B. Warner. 2004. *Stock Returns, Aggregate Earnings Surprises, and Behavioral Finance*. Working Paper.
- Landsman, W.R. dan E.L. Maydew. 2002. Has the Information Content of Quarterly Earnings Announcements Declined in the Past Three Decades?. *Journal of Accounting Research*. Vol. 40. No. 3 (June). 797 - 808
- Lako, A. 2006. *Relevansi Informasi Akuntansi Untuk Pasar Saham Indonesia: Teori dan Bukti Empiris*. Amara Books. Yogyakarta
- _____. 2007. Relevansi Nilai Informasi laporan Keuangan Untuk Pasar Saham: Pengujian Berbasis Teori Valuasi dan Pasar Efisien. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- _____. dan J. Hartono. 2005. *Relevansi Nilai Informasi Laporan Keuangan untuk Pasar Saham: Pengujian Berbasis Return Model*. Working Paper.
- Lev, B. 1989. On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions for Two Decades of Empirical Research. *Journal of Accounting Research*. Vol. 27. (Supplement). 153-192
- _____. dan J.A. Ohlson. 1982. Market Based Empirical Research in Accounting: A Review, Interpretation and Extensions. *Supplement to Journal Accounting Research*. Vol. 27. 249-322
- _____. dan P. Zarowin. 1999. The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them. *Journal of Accounting Research*. Vol 37. No.1. 353-385
- Lopes, A.B. 2003. *The Value Relevance of Brazilian Accounting Numbers: An Empirical Investigation*. Working Paper
- Maines, L.A, E. Bartov, P. M. Fairfield, D.E. Hirst, T.A. Iannaconi, R. Mallett, C.M. Schrand, D. J. Skinner dan L. Vincent. 2003. Implications of Accounting Research for the FASB's Initiatives on Disclosure of Information about Intangible Assets. *Accounting Horizons*. Vol. 17. No. 2. (June). 175-185
- Mueller, G.G., H. Gernon dan G. Meek. 1994. *Accounting: An International Perspective*. Business One Irwin. New York.
- Nwaeze, E. 1998. Regulation and the Value Relevance of Book Value and Earnings: Evidence from United States. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 15. (Spring). 547-573
- Ohlson, J. 1995. Earnings, Book Value, and dividend in Security Valuation. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 11. (Spring). 661-687
- _____. 2001. Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation: An Empirical Perspective. *Contemporary Accounting Research*. Vol.18. No.1. (Spring). 107-120
- Ota, K. 2001. *The Impact of Valuation Models on Value-Relevance Studies in Accounting: A Review of Theory and Evidence*. Working Paper. The Australian National University.
- Pinasti, M. 2004. Faktor-faktor Yang Menjelaskan Variasi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi: Pengujian Hipotesis Informasi Alternatif. *Tesis S2*. Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rees, W.P. 1999. *Influence of the Value Relevance of Equity and Net Income in the UK*. Working Paper .

- Ryan, S.G. dan P.A. Zarowin. 2003. Why Has the Contemporaneous Linear return-earnings Relation Declined? *The Accounting Review*. Vol. 78. No. 2. 523-553
- Sami, H. dan H. Zhou. 2002. A Comparison of Value Relevance of Accounting Information in Different Segments of the Chinese Stock Market. *Working Paper*.
- Saudagaran, S.M. 2001. *International Accounting: A User Perspective*. South-Western College Publishing.
- Scott, W.R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Third Edition. Prentice-Hall International, Inc.
- Soffer, L. dan T. Lys. 1999. Post-earnings Announcement Drift and the Dissemination of Predictable Information. *Contemporary Accounting Research*. Vol 16. 305-331
- Warsidi. 2002. Relevansi Nilai Informasi Akuntansi di Indonesia. *Tesis S2*. Program Pascasarjana Akuntansi UGM.
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall. Englewood. New Jersey.

VALIDASI ITEM-ITEM KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL: APLIKASI STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) DENGAN CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA)

*Heru Kurnianto Tjahjono*¹

ABSTRACT

This paper describes the construction and empirical evaluation of distributive and procedural justice items in performance appraisal phenomena. Items for this measure were generated by following international journal in justice literature topics. The measure was then validated in 2 separate studies in university setting. Study one used high social capital sample and study two used low social capital sample. Grouping of two studies is done by using mean split sample to divide high and low in social capital people sample. The results supported those items measure distributive justice and procedural justice constructs.

Keywords: *distributive, procedural justice, structural equation modeling, dan confirmatory factor analysis.*

PENDAHULUAN

Keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan dua tipe keadilan yang muncul pada awal perkembangan teori keadilan organisasional (Lind & Tyler, 1988). Pada awal perkembangan teori dan

penelitian keadilan organisasional, lebih fokus pada keadilan distributif. Perhatian utama penelitian tersebut pada *inequity theory* (Adams, 1965 dalam Schminke *et al.*, 1997).

Pada era tahun 1980-an, penelitian keadilan organisasional mulai menekankan pada kajian keadilan prosedural yang berkaitan dengan reaksi terhadap prosedur untuk menemukan model penilaian keadilan (Lind & Tyler, 1988). Perkembangan kajian keadilan prosedural diawali temuan Thibaut dan Walker (1978) yang menjelaskan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi *outcomes*, namun individu juga mengevaluasi keadilan prosedural untuk menentukan alokasi tersebut. Seseorang ketika mendapatkan distribusi *outcomes* yang tidak menyenangkan, mereka akan mengevaluasi secara lebih positif ketika mereka yakin prosesnya berjalan adil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa input terhadap proses keputusan akan meningkatkan persepsi individu terhadap keadilan prosedural.

Selanjutnya kedua tipe keadilan tersebut sering dibahas dalam berbagai penelitian keadilan organisasional. Kedua tipe keadilan tersebut merupakan konstruk yang berbeda, namun keduanya memiliki keeratan yang tinggi dan hubungan keduanya bersifat kompleks (Folger, 1987 dalam Schminke *et al.*, 1997).

¹ Heru Kurnianto Tjahjono, SE., MM., adalah Dosen Tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sedang menempuh Program Doktor Psikologi pada Program Pascasarjana UGM.

Dalam studi ini, kajian ditujukan untuk mengkonstruksi dan memvalidasi kedua konstruk keadilan tersebut, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural di dalam fenomena penilaian kinerja organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan dimensi-dimensi keadilan yang sudah ada melalui kajian literatur dan selanjutnya diidentifikasi dan diadaptasi ke dalam fenomena penilaian kinerja. Di dalam *journal of organizational behavior*, pendekatan ini juga direkomendasikan dalam memvalidasi skala (Arnold et al., 2000).

TINJAUAN PUSTAKA UNTUK MEMAHAMI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL

Keadilan Distributif

Pembahasan mengenai keadilan distributif berfokus pada keadilan keputusan *outcomes* (Adams, 1965; Deutsch, 1975; Homann, 1961; Leventhal, 1976 dalam Colquitt, 2001) dan telah menjadi pertimbangan fundamental dalam teori keadilan selama 40 tahun terakhir (Colquitt et al. 2001). Pendekatan *equity* bersama teori deprivasi relatif (Crosby, 1976, 1982 dalam Primeaux et al., 2003) dan teori kognisi referen (Folger, 1986 dalam Primeaux et al., 2003) menghasilkan tiga kriteria atau prinsip penting dalam menilai *outcomes*. Pertama adalah prinsip proporsi (*equity*) yang diajukan Adams (dalam oleh Carrel dan Dittrich, 1978), keadilan distributif dapat dicapai ketika *inputs* dan *outcomes* sebanding dengan yang diperoleh rekan kerja. Jika perbandingan atau proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka karyawan menilai hal tersebut tidak adil. Namun, bila proporsi yang diterima karyawan tersebut lebih besar, ada kemungkinan hal tersebut dapat ditoleransi. Menurut Pfeffer (1982) referensi perbandingan dari proporsi tersebut adalah pihak lain atau orang lain yang dipersepsikan oleh karyawan yang bersangkutan, memiliki posisi yang dapat dibandingkan (*similar*).

Di samping prinsip proporsi di atas, terdapat beberapa prinsip lainnya seperti prinsip pemerataan (*equality*) dan prinsip yang mengutamakan kebutuhan (*needs*). Prinsip pemerataan menekankan pada menilai alokasi *outcomes* kepada semua karyawan atau pihak yang terlibat. Bila prinsip ini digunakan, maka variasi penerimaan antarkaryawan dengan lainnya relatif kecil.

Prinsip ketiga adalah prinsip mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Intepretasinya, bahwa seorang karyawan akan memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks hubungan kerja. Semakin banyak kebutuhannya maka upah yang diterimanya secara umum akan semakin besar. Penelitian mengenai keadilan distributif menunjukkan bahwa persepsi individual mengenai keadilan terhadap distribusi yang diperolehnya mempengaruhi sikap dan perilaku mereka (Schminke et al., 1997).

Dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip di dalamnya tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh, prinsip proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan didorong oleh semangat pro-sosial. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh, prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati. Pertimbangan-pertimbangan tersebut setidaknya mencakup konteks dan faktor-faktor individual dalam diri individu yang menilai keadilan distributif tersebut, serta tujuan organisasi.

Keadilan Prosedural

Pada saat perkembangan dinamis teori keadilan distributif, muncul pemikiran tentang penilaian keadilan prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat terpisahkan dari penilaian keadilan distributif (Thibaut & Walker, 1975; dalam oleh Colquitt, 2001). Konsep keadilan prosedural menjelaskan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau

distribusi *outcomes*, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh dua model, yaitu pertama melalui model kepentingan pribadi (*self interest*) yang diajukan Thibaut dan Walker (1975; dalam Colquitt, 2001) dan model kedua, model nilai kelompok (*group value model*) yang dikemukakan Lind dan Tyler (1988).

Model kepentingan pribadi berbasis pada asumsi, bahwa orang berupaya memaksimalkan keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan pihak lain dan mengevaluasi prosedur dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk menghasilkan *outcomes* yang diinginkannya. Penilaian seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh *outcomes* apa yang mereka terima sebagai akibat keputusan tertentu atau keadilan distributif, namun juga pada proses atau bagaimana keputusan tersebut dibuat (Thibaut dan Walker, 1978). Penekanan pandangan Thibaut dan Walker (1975) bahwa prosedur dikatakan adil jika dapat mengakomodasikan kepentingan individu. Permasalahannya adalah bahwa setiap individu menginginkan kepentingannya dapat diakomodasikan prosedur tersebut, padahal kepentingan-kepentingan tersebut seringkali berbeda satu dengan lainnya dan tidak jarang saling bertentangan. Kondisi demikian mengakibatkan konflik dan perselisihan (*dispute*) sehingga salah satu cara penting adalah menghadirkan pihak ketiga, jika keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Thibaut dan Walker (1975; dalam Colquitt, 2001) menjelaskan ada dua tipe kontrol, yaitu kontrol keputusan dan kontrol proses. Kontrol keputusan berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat menentukan *outcomes*. Sedangkan kontrol proses atau disebut juga *voice* berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat menentukan *outcomes* secara tidak langsung dengan memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan.

Berbeda dengan asumsi model kepentingan pribadi, model nilai kelompok menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Salah satu kritik penting yang disampaikan Lind dan Tyler (1988) terhadap model keadilan prosedural yang dikembangkan Thibaut dan Walker (1978) adalah bahwa pengembangan konsep keadilan prosedural tidak hanya berbasis pada perselisihan antarindividu sebagai titik

tolak pengembangan konsep. Model yang diajukan Lind dan Tyler (1988) dikenal dengan asumsi model nilai-nilai kelompok. Mereka memandang bahwa individu tidak bisa lepas dari kelompoknya. Secara alamiah terdapat dorongan agar individu tersebut menjadi bagian dari kelompok. Sementara itu, proses-proses sosial dan prosedur dalam interaksi sosial selalu menjadi elemen kelompok sosial dan masyarakat. Konsekuensi bagi individu tersebut adalah lebih mengutamakan kebersamaan kelompok daripada kepentingan pribadi. Pada dasarnya, kedua model di atas menjelaskan mengapa keadilan prosedural muncul (Viswesvaran & Ones, 2002) dan perspektif Lind dan Tyler (1988) cenderung melengkapi asumsi Thibaut dan Walker (1978).

Di samping kedua model di atas, Leventhal (1980 dalam Lind & Tyler, 1988; Colquitt, 2001; Colquitt *et al.*, 2001) lebih menekankan pada aspek instrumental. Ia berpendapat bahwa selain mengharapkan *outcome* yang menguntungkan, seseorang juga memperhatikan keberlanjutan hubungan sosialnya. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga harus memenuhi keduanya, standar kontrol (*instrument*) dan non kontrol (*value-expressive*). Dalam kaitan tersebut, diidentifikasi 6 (enam) aturan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan prosedur yang adil, meliputi: (1) *consistency rule*, yaitu diterapkan kepada setiap orang secara konsisten dari waktu ke waktu; (2) *the bias suppression rule*, yaitu bebas dari kepentingan pribadi maupun pemihakan lainnya; (3) *the accuracy rule*, yaitu didasarkan pada informasi yang akurat berdasarkan fakta dan opini orang yang tepat; (4) *the correctability rule*, yaitu memungkinkan perbaikan dan modifikasi untuk mengatasi kesalahan yang lalu dan yang potensial; (5) *the representativeness rule*, yaitu mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak-pihak yang dipengaruhi oleh prosedur tersebut; (6) *the ethicality rule*, yaitu harus sesuai dengan standar etika dan moral.

Modal Sosial

Modal sosial merupakan bentuk hubungan sumberdaya yang melekat dalam diri manusia, kelompok ataupun jaringan sosial yang kemudian diinterpretasikan ke dalam dimensi struktural (*structural*), hubungan (*relational*) dan kognitif (*cognitive*). Aspek struktural meliputi keseluruhan pola hubungan

antaraktor properti sistem dan jaringan secara keseluruhan. Pada aspek tersebut, mereka yang memiliki modal sosial tinggi selalu ingin terlibat dalam sistem sosial (Granovetter, 1992 dalam Chua, 2002). Pada aspek relasional, mereka yang memiliki modal sosial tinggi akan fokus pada sikap respek, persahabatan dan kepercayaan kepada pihak lain (Putnam, 1993 dalam Chua, 2002). Interaksi individu yang bersifat historis akan membangun modal sosial mereka (Granovetter, 1992 dalam Chua, 2002) dan pada aspek kognitif, mereka yang memiliki modal sosial tinggi cenderung mengidentifikasi dirinya dengan anggota masyarakat lainnya (Chua, 2002).

Pandangan di atas mendukung pendapat Chen (2004) bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam model psikologi organisasi, karena modal sosial dapat membantu penjelasan fenomena psikologi manusia berkaitan dengan pemahaman apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka bersikap dan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan. (Putnam, 1993, dalam Cairns *et al.*, 2003). Dalam model psikologi organisasional, faktor-faktor individu mempunyai peranan dalam menjelaskan fenomena yang digambarkan model tersebut.

Berkaitan dengan pentingnya memahami karakteristik individu seperti yang digambarkan dalam konsep modal sosial, maka dalam studi validasi dengan CFA ini, modal sosial dijadikan sebagai dasar mengelompokkan sampel untuk melakukan validasi pada sampel yang berbeda. Sampel dikelompokkan ke dalam sub sampel orang-orang yang memiliki modal sosial tinggi dan sub sampel orang-orang yang memiliki modal sosial rendah.

Tabel 1 di bawah ini menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan validasi terhadap item-item keadilan distributif dan keadilan prosedural. Tabel ini juga menerangkan alat analisis yang digunakan apakah menggunakan SEM atau tidak.

Tabel 1
Pengujian Validasi Keadilan Distributif dan Prosedural

No.	Model 2 Faktor Keadilan	Penggunaan SEM atau Non-SEM
1.	Folger & Konovsky (1989)	Non-SEM
2.	Konovsky & Cropanzano (1991)	Non-SEM
3.	Mooman (1991)	SEM
4.	McKerim & Swensky (1992)	Non-SEM
5.	Folger & Philip (1993)	Non-SEM
4.	Swensky & McKerim (1993)	SEM
5.	Konovsky & Pugh (1994)	SEM
4.	Tang & Sussler & Fullwin (1994)	Non-SEM
7.	Shenichy & Folger (1997)	Non-SEM
8.	Lee & Fehr (1999)	Non-SEM
9.	Martinez <i>et al.</i> (2000)	SEM
10.	Coquit (2001)	SEM
11.	Cropanzano <i>et al.</i> (2002)	Non-SEM
12.	Ambrose & Schminke (2003)	Non-SEM

Sumber: Penelusuran literatur.

Sedangkan validasi di dalam penelitian ini memperhatikan perbedaan karakteristik kelompok populasi yaitu modal sosial tinggi dan rendah dan juga memperhatikan aspek konteks yaitu dalam *setting* penilaian kinerja pada salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis dengan *structural equation modeling* (SEM), dengan pendekatan analisis faktor konfirmatori/*confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan ketika peneliti memiliki basis pengetahuan yang mendasari struktur variabel laten. Berbasis pengetahuan tersebut, peneliti dapat merumuskan hubungan antara faktor dengan ukuran-ukuran terobservasi seperti item-item pertanyaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan dukungan di lapangan mengenai kevalidan item-item tersebut dalam mengukur variabel laten, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Populasi

Salah satu agenda strategis sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) besar di Yogyakarta adalah mendorong manajemen PTS tersebut untuk melakukan perubahan sistem penilaian kinerja yang menekankan pada produktifitas karyawan dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Perubahan sistem penilaian kinerja dilakukan PTS tersebut pada bulan September 2003. Hal tersebut menjadi isu menarik terkait dengan persepsi dan perilaku karyawan pasca perubahan sistem tersebut. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PTS tersebut.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian di PTS tersebut ini melibatkan 7 fakultas, 1 pusat pelatihan bahasa asing, 2 program pasca sarjana, 13 Biro dan lembaga setingkat Biro, dan 1 Badan Kendali Mutu. Jumlah karyawan PTS tersebut sebanyak 279 staf dan karyawan administrasi. Penelitian ini menggunakan seluruh karyawan termasuk kepala bagian dan karyawan administrasi di lingkungan PTS tersebut (populasi) sebagai subyek dalam penelitian. Selanjutnya, karyawan-karyawan dikelompokkan ke dalam dua kelompok sampel berdasarkan skor modal sosial yang tinggi dan modal sosial yang rendah. Pengelompokkan dilakukan menggunakan nilai rata-rata (*mean split*) dengan pertimbangan agar data yang dikelompokkan seimbang antarkelompok yang satu dengan lainnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Keadilan distributif menggambarkan persepsi karyawan mengenai keadilan manajemen berkaitan dengan isi penilaian kinerja. Pengukuran menggunakan 4 item pertanyaan Leventhal (1976) yang digunakan kembali dalam penelitian Colquitt (2001), dengan skala *Likert* antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Keadilan prosedural menggambarkan persepsi karyawan mengenai keadilan berdasarkan prosedur yang digunakan manajemen untuk melakukan penilaian kinerja. Pengukuran menggunakan 7 item pertanyaan yang dikembangkan Colquitt (2001), dengan skala *Likert* antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat

setuju.

Modal Sosial dalam studi ini digunakan untuk membagi sampel menjadi kelompok sampel modal sosial tinggi dan kelompok modal sosial rendah untuk memperkuat validasi item-item ke dalam beberapa sampel studi.

Pengukuran diturunkan dari tiga dimensi yang dikembangkan berdasarkan konstruk yang diajukan Nahapiet dan Ghoshal (1998). Selanjutnya peneliti merujuk pada Chua (2002) yang mengembangkan pengukuran modal sosial ke dalam unit analisis individu. Peneliti menggunakan 11 item pertanyaan, dengan 5 item skala *Likert* antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju.

Proses Penyusunan Item dan Validasi

Tahap pertama melakukan kajian literatur mengenai konstruk-konstruk keadilan distributif dan keadilan prosedural. Peneliti melakukan adaptasi item modifikasi yang dilakukan Colquitt (2001) ke dalam konteks penilaian kinerja di dalam organisasi. Tabel berikut ini menunjukkan modifikasi item yang dilakukan Colquitt (2001) atas beberapa konsepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Tabel 2
Item-item Ukuran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural

No.	Item Ukuran	Sumber Item
A. Keadilan Distributif		
1.	Does your outcome reflect the effort you have put into your work?	Leventhal (1976)
2.	Is your outcome appropriate for the work you have completed?	Leventhal (1976)
3.	Does your outcome reflect what you have contributed to the organization?	Leventhal (1976)
4.	Is your outcome justified given your performance?	Leventhal (1976)
B. Keadilan Prosedural		
1.	Have you been able to express your views and feelings during those procedures?	Thibaut & Walker (1975)
2.	Have you had influence over the outcome arrived at by those procedures?	Thibaut & Walker (1975)
3.	Have those procedures been applied consistently?	Leventhal (1980)
4.	Have those procedures free of bias?	Leventhal (1980)
5.	Have those procedures been based on accurate information?	Leventhal (1980)
6.	Have you been able to appeal the outcome arrived at by those procedures?	Leventhal (1980)
7.	Have those procedures upheld ethical and moral standards?	Leventhal (1980)

Selanjutnya, item-item tersebut dapat dibuat dalam konteks spesifik dengan mengubah bagian-bagian item (paranetical) (Colquitt, 2001). Ukuran-ukuran tersebut perlu disesuaikan untuk tetap bermakna pada beragam konteks (Greenberg, 1993). Makna *outcomes* dalam pertanyaan di atas secara spesifik adalah *outcomes* yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya (Colquitt, 2001), sebagai contoh upah, promosi, penilaian kinerja, dan lain-lain. Dalam konteks penelitian ini, *outcome* yang dimaksud adalah penilaian kinerja.

Merujuk pada penelitian Colquitt (2001), maka item-item keadilan distributif tersebut ditransformasikan ke dalam konteks penilaian kinerja dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam organisasi menggambarkan usaha yang telah saya lakukan dalam pekerjaan saya.

2. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang telah saya lakukan.
3. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam organisasi menggambarkan apa yang telah saya kontribusikan kepada organisasi.
4. Penilaian kinerja terhadap diri saya di dalam organisasi telah sesuai dengan kinerja yang saya berikan.

Merujuk pada penelitian Colquitt (2001), maka item-item keadilan prosedural tersebut ditransformasikan ke dalam konteks penilaian kinerja dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

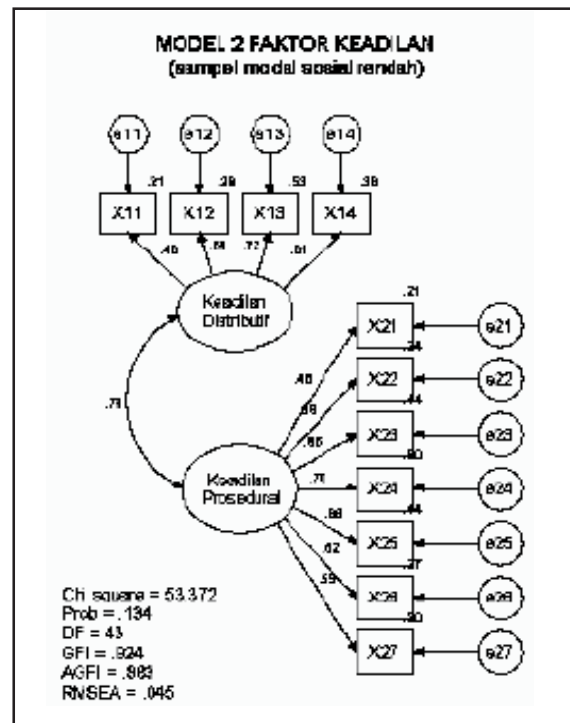
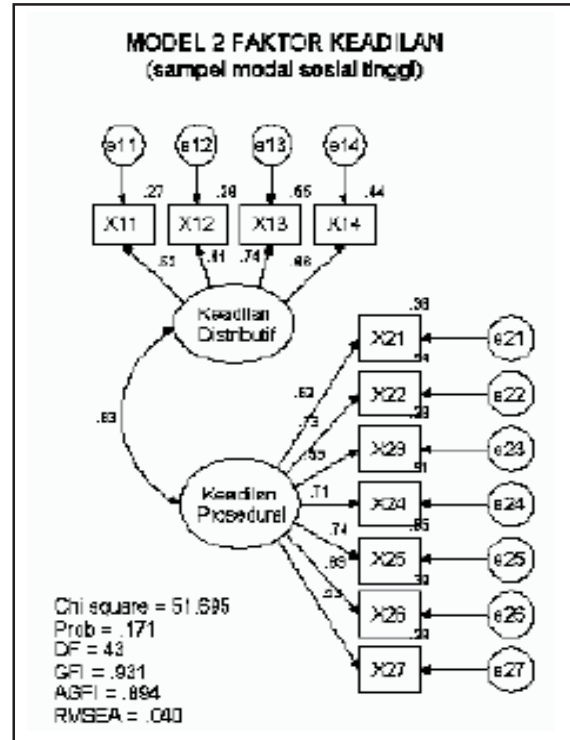
1. Saya dapat mengekspresikan pandangan dan perasaan pada prosedur-prosedur penilaian kinerja.
2. Saya memiliki pengaruh terhadap prosedur-prosedur penilaian kinerja.

3. Prosedur-prosedur penilaian kinerja telah diaplikasikan secara konsisten.
4. Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja tidak lagi mengandung bias (bias kepentingan pihak-pihak tertentu).
5. Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja telah didasarkan pada informasi yang akurat.
6. Saya dapat mempertanyakan penilaian kinerja yang muncul dari prosedur-prosedur tersebut.
7. Posedur-prosedur penilaian kinerja sesuai dengan etik dan standar moral.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis faktor konfirmatori/CFA dilakukan pada model dua faktor keadilan, baik keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan pertimbangan bahwa secara teoritik masing-masing item telah dikaji mengukur konstraknya masing-masing. Dasar analisis menekankan pada validitas isi (*content validity*) masing-masing konstruk. Berkaitan dengan validitas isi, peneliti mengadaptasi item-item yang diambil dari literatur jurnal internasional. Selanjutnya item-item tersebut diadaptasi ke dalam fenomena penilaian kinerja. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mendasarkan pada hasil empirik semata (*empirical criteria alone*).

Kajian model dua faktor di dalam paper ini terdiri atas dua studi yang diambil dari satu penelitian berbasis sampel besar yang terdiri atas 279 responden. Kemudian peneliti membagi menjadi dua sub sampel dengan teknik *mean split*. Dasar pembagian adalah modal sosial tinggi dan rendah yang ada pada diri responden.



Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur derajat kesesuaian model (Hair et al., 1998). Untuk itu perlu menggunakan beberapa kesesuaian model untuk menilai apakah model tersebut sesuai dengan data. Hasil validasi dengan analisis faktor konfirmatori pada kedua sub sampel karyawan PTS tersebut menunjukkan bahwa model dua faktor keadilan distributif dan keadilan prosedural secara umum memiliki *goodness of fit* yang baik dilihat pada tabel di bawah ini.

RMSEA merupakan indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi *chi square* statistik. RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model. RMSEA empiris diperoleh 0.04 dan 0.045 masih di bawah 0.08 sehingga dapat dikatakan ada kesesuaian model dengan data.

Hasil validasi masing-masing item menunjukkan bahwa keempat item pada konstruk keadilan distributif (sampel modal sosial tinggi) memiliki faktor *loading* di

Tabel 3
Goodness of Fit Model Dua Faktor

No.	<i>Goodness of fit index</i>	<i>Cut-off value</i>	Sub sampel modal sosial tinggi	Sub sampel modal sosial rendah
1	<i>Chi square</i>	Diharapkan kecil	51.695	53.372
2.	Prob	≥ 0.05	0.171	0.134
4.	GFI	≥ 0.90	0.931	0.924
5.	AGFI	≥ 0.80	0.894	0.883
6.	RMSEA	≤ 0.08	0.040	0.045

Kriteria *chi square* bersifat sangat sensitif dengan besaran sampel, sehingga harus dilengkapi alat uji lainnya (Hair et al., 1998). Semakin kecil nilai *chi square* semakin baik. Demikian pula probabilitas signifikansinya, jika tidak signifikan pada $p > 0.05$ atau $p > 0.01$ berarti tidak ada perbedaan antara model dengan data. Hasil validasi CFA model dua faktor keadilan baik pada sampel modal sosial tinggi dan rendah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dan data.

Sedangkan GFI dan AGFI digunakan untuk menghitung proporsi tertimbang dari varians di dalam matriks kovarians populasi yang terestimasi (Tanaka & Huba, 1989 dalam Ferdinand, 2000). GFI dalam model regresi dianalogkan dengan R^2 . Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila GFI dan AGFI mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari 0.90 (Hair et al., 1998). Hasil validasi CFA kedua sampel menunjukkan bahwa $GFI > 0.90$ dan AGFI hampir mencapai 0.90, sehingga dapat dikatakan memiliki kesesuaian model yang relatif baik.

atas 0.5, yaitu $X_{11} = 0.52$, $X_{12} = 0.61$, $X_{13} = 0.74$ dan $X_4 = 0.66$. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing item tersebut menunjukkan konstruk dengan lebih baik (Hair et al., 1998). Sedangkan keempat item pada konstruk keadilan distributif (sampel modal sosial rendah) memiliki faktor *loading* secara umum di atas 0.5, kecuali $X_{11} = 0.46$, namun masih dalam batas toleransi, yaitu di atas 0.3 (Hair, 1998).

Demikian pula ketujuh item pada konstruk keadilan prosedural (sampel modal sosial tinggi) memiliki faktor *loading* di atas 0.5, yaitu $X_{21} = 0.62$, $X_{22} = 0.73$, $X_{23} = 0.53$, $X_{24} = 0.71$, $X_{25} = 0.74$, $X_{26} = 0.63$ dan $X_{27} = 0.53$. Sedangkan ketujuh item pada sampel modal sosial rendah menunjukkan hasil di atas 0.5, kecuali $X_{21} = 0.46$, namun juga masih di dalam batas toleransi 0.3 (Hair, 1998).

Dengan melihat kesesuaian model dan faktor *loading* pada masing-masing konstruk, maka item-item keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam fenomena penilaian kinerja mempunyai hasil validasi yang baik dalam sampel universitas, baik pada karakteristik sampel yang berbeda, yaitu mereka yang

memiliki modal sosial tinggi dan rendah.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

Dalam SEM, bagian dari pemodelan yang ditujukan untuk mengukur item-item yang membentuk faktor atau konstruk disebut model pengukuran. Dalam studi ini dilakukan modifikasi item ke dalam fenomena penilaian kinerja. Secara isi (*content*) basis pengetahuan yang mendasari konstruk sudah kuat. Oleh karena itu, digunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori (CFA).

Secara umum hasil pengujian dengan CFA menunjukkan bahwa item-item keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam fenomena penilaian kinerja tervalidasi dengan baik pada sampel universitas. Proses validasi dalam studi ini tidak berbasis pada hasil empiris semata, namun juga melalui diskusi mengenai isi masing-masing konstruk yang diterjemahkan ke dalam item-item pengukuran (*content validity*). Untuk itu, studi ini melibatkan ahli perilaku organisasional dan praktisi, yaitu Kepala Biro SDM dalam membahas isi dari masing-masing konstruk.

Salah satu keterbatasan dalam studi ini adalah berkaitan dengan pengembangan item-item konstruk yang hanya berbasis studi literatur yang ada sehingga cenderung membatasi pendekatan induktif. Padahal pendekatan induktif dapat mengelakkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan teori-teori dan penelitian yang tidak lengkap dan juga dapat meningkatkan keluasaan dan validitas instrumen. Oleh karena itu, pendekatan induktif dapat direkomendasikan untuk studi mendatang tidak hanya berkaitan dengan validasi item, namun juga mengeksplorasi item-item secara induktif.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan hasil statistik adalah korelasi yang relatif tinggi antarvariabel independen yaitu sebesar 0.83 untuk sampel modal sosial tinggi dan 0.78 untuk modal sosial rendah. Hal itu menunjukkan keeratan yang tinggi antarvariabel tersebut atau dapat pula menunjukkan konsep yang tumpang tindih di antara keduanya. Di samping itu, penelitian ini menggunakan responden yang terbatas, yaitu karyawan-karyawan salah satu PTS di Yogyakarta. Penelitian mendatang diharapkan dapat diperluas dengan melibatkan responden yang lebih heterogen dan organisasi bisnis yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P.S. and Kwon, S.W. (2002). Social capital: prospects for a new concept. *Academy of Management Review*, 27 (1): 17-40.
- Ambrose, M.L. and Schminke, M. (2003). Organization structure as a moderator of the relationship between procedural justice, interactional justice, perceived organizational support and supervisory trust. *Journal of Applied Psychology*, 88(2): 295-305.
- Arbuckle, J.L. and Wothke, W. (1999). *AMOS 4.0 User's Guide*. USA: Smallwaters Corporation.
- Arnold, J.A., Arad, S., Rhoades, J.A., Drasgow, F. (2000). The empowering leadership questionnaire: the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. *Journal of Organizational Behavior*, 21: 249-269.
- Barling, J. and Philips, M. (1993). Interactional justice, formal and distributive justice in the workplace: an exploratory study. *The Journal of Psychology*, 649(8): 1-4.
- Cairns, E., Van Til, J. and Williamson, A. (2003). *Social capital, collectivism-individualism and community background in Northern Ireland*. A Report to The office of the First Minister and the Deputy First Minister and the Head of the Voluntary and Community of Unit of the Department for Social Development.
- Carrel, M.R. and Dittrich, J.E. (1978). Equity theory: the recent literature, methodological considerations, and new directions. *Academy of Management Review*, 202-208.
- Chen Kuo, Chia. (2004). Research on impacts of team leadership on team effectiveness. *The Journal of American Academy of Business, Cambridge*, 266-278.
- Chua, Alton. (2002). The influence of social interaction on knowledge creation. *Journal of Intellectual Capital*, 3(4): 1-16.

- Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C. and Ng, K.Y. (2001). Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3); 425-445.
- Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of measure. *Journal of Applied Psychology*, 86(3): 386-400.
- Cropanzano, R., Prehar, C.A. and Chen. P.Y. (2002). Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice. *Group and Organization Management*, 27(3) Sept: 324-35.
- Ferdinand, A. (2000). *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. BP: Universitas Diponegoro
- Folger, R. and Konovsky, M.A. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. *Academy of Management Journal*, 32(1): 115-130.
- Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. dan Black, W.C. (1998). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Konovsky, M.A and Cropanzano, R. (1991). Perceived fairness of employee drug testing as a predictor of employee attitudes and job performance. *Journal of Applied Psychology*, 76(5): 689-707.
- Konovsky, M.A. and Pugh, S.D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. *Academy of Management Journal*, 37(3): 656-696.
- Lee, C. and Farh, J. (1999). The effects of gender in organizational justice perception. *Journal of Organizational Behavior*, 20: 133-143.
- Lind, E.A. and Earley, P.C. (1992). Procedural justice and culture. *International Journal of Psychology*, 27(2): 227-242.
- Lind, E.A. and Tyler, T.R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Planum.
- Masterson, S.S., Lewis, K., Goldman, B.M. and Taylor, M.S. (2000). Integrating justice and social exchange: the differing effects of fair procedures and treatment on work relationships. *Academy of Management Journal*, 43(4); 738-748.
- McFarlin, D.B. and Sweeney, P.D. (1992). Distributive and procedural justice as predictors of satisfaction with personal and organizational outcomes. *Academy of Management Journal*, 35(3): 626-637.
- Moorman. R.H., (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizenship? *Journal of Applied Psychology*, 76(6): 845-855.
- Nahaphiet, J. and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. *Academy of Management Review*, 23(2): 242-266.
- Pfeffer, J. (1982). *Organizations And Organization Theory*. USA: Pitman Publ. Inc.
- Primeaux, P., Karri, R. and Caldwell, C. (2003). Cultural insight to justice: A theoretical perspective through a subjective lens. *Journal of Business Ethics*. 46:187-199.
- Schminke, M., Ambrose, M.L. and Noel, T.W. (1997). The effect of ethical frameworks on perceptions of organizational justice. *Academy of Management Journal*, 40(5):1190-1207.
- Skarlicky, D.P. and Folger, R. (1997). Retaliation in the work place. *Journal of Applied Psychology*, 82(3): 434-443.
- Sweeney, P.D. and McFarlin, D.B. (1993). Workers' evaluation of the "Ends" and the "Means": an examination of four models of distributive and procedural justice. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, (55):23-40.

Tang, T.L. and Baldwin, L.J. (1996). Distributive and procedural justice as related to satisfaction and commitment. *Sam Advanced Management journal*, 25-31.

Thibaut, J. and Walker, L. (1978). A theory of procedure. *California Law Review*, 66: 541-566.

Viswesvaran, C. and Ones, D.S. (2002). Examining the construct of organizational justice: A Meta-Analytic evaluation of relations with work attitudes and behaviors. *Journal of Business Ethics*, 38: 193-203.

REORIENTASI KEPENTINGAN KORPORASI DARI SHARE-HOLDERS KE STAKEHOLDERS UNTUK MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI DI MASA DEPAN

*St. Mahendra Soni Indriyo*¹

ABSTRACT

This article explores the importance of reorientation process of the corporation's interest from shareholders to stakeholders. The corporation's attention and commitment for stakeholders will give the positive contribution to the aim of corporation. Corporation's reorientation of Perseroan Terbatas (PT) was a strategic way for developing of business in Indonesia.

Keywords: *reorientation process, corporation's interest, shareholders, stakeholders.*

PENDAHULUAN

Dunia korporasi (perusahaan) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Eksistensi perusahaan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui proses produksi dan distribusi baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan tidak hanya semata-mata melakukan proses produksi baik barang dan jasa untuk sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dewasa ini, dunia perusahaan dengan kreatifitasnya membuat produk-produk baru yang sebelumnya tidak dibutuhkan masyarakat, kemudian

ditawarkan (dijual) kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan dewasa ini menciptakan hukum baru, cara baru dalam makan dan minum, harapan dan impian baru, pola hidup baru dan cara berbisnis baru. (Djokopranoto, dalam Warta Aptik Edisi April-Juni 2005: 6). Penggunaan strategi pemasaran melalui berbagai macam media iklan digunakan untuk menawarkan produk barang dan jasa baru ini kepada masyarakat.

Tingkat persaingan dalam dunia usaha dewasa ini dan untuk masa mendatang semakin tajam. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dengan pemain lokal, regional, ataupun nasional, melainkan sudah berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha yang bersifat global. Kehadiran Coca-cola, McDonald, Disney, Sony, Shell, IBM, Matsushita Inc, Johnson and Johnson, Borg-Warner melalui produk barang dan jasanya ada di lingkungan kita. Dunia sudah menjadi pasar yang besar. Para pelaku usaha telah masuk pada era globalisasi. Globalisasi sudah merakit ekonomi dunia. *Globalization refers to global economic integration of many formerly national economies into one global economy, mainly by free trade and free capital mobility, but also by easy or uncontrolled migration. It is the effective erasure of national boundaries for economic purposes.* (Herman E Daly dikutip Djokopranoto, dalam Warta Aptik Edisi April-Juni 2005). *Globalization is The increasing integration of economies*

¹ St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

around the world, particularly through trade and financial flows. It also refers to the movement of people (labor) and knowledge (technology) across international borders. It refers to an extension beyond national borders of the same market forces that have operated for centuries at all levels of human economic activity. (IMF, Globalization: Threat or Opportunity).

Berbagai negara pada era globalisasi telah menciptakan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Hal ini tidak hanya disikapi oleh para pelaku usaha, melainkan juga oleh pemerintah negaranya masing-masing. Sebagaimana pendapat Dani Rodrik: *In Japan, large corporations have started to dismantle the postwar practice of lifetime employment, one of Japan's most distinctive social institutions. In Germany, the federal government has been fighting union opposition to cuts on pension benefits aimed at improving competitiveness and balancing the budget. In South Korea, trade unions have gone on nationwide strikes to protest new legislation making it easier for firms to lay off workers. Developing countries in Latin America have been competing with each other in opening up to trade, deregulating their economies, and privatizing public enterprises. Ask business executives or government officials why these changes are necessary, and you will hear the same mantra repeatedly: "We need to remain (or become) competitive in global economy"* (Dani Rodrik, 1997: 2; Frieden and Loke, 1987; Ohmae, 1995). Berakhirnya perang dingin antara blok barat dengan blok timur juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap globalisasi. Sebagaimana dikatakan Francis Fukuyama: *"With the ending of the frigid Fifty Year's War between Soviet-style communism and the West's liberal democracy, some observers-Francis Fukuyama, in particular-announced that we had reached the "end of history.... They have left behind centuries, even millennia, of obscurity in forest and desert and rural isolation to request from world community-and from the global economy that links it together - a decent life for themselves and a better life for their children"* (Fukuyama dalam Ohmae, 1995: 1).

Bagaimana dunia usaha melalui perusahaan-perusahaan sebagai aktornya, menyikapi tantangan globalisasi sekarang dan di masa depan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia agar tetap

eksis dan berkembang dalam percaturan global? Apakah orientasi perusahaan-perusahaan terutama hanya kepada kepentingan pemilik modalnya yang telah melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin? Selanjutnya keuntungan yang diperoleh diakumulasi secara terus menerus melalui upaya-upaya pengembangan lebih lanjut dari perusahaannya. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berstatus sebagai Badan Hukum yang terpisah dari Pemegang Sahamnya (*shareholders*), dapat dipermasalahkan apakah kepentingan *shareholders* lebih diutamakan daripada kepentingan *stakeholders*. Pemikiran tentang diperlukannya reorientasi kepentingan Korporasi menjadi penting di tengah keterpurukan para pelaku usaha di Indonesia dan tantangan dampak eksternal globalisasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: Mengapa dalam menyongsong pembaharuan bentuk Perseroan Terbatas terdapat beberapa pertimbangan tertentu sehingga diperlukan suatu reorientasi kepentingan suatu Perseroan Terbatas dari *Shareholders* ke *Stakeholders*?

PEMBAHASAN

Dunia perusahaan mempunyai salah satu karakteristik yang khas yaitu adanya kontinuitas usaha untuk selalu mengakumulasi modal. Bagi pelaku usaha sejati tidak dikenal berhenti untuk mencari keuntungan. Hal itu dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan perusahaan, pendirian perusahaan-perusahaan baru dengan melakukan diversifikasi usaha, melakukan merger, akuisisi, serta *joint venture*, ekspansi usaha di luar negeri, dan upaya-upaya lain. Dinamika untuk selalu mengakumulasi modal juga didukung oleh fakta historis berkembangnya paham kapitalisme hingga saat ini. Kapitalisme membolehkan orang memiliki modal dan dibolehkannya pemilik modal untuk memproduksi dan berdistribusi dengan motivasi untuk memperoleh dan menumpuk labanya. Kemudian laba yang ditumpuk itu untuk mendirikan perusahaan baru lagi dan seterusnya, sehingga terhimpun banyak perusahaan (Kwik Kian Gie, 1993: 48-49).

Namun upaya pengembangan perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, apakah bisa maksimal jika eksistensi korporasi hanya terfokus pada kepentingan *shareholder* dan atau *stakeholder*. Demikian pula pada usaha Perseroan Terbatas (Ichsan, 1986: 345; Sri Redjeki, 2000: 1) yang sejak mula didirikan sebagai akumulasi modal melalui kepemilikan saham dari investornya (*shareholders*), mereka berharap mendapatkan keuntungan maksimal dari modal yang ditanamnya. Pemegang saham suatu PT jelas-jelas diwadahi dalam salah satu organnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), suatu wadah untuk memperjuangkan kepentingan *shareholders*-nya. Namun eksistensi suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya tidak dapat dipisahkan dari para *stakeholders*-nya. Perusahaan harus melakukan fungsi manajerial dalam memproduksi barang dan jasa dengan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan para *stakeholders*-nya. Pada era globalisasi kini dan untuk masa mendatang, persaingan di antara pelaku usaha semakin tajam. Ketika para *stakeholders* dari suatu perusahaan ditinggalkan, akan berakibat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Eksistensi *Stakeholders* Dalam Korporasi

Stakeholders mempunyai kepentingan, terkait, dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan korporasi. Oleh karena itu, kegiatan bisnis harus dijalkan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Keputusan dan tindakan bisnis yang sedang dan akan dijalankan oleh perusahaan akan berfokus pada kepentingan *stakeholders*-nya. Pendekatan *stakeholders* ini tidak berarti mendikotomi antara kepentingan *stakeholders* di satu sisi dengan kepentingan *shareholders* pada sisi lain. Pendekatan *stakeholders* jika dilakukan justru sekaligus memberikan perlindungan kepada kepentingan dan tujuan korporasi. Hal ini implisit juga memberikan perlindungan kepada kepentingan para pemegang sahamnya (*shareholders*-nya). Jika perusahaan memberikan keuntungan dan manfaat kepada kepentingan para *stakeholders*-nya, ini sekaligus memberikan keuntungan kepada perusahaan dan juga keuntungan pemegang sahamnya (*shareholders*). Keuntungan yang hendak dicapai ini

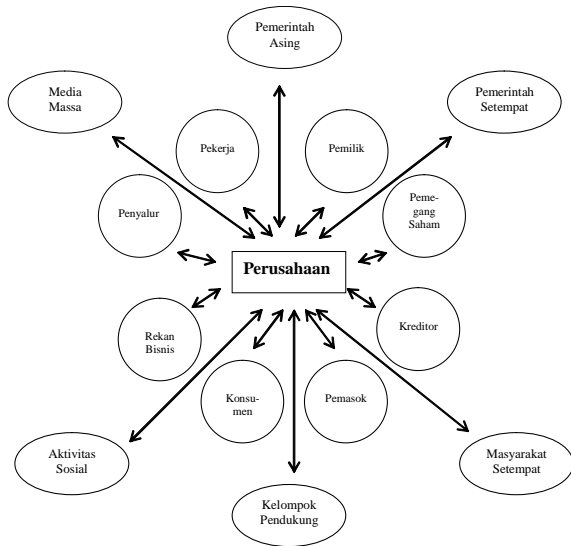
dalam konteks “untung dalam jangka panjang”. Suatu perusahaan bisa saja dalam jangka pendek mendapatkan keuntungan yang besar secara “*instant*” dengan cara penuh intrik, penuh tipu daya, penuh jual beli kekuasaan ekonomi dan politik demi kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan, bahkan hak masyarakat luas. Jika hal itu dilakukan, maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang akan diragukan. Sonny Keraf mengatakan: “Bisnis seperti ini hanya akan menjadi sebuah profesi yang kotor” (2005: 31).

Pada umumnya ada dua kelompok *stakeholder*, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Hal paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok primer karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. Demi kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak boleh merugikan satu pun kelompok *stakeholders* primer. Perusahaan harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut seperti jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain. (2005: 90).

Selanjutnya ditulis oleh Sonny Keraf (2005: 90): “Dalam situasi tertentu, kelompok sekunder ini bisa sangat penting bahkan bisa jauh lebih penting dari kelompok primer sehingga sangat perlu diperhitungkan dan dijaga kepentingan mereka. Kelompok sosial semacam LSM baik di bidang lingkungan hidup, kehutanan, maupun hak masyarakat lokal bisa sangat merepotkan bisnis suatu perusahaan. Sebagai contoh perlawanan yang dilakukan LSM-LSM lingkungan hidup dan sebagian masyarakat lokal terhadap PT Palur Raya di Palur, PT Tirta Investama (Produsen Air Mineral merk *Aqua*) di Klaten, dan kasus yang terjadi di daerah Porsea (Tapanuli Utara) yaitu PT Toba Pulp Lestari (dulu PT Inti Indorayon Utama) yang didemo 52 Kepala desa pada Juni 2003 karena

dianggap kegiatannya masih merusak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar (Tim *Corporate Governance* BPKP, September 2003).

Masyarakat di lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa mempedulikan misalnya kesejahteraan, nilai budaya, sarana dan prasarana lokal, dan lapangan kerja setempat, maka akan menimbulkan suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Relasi antara suatu perusahaan dan kedua kelompok *stakeholders* tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut:

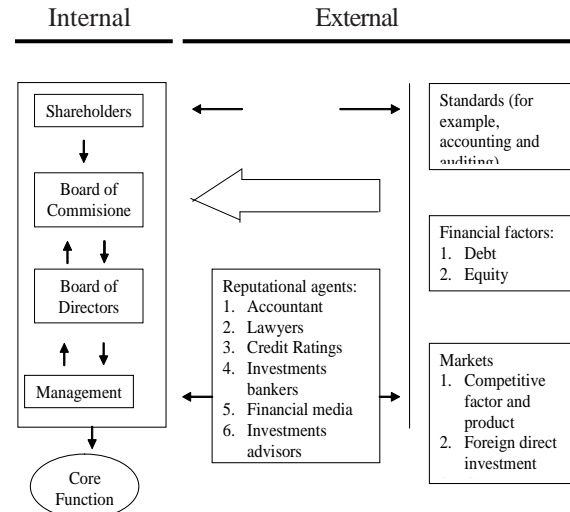


Gambar 1

Relasi Antara Perusahaan dengan Stakeholders
 Sumber: Tim CG BPKP, 2003; Frederick *et al.*, 1992.

World Bank telah memasukkan *stakeholders* sebagai pihak yang eksternal yang dapat mempengaruhi pihak internal (*shareholders, board of commissioners, board of directors, and management*). Hal itu dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa pasar sebagai suatu mekanisme tersendiri yang dapat melakukan fungsi pengendali *corporate governance* adalah termasuk dalam mekanisme pengendali eksternal. Sementara

pemegang saham (*shareholders*), meskipun ia adalah bagian pembentuk pasar, dikategorikan sebagai mekanisme pengendali internal (World Bank, 1999).



Gambar 2

A Corporate Governance Framework: The Internal and External Architecture
 Sumber: World Bank, 1999.

Jadi pengelolaan perusahaan tidak hanya melibatkan antara perusahaan dengan pemberi modal, tetapi juga perusahaan dengan calon pemberi modal, masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pendekatan Stakeholders Theory

Pendekatan *Stakeholders Theory* dimunculkan oleh *Stanford Research Stakeholders Institute* sekitar tahun 1963 di California (Slinger, 1999: 7:2: 136-151), dan kemudian dikembangkan Freeman (1984) yang mendefinisikan *Stakeholders* sebagai: “kelompok lain atau individual yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi”. Freeman berpendapat perusahaan seharusnya memikirkan peta *stakeholders*, mengidentifikasi *stakeholder* utama dan sekunder, keselarasan diantara *stakeholders* dengan perusahaan, dan pengaruh-pengaruhnya baik di bidang ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan manajerial.

Kemudian Mitchel mengidentifikasi atribut-atribut yang membuat *stakeholders* penting bagi organisasi. Mereka adalah perorangan, kelompok, lingkungan, organisasi, institusi, dan masyarakat. Menurut Mitchel, ada tiga atribut yang membuat *stakeholders* menjadi penting bagi organisasi yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi (Mitchell et al, 1997: 22: 853-886). Selanjutnya, pandangan ini diperluas Clarksons yang mengelompokkan *stakeholders* menjadi *stakeholder* utama meliputi *shareholders*, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan komunitas. Pada *stakeholders* utama perusahaan tergantung kepada mereka untuk bertahan hidup. Jadi terhadap *stakeholders* utama ini, perusahaan mempunyai saling ketergantungan yang relatif tinggi. Kedua, *stakeholders* sekunder dimana perusahaan tidak tergantung untuk bertahan hidup padanya, contohnya para teroris. Meskipun demikian perilaku para teroris akan berdampak pada aspek keamanan dan aspek ini dibutuhkan perusahaan. Luoma dan Goodstein mengklasifikasi *stakeholders* menjadi dua, yaitu *stakeholder* utama dan *stakeholder* publik. *Stakeholder* utama misalnya konsumen, pemasok, dan pemberi dana. Sedangkan *stakeholder* publik misalnya kantor pemerintah, akademik, dan perwakilan komunitas (1999, 42: 553-563). Pendekatan *stakeholders* ini merupakan kritik terhadap doktrin *stockholders* yang kuat di perusahaan Amerika, sebagaimana dikatakan oleh Windsor (1998).

Namun demikian, pendekatan *stakeholders* tidak berarti mengabaikan kepentingan *shareholders*. Dalam jangka panjang, pendekatan *stakeholders* implisit juga memperjuangkan kepentingan *shareholder*. Konsep *stakeholderisme* menurut Smith, dilihat sebagai suatu cara perekonsiliasian berbagai macam konflik kepentingan. Premis dasarnya adalah bisnis seharusnya dilihat dan beroperasi sebagai bagian integral masyarakat daripada sebagai entitas ekonomik yang saling meniadakan (Smith, 1998). Bahkan suatu korporasi perlu memberikan *Value Added Reporting* yang dihasilkan perusahaan. Hal ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada lingkungan sosialnya (Belkaoni, 1999).

IMPLEMENTASI

Reorientasi kepentingan korporasi dari *shareholders* ke *stakeholders* menjadi suatu kebutuhan kontemporer. Perusahaan-perusahaan besar dunia yang beroperasi secara global telah membuktikan bahwa perhatian terhadap *stakeholders* merupakan prasarat tercapainya tujuan korporasi. Orientasi Korporasi kepada *stakeholders* secara eksplisit dilakukan antara lain oleh IBM, Matsushita Inc., Johnson and Johnson, Barg-Warner, Citicorp Incorporated, dan Analog Devices Incorporated. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan yang bersifat jangka panjang, tidak hanya pencapaian keuntungan yang bersifat “*instant*”. Berikut ini beberapa korporasi berskala global yang tegas merumuskan eksistensi orientasinya kepada *stakeholders*.

Citicorp Incorporated

Korporasi-korporasi dunia yang telah menyadari arti pentingnya *stakeholders*, biasanya mencantumkan komitmennya kepada *stakeholders* secara tertulis dalam “*The Statement of Corporate Philosophy*”, sebagaimana juga dilakukan oleh Citicorp Incorporated (Hax and Nicolas, 1984: 301).

1. An Annotated Statement of Corporate Philosophy for Citicorp: Relationship With Stakeholders. Citicorp maintains that its relationship with its customers is its primary focus, for without customers the corporation recognizes that it would not be able to meet the needs of its employees, stockholders, or its communities at large.
2. Its relationship with its employees can be described as though but fair, where one’s intelligence, wit, and energy, without regard to race, sex, or creed can become the driving force in predicting how far one can move within the corporation.
3. Citicorp’s commitments to its many publics can be recognized in its Public Issues Committee’s underlying principle that its business franchise is grounded in the support of its corporate constituencies, and in the belief that its social responsibility is to provide to its customers the highest quality of services.
4. The mandate of the Public Issues Committee is to ensure that the public interest is maintained both

in the performance of Citicorp's business roles and in the achievement of a more competitive business environment.

Pada bagian pertama dari *Statement of Corporate Philosophy* tentang "Hubungan dengan Stakeholders", Citicorp menyatakan bahwa pelanggan adalah *stakeholders* utama korporasi. Tanpa pelanggan, korporasi akan sulit memenuhi kebutuhan karyawan, pemegang saham dan masyarakat secara luas.

Hubungan korporasi dengan karyawan digambarkan tegas namun adil, dimana daya pikir, ide, dan tenaga karyawan akan menjadi pendorong dalam memprediksi sejauh mana seorang karyawan dapat berkarir di dalam korporasi tanpa membedakan ras, jenis kelamin, atau kepercayaannya.

Komitmen Citicorp kepada masyarakat diakomodasikan dalam Komite Khusus yang dibentuk oleh korporasi yaitu Komite Isu Publik (*Public Issues Committee*), yang memegang prinsip bahwa kegiatan bisnis korporasi tidak lepas dari dukungan para konstituen korporasi (*stakeholders*), dan keyakinan bahwa kewajiban sosial korporasi (*corporate social responsibility*) adalah untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan sebaik-baiknya. Komite isu publik mempunyai mandat untuk memastikan bahwa korporasi, baik dalam mencapai kinerjanya maupun dalam beroperasi pada lingkungan usaha yang lebih kompetitif, tetap menjaga kepentingan masyarakat luas (*public*).

PT. Astra International Tbk.

Proses dan struktur dalam mengelola bisnis serta operasional PT Astra International Tbk. akan mengarah pada pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan akhir meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang serta *stakeholder* lainnya. Perusahaan juga dikelola untuk meningkatkan kinerja melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan kepada para pemegang saham serta *stakeholder* lainnya. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan bermuara pada kinerja dan *stakeholder value*.

Selanjutnya orientasi kepentingan kepada *stakeholders* juga eksplisit terdapat pada Catur Dharma (*Corporate Philosophy*) dan Prinsip Dasar Astra (*Astra Basic Principles*). Catur Dharma (*Corporate Philosophy*) PT Astra International Tbk. adalah:

1. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara;
2. Memberi pelayanan yang terbaik bagi pelanggan;
3. Saling menghargai dan membina kerjasama;
4. Berusaha mencapai yang terbaik.

Prinsip Dasar Astra (*Astra Basic Principles*) PT Astra International Tbk. adalah:

1. Menjadi warga usaha yang baik akan melanggengkan bisnis Astra;
2. Sikap kerja profesional dan beretika akan meningkatkan nilai *stakeholder*;
3. Proses kerja yang terbaik dan unggul akan menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi untuk memberikan nilai terbaik bagi pelanggan;
4. Kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, ras, agama, dan antargolongan akan menumbuhkan transparansi, kreatifitas, inovasi, dan peningkatan pribadi;
5. Peraih prestasi terbaik layak mendapatkan penghargaan tertinggi;
6. Karyawan dengan motivasi dan kompetensi tinggi yang bekerja sebagai tim akan menghasilkan kinerja yang luar biasa;
7. Aliran kompetensi dan Karyawan tanpa batas dalam lingkungan Grup Astra akan mempercepat tercapainya *Astra Excellence*.

Selanjutnya dalam Visi Astra Tahun 2003 - 2008 untuk seluruh jajaran perusahaan baik manajemen maupun karyawan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang manajemen di kawasan Asia Pasifik dengan penekanan pada pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi;
2. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu reorientasi kepentingan korporasi dari *shareholders* ke *stakeholders*. Perhatian dan komitmen korporasi terhadap *stakeholders*-nya akan memberikan kontribusi positif pada pencapaian tujuan korporasi, ini berarti sekaligus pencapaian tujuan *shareholders*-nya. Jadi reorientasi kepentingan korporasi dari *shareholders* ke *stakeholders* tidak diartikan mengalahkan kepentingan *shareholders* korporasi.

Reorientasi korporasi dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi hal yang strategis bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia. Karakteristik PT yang bisa menampung akumulasi modal dalam jumlah besar dan bentuk PT yang faktual menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pelaku usaha, maka proses reorientasi PT dari *shareholders* ke *stakeholders* haruslah didukung oleh seluruh *Corporate Manajemen* (Manajemen, Komisaris, dan RUPS). Manajemen (Direksi) berperan dalam *day to day operation* korporasi, Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi, dan RUPS mempunyai peran yang strategis terutama dalam mengakomodasi proses reorientasi pada level perumusan Anggaran Dasar atau perevisian Anggaran Dasar PT.

Perusahaan-perusahaan besar dunia yang tumbuh dan berkembang, serta yang mempunyai nilai dan *image* yang tinggi ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai komitmen yang tegas dan lugas kepada kepentingan *stakeholders*-nya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keunggulan komparatif untuk melakukan kompetisi dalam persaingan global, maka reorientasi kepentingan korporasi dari *shareholders* ke *stakeholders* mutlak dilakukan pelaku usaha atau terhadap perusahaan pada umumnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ichsan, (1986), *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
 Akhmad Syakhroza, (2005), *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan*

Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FE UI, Penerbit FE UI, Jakarta

Belkaonil, Ahmed Riahi, (1999), *Value Added Reporting*, Steof the art Greenwood Press Inc.
 Clarson, MB, (1995), *A Stakeholder Framework For Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance*, The Academy of Management Review
 Dani Rodrik, (1997), *Has Globalization Gone Too Far?*, Institute For International Economies, Washington DC.
 Djokopranoto, (2005), "Tantangan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Globalisasi, Khususnya terhadap Misi dan Eksistensi", *Warta Aptik*, Tahun XVI, No. 56 Edisi April-Juni 2005
 Freeman, R, Edward, (1984), *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston
 Hax Arnoldo C and Nicolas S. Majhaf, (1984), *Strategic Management: An Integrated Perspective*, Prentice Hall Inc.
 Jeffry A. Frieden and David A Lake, (1987), *International Political Economies: Perspectives on Global Power and Wealth*, St. Martin's Press Inc, New York
 Kajian Bisnis, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, Volume 13, No. 3, September 2004
 Kenichi Ohmae, (1991), *Dunia Tanpa Batas*, Alih Bahasa FX. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta
 _____, (1995), *The End of The Nation State*, The Free Press, New York
 Kwik Kian Gie, (1993), *Konglomerat Indonesia dan Sepak Terjangnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Luoma, P and Goodstein, (1999), "Stakeholders and Corporate Board: Institutional Influence on Board Composition and Structure", *Academy of Management Journal*

Mitchell, RK, Agie, BR and Wood DJ, (1977), "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency. Defining the Principle of Who or What Really Counts", *Academy of Management Review*.

Slinger, G, (1999), *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance, Corporate Governance*.

Smith, Peter, (1998), "Disclosure and Accountability", Paper presented at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Annual Symposium in Paris

Sonny Keraf, (2005), *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

Sri Redjeki Hartono, (2000), *Beberapa Aspek Tentang Permodalan pada Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung.

Tim Corporate Governance BPKP Jakarta, (2003), *Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholders dalam Penerapan Good Corporate Governance*.

William C. Frederick, James E. Post, Keith Davis, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Mc Graw Hill, New York

Windsor, D, (1998), "The Definition of Stakeholder Status", Paper presented at the International Association For Business and Society (IABS), Annual Conference in Kona-Kailua, Hawai.

World Bank, (1999), *Corporate Governance: A Framework For Implementation*.

MANAJEMEN STRES: BAGAIMANA MENGHIDUPI STRES UNTUK MENCAPAI KEEFEKTIFAN ORGANISASI

Conny Tjandra Rahardja dan N.H. Setiadi Wijaya¹

ABSTRACT

Stress is one of the most creatively ambiguous terminology, with as so many interpretation as there are people who use the word. In non-academical area, there is an opinion that stress must be avoided, because of negative consequences of stress. In fact, many researchers and theorists argue that stress affects both negative and positive impacts for individual and organization. This means, managers must manage stress that occurs in the organization. Moreover, each member of organization should know how to manage his/her self stress. Stress lives as long as organization's life. It can not be avoided, but can be managed.

Keywords: stress, effectiveness, organizations.

PENDAHULUAN

Stres merupakan hal yang sangat biasa dialami oleh individu dalam berbagai peran yang dijalannya sehari-hari, termasuk perannya sebagai karyawan. Masih banyak orang awam beranggapan bahwa stres merupakan hal buruk yang harus dihindari. Namun, kenyataannya stres mempunyai sisi baik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Stres atau tekanan

dalam kondisi tertentu malah memunculkan energi positif. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengelolanya. Bagaimana stres yang tadinya (potensi) berdampak negatif, mampu dialihkan menjadi berdampak positif. Stres tidak dapat dihilangkan, bahkan memang tidak perlu dihilangkan, namun dihidupi.

Artikel ini akan membahas hubungan antara stres dan kinerja, penyebab stres internal dan eksternal dan bagaimana mengelola stres dengan baik. Ditekankan dalam artikel ini, bahwa tanggung jawab mengelola stres bukan hanya pada pundak organisasi, namun juga individu. Setiap karyawan hendaknya tahu, apakah dimensi stres dan bagaimana memanfaatkannya untuk keefektifan pekerjaan yang dilakukan. Literatur riset mengakui bahwa cukup sulit mendefinisikan stres dari satu sudut pandang saja, oleh karena itu tulisan ini menggunakan banyak acuan.

STRES DAN DIMENSINYA

Stres adalah kondisi fisik dan psikologis yang disebabkan karena adaptasi seseorang pada lingkungannya (Higgins, 1982). Oleh Nelson dan Quick (1997) mengatakan bahwa stres adalah "persiapan yang tidak disadari" oleh seseorang untuk menghindari atau menghadapi tuntutan-tuntutan lingkungannya. Selye

¹ Conny Tjandra Rahardja, SE., MM., dan N.H. Setiadi Wijaya, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap Jurusan Manajemen STIE YKPN Yogyakarta.

(1974) mengatakan; “*Stress is nonspecific response of body to any demand made upon it.*” Pengertian yang lebih luas oleh Gold dan Roth (1993), yaitu; “*A condition of disequilibrium within the intellectual, emotional, and physical state of the individual; it is generated by one’s perceptions of a situation, which result in physical and emotional reactions. It can be either positive or negative, depending upon one’s interpretations.*” Jadi stres ada karena individu berinteraksi dengan lingkungannya dan juga karena persepsi individu terhadap proses interaksi tersebut. Sepanjang masih berinteraksi dengan lingkungan, wajar jika seseorang mengalami stres.

Hans Selye pada tahun 1946 mengemukakan; “*No one can live without experiencing some degrees of stress all the time.... Crossing a busy intersection, exposure to draft, or even sheer joy are enough to activate the body’s stress mechanism* *The secret of health and happiness lies in successful adjustment to the ever changing conditions on this globe; the penalties for failure in this great process of adoption are disease and happiness.*” Hal penting yang dikemukakan adalah stres merupakan sesuatu yang abstrak. Stres sulit dilihat dari penyebabnya, namun dilihat dari akibat dari stres pada diri seseorang (Higgins, 1982).

Sebagaimana layaknya makhluk hidup, manusia juga mempunyai sistem pertahanan diri terhadap aksi yang diberikan oleh lingkungannya. Semakin besar aksi yang diberikan oleh lingkungannya, semakin besar tingkat stresnya. Namun setiap orang mempunyai toleransi terhadap aksi yang berbeda-beda (*tolerance to stressor*). Bagi seseorang sebuah aksi dari lingkungannya bisa menjadi sumber tekanan besar, namun bagi orang lain besarnya tekanan terlalu kecil dibandingkan dengan pertahanan dirinya. Namun bagi setiap orang stres merupakan bagian kehidupan yang normal, peran seseorang sebagai anggota masyarakat, keluarga atau sebagai karyawan. Manusia bahkan tidak dapat menghindari stres. Selain menandakan kehidupan, kita juga perlu belajar bagaimana menghadapi stres.

Reaksi terhadap stres ada dua macam yaitu; (1) *distress* adalah reaksi negatif yang bersifat destruktif dan (2) *eustress* adalah reaksi yang bersifat konstruktif/positif. *Distress* menyebabkan berbagai kerugian bagi individu maupun organisasi, misalnya menurunnya produktivitas dan profit, meningkatkan

kemangkiran dan perputaran tenaga kerja (*employee turnover*), tindakan menyimpang karena terganggunya kondisi psikologis (emosional), sampai menurunkan kesehatan fisik seseorang, sebaliknya *eustress* menyebabkan munculnya energi dan gairah, menimbulkan ide baru, dan vitalitas organisasi yang meningkat (Nelson & Quick, 1997). Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan; “Apakah stres baik?”, jawabnya adalah “netral”, bisa baik atau buruk, tergantung dari dampak stresnya.

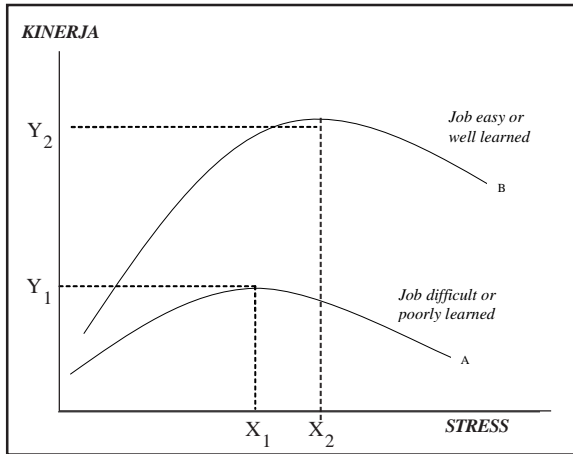
HUBUNGAN STRES DAN KINERJA KARYAWAN

Penelitian yang dilakukan oleh Bruce M. Meglino pada tahun 1977 menyimpulkan bahwa benar ada hubungan signifikan antara stres dan produktivitas. Hubungan tingkat stres dan kinerja karyawan secara grafis digambarkan sebagai kurva berbentuk huruf U terbalik (*inverted-U*) (Higgins, 1982). Pada tingkat stres yang rendah akan menghasilkan kinerja karyawan yang rendah. Karyawan dalam kondisi tanpa tantangan atau munculnya kebosanan karena *understimulation* (Nelson & Quick, 1997). Seiring dengan kenaikan stres sampai ke suatu titik optimal akan menghasilkan kinerja karyawan terbaik. Kondisi ini disebut dengan tingkat stres yang optimal (Gambar 1).

Akan tetapi, apabila stres terus dinaikkan melampaui titik optimal, maka akan terjadi penurunan kinerja karyawan. Tingkat stres yang berlebihan menyebabkan karyawan dalam kondisi tertekan bahkan depresi, karena tidak mampu lagi menanggung tugas yang terlalu berat. Suatu tingkat stres yang dapat meningkatkan kinerja karyawan disebut *eustress*, sedangkan yang dapat menurunkan prestasi kerja disebut *distress*. Diperlukan pemahaman akan titik stres yang optimal dan kemampuan untuk menggunakan teknik-teknik mengatasi stres untuk mempertahankan kondisi *eustress* (tingkat stres yang menguntungkan). Stres pada tingkat optimal justru dapat menciptakan gagasan inovatif dan output yang konstruktif dan antusiasme.

Pada Gambar 1 terdapat 2 kurva U terbalik, kondisi A adalah jika pekerjaan relatif sulit atau belum dikenali dengan baik, sedangkan kondisi B menunjukkan pekerjaan yang relatif mudah dan telah dikenali/dipelajari dengan baik. Kedua kondisi ini menunjukkan kondisi stres optimal yang berbeda.

Pekerjaan yang relatif mudah/telah dipelajari dengan baik mempunyai toleransi terhadap stres yang jauh lebih besar (sumbu horizontal – titik X1 dan X2) dan pada tingkat kinerja optimal yang lebih tinggi (sumbu vertikal – titik Y1 dan Y2).



Gambar 1
Hubungan Tingkat Stres dengan Kinerja Karyawan
Sumber: Higgins (1982).

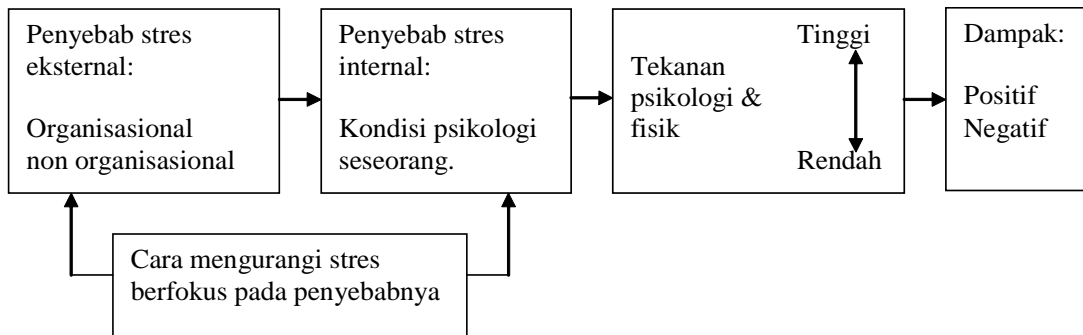
PENYEBAB STRES: FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

Gambar 2 berikut ini menunjukkan penyebab stres eksternal dan kondisi psikologi seseorang yang dapat memicu stres internal. Kondisi psikologi setiap manusia

yang berbeda menyebabkan respon yang berbeda terhadap penyebab stres eksternal yang sama. Tekanan psikologi yang berbeda inilah yang menyebabkan stres dapat berdampak positif, atau dapat pula berdampak negatif pada setiap individu pada tingkat yang berbeda-beda pula.

Faktor internal yang menyebabkan stres dalam diri seseorang lebih ditentukan oleh **kepribadian** (*personality*), **kemampuan** (*ability*), serta **nilai budaya** (*values*) orang tersebut. Kepribadian definisi kepribadian menurut “English Dictionary” adalah seluruh karakter dan sifat alami yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan sumber en.wikipedia.org/wiki/Personality, disebutkan; “*In psychology, personality describes the character of emotion, thought, and behavior patterns unique to a person. There are several theoretical perspectives on personality in psychology, which involve different ideas about the relationship between personality and other psychological constructs, as well as different theories about the way personality develops.*”

Berdasarkan definisi di atas didapatkan bahwa kepribadian tidak dapat diartikan sebagai keceriaan seseorang, sikap yang positif menghadapi kehidupan, wajah yang selalu tersenyum, atau seseorang yang sangat ramah dan bersahabat. Kita bisa menyimpulkan kepribadian adalah sistem psikologi yang dimiliki seseorang untuk bereaksi dan berinteraksi dengan pihak lain dan lingkungannya. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh keturunan, lingkungan, situasi, dan karakter dasar seseorang.



Gambar 2
Penyebab dan Dampak Stres
Sumber: Higgins (1982).

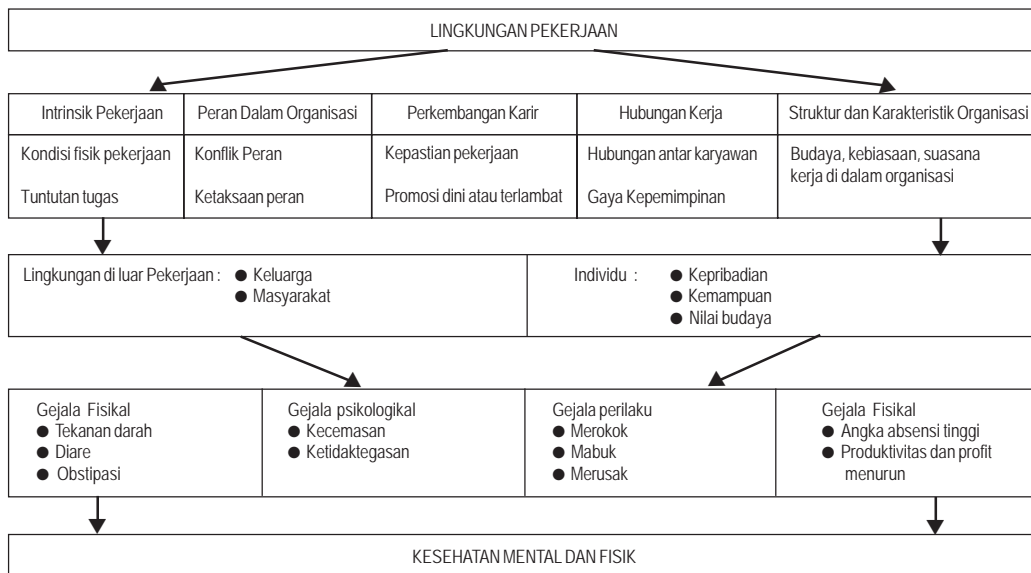
Kemampuan menunjukkan kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas di suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Kemampuan seseorang dibentuk oleh dua hal: kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual diperlukan seseorang untuk melakukan aktivitas mental, yang dicerminkan dari hasil tes IQ. Kemampuan intelektual meliputi kemampuan kuantitatif dan verbal. Jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang mempengaruhi tinggi dan rendah kemampuan intelektual yang perlu dimiliki seseorang, sedangkan kemampuan fisik lebih diperlukan untuk pekerjaan yang memerlukan stamina dan tenaga yang kuat. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan oleh dirinya sendiri atau pihak lain akan mengalami stres.

Nilai budaya adalah meliputi keyakinan yang dipahami oleh individu (atau bersama) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Setiap individu memiliki nilai budaya yang diinternalisasi sejak dia lahir, di lingkungan keluarga sampai di lingkungan masyarakat sekitar. Setelah di dewasa, jika dia tidak dapat beradaptasi dengan nilai budaya baru di setiap lingkungan baru yang dimasuki, maka perbedaan nilai budaya akan menjadi penyebab stres.

PENYEBAB STRES: FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan stres pada seseorang berasal dari lingkungan pekerjaan (organisasional) dan lingkungan di luar pekerjaan (non organisasional), antara lain keluarga, masyarakat, dan jalur lalu lintas macet. Bagi pekerja yang sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja, lingkungan kerja merupakan penyebab stres terbesar. Setiap orang yang berinteraksi dengan pekerjaan, biasanya berinteraksi juga di tempat lain, antara lain di rumah, kampung, dan perkumpulan sosial. Apabila sumber stres dari berbagai area interasinya, mudah sekali orang terganggu secara psikologis dan fisik.

Faktor-faktor di pekerjaan yang dapat menimbulkan stres dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu faktor-faktor intrinsik pekerjaan, peran dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan kerja, serta struktur dan iklim dalam organisasi (Munandar, 2001). Faktor-faktor pekerjaan yang dapat menimbulkan stres digambarkan pada Gambar 3 berikut ini, sedangkan faktor-faktor di luar organisasi meliputi tuntutan di luar pekerjaan.



Gambar 3
Model Stres dalam Pekerjaan
 (Dimodifikasi dari model Cooper, C.L. pada Munandar (2001)).

1. Faktor Intrinsik Pekerjaan

a. Kondisi Fisik Pekerjaan. Kondisi fisik pekerjaan mencakup setiap hal dari fasilitas parkir di luar gedung perusahaan, lokasi dan rancangan tata letak ruang/mesin, jumlah cahaya yang menimpa meja kerja atau ruang kerja, dan suara gaduh mesin. Kondisi fisik pekerjaan yang dapat menyebabkan stres adalah bising, vibrasi (getaran) dan *hygiene*.

Bising. Bising dapat menimbulkan gangguan sementara atau tetap pada alat pendengaran, juga dapat menjadi sumber stres yang berakibat pada ketidakseimbangan psikologis dan penurunan kesigapan kerja. Kondisi demikian memudahkan terjadi kecelakaan kerja, misalnya tidak mendengar suara-suara peringatan sehingga timbul kecelakaan. Penelitian Ivancevich pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kebisingan yang berlebih (di atas 80 desibel) yang berulang dan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan stres (Munandar, 2001). Sedangkan dampak psikososial dari bising adalah mengurangi toleransi pekerja terhadap penyebab stres yang lain, sikap negatif terhadap orang lain, rasa bermusuhan, dan agresi terbuka serta penurunan perilaku untuk membantu rekan lain. Kondisi bising yang berlebih berdampak terhadap penurunan motivasi kerja, produktivitas, dan peningkatan kecelakaan kerja.

Getaran. Getaran yang merambat dari alat/mesin ke tubuh dapat memberi pengaruh yang tidak baik pada produktivitas. Getaran dari mesin pada pekerjaan *drilling* dalam jangka panjang dapat membahayakan. Hasil penelitian Sutherland dan Cooper (1986) menunjukkan 37% pekerja mengalami stres akibat getaran yang berulang dan dalam waktu yang lama (Munandar, 2001).

Hygiene. Kebutuhan akan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, ventilasi udara dan usaha yang normal, akomodasi yang memenuhi syarat kesehatan, toilet yang bersih dan cukup adalah kondisi yang perlu bagi pekerja sebagai faktor yang mempengaruhi stres. Tempat kerja

yang kotor, berdebu, licin, gelap, silau, panas, pengap, dan makanan yang kurang baik dinilai oleh pekerja sebagai faktor tinggi penyebab stres.

b. Tuntutan Tugas. Tuntutan tugas meliputi berbagai bentuk kegiatan yang berpola khas pada masing-masing jenis pekerjaan, meliputi kerja *shift* malam, kerja *shift rig* lepas pantai, beban kerja, jam kerja yang lebih panjang, *cycle time*, dan pekerjaan yang repetitif.

Kerja Shift Malam. Kerja *shift* malam mempengaruhi emosional dan *biological* karena perubahan ritme *circadian* dari tidur atau pola bangun, pola suhu tubuh, dan ritme pengeluaran adrenalin.

Kerja Shift Rig Lepas Pantai. Pekerjaan jenis ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak bisa diharapkan akan membentuk pola kebiasaan seperti pada pekerja pabrik. Oleh karena itu, Sutherland dan Cooper (1986) dalam Munandar (2001) menyarankan agar pekerja memperoleh istirahat total dalam waktu yang sama 7 atau 14 hari cuti rumah.

Beban Kerja. Beban kerja berlebih dengan waktu yang terbatas merupakan penyebab stres potensial saat ini (Nelson & Debra, 1997; Robbins, 2003). Beban kerja yang terlalu sedikit ternyata juga merupakan sumber stres (lihat Gambar 1, kondisi distress, karena tingkat stres terlalu rendah) (Munandar, 2001). Beban kerja ini dapat dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. Beban kerja kuantitatif berkenaan dengan tugas-tugas yang terlalu banyak atau sedikit yang diberikan kepada pekerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja kualitatif berdasar pada kemampuan (kompetensi) seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan.

Jam Kerja yang Lebih Panjang. Jam kerja yang lebih panjang dan kerja lembur dialami oleh karyawan ketika perusahaan harus meningkatkan produksi, sedangkan di pihak lain kapasitas produksi yang diutilisasi oleh perusahaan sudah optimal. Berdasarkan penelitian Smith (2001) di Bristol mengatakan jam kerja yang panjang dan kerja lembur akan menyebabkan tingkat stres yang tinggi pada

karyawan, karena meningkatnya tuntutan kerja dan berkurangnya waktu untuk pribadi karyawan. Conti *et. al.* (2006) juga memperoleh hasil yang sama ketika dia melakukan riset pada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang memiliki proses produksi lini.

Cycle Time dan Pekerjaan yang Repetitif.

Cycle time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan. Jika karyawan dapat mengurangi *cycle time* dengan cara karyawan bekerja dengan lebih cepat atau memang suatu pekerjaan memiliki *cycle time* yang pendek, maka hal ini akan meningkatkan stres pada karyawan. Melamed *et. al.* (1995) menemukan *cycle time* yang pendek akan menyebabkan pengulangan pekerjaan yang semakin sering, dan mengakibatkan peningkatan *distress* secara psikologis di kalangan 1.278 karyawan yang dijadikan responden.

2. Faktor Peran Dalam Organisasi

a. Konflik Peran. Konflik peran yang timbul pada seseorang pekerja dalam melakukan tugasnya terjadi bila terdapat kondisi sebagai berikut:

- i. Pertentangan antara tugas-tugas yang harus dilakukan dengan tanggung jawab yang dimiliki.
- ii. Tugas-tugas yang dilakukan bukan merupakan bagian pekerjaannya.
- iii. Tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan atasan, rekan, bawahan, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya.
- iv. Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi.

Van Sell (1981) dan Kahn (1964) menemukan bahwa pekerja yang menderita konflik peran tinggi cenderung memiliki kepuasan kerja yang rendah dan ketergantungan pekerjaan yang tinggi. Miles dan Perreault (1976) dalam Munandar (2001) membedakan empat jenis konflik peran, yaitu (1) **konflik peran pribadi** bila pekerja ingin melakukan tugas berbeda dari yang disarankan dalam uraian pekerjaan, (2) **konflik intrasender** terjadi jika pekerja menerima penugasan tanpa memiliki tim kerja

dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik, (3) **konflik intersender** yaitu konflik yang terjadi apabila pekerja diminta berperilaku tertentu, namun ada sekelompok orang yang puas dan ada pula yang tidak puas dengan perilaku tersebut, dan (4) **konflik beban berlebih** apabila pekerja mendapat penugasan yang terlalu banyak dan tidak dapat mengerjakan secara efektif.

b. Ketaksaan Peran. Ketaksaan peran dimaksud sebagai ketidakjelasan posisi seseorang di dalam organisasi, sehingga kendali terhadap pekerjaan kecil (Nelson & debra, 1997). Hal ini ketidakjelasan tujuan (sasaran) kerja, tanggung jawab, dan prosedur yang ada. Ketaksaan peran juga terjadi, karena tidak ada kejelasan harapan atasan terhadap kinerja bawahan dan tidak ada kejelasan mengenai evaluasi kinerja bawahan. Hal tersebut terjadi bila atasan tidak memberikan informasi yang cukup kepada bawahan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan keterbatasan waktu, sumber daya, dan teknologi.

3. Faktor Pengembangan Karir

a. Ketidakpuasan Pekerjaan. Perubahan lingkungan dan teknologi sering menimbulkan masalah baru bagi organisasi karena perubahan terjadi pada jumlah dan macam pekerjaan. Pengaruh penerapan sistem dan teknologi baru berdampak pada ketakutan karyawan kehilangan pekerjaan dan merasa tidak berdaya karena kontribusi mereka terhadap perusahaan telah digantikan sistem yang serba terkomputerisasi. Reorganisasi diperlukan untuk mengatasi masalah tidak diperlukan lagi suatu jenis pekerjaan, dan sisi lain muncul jenis pekerjaan baru.

b. Promosi Dini dan Promosi Terlambat. Pola pertumbuhan organisasi berpengaruh atas peluang karir dan promosi, bahkan rasionalisasi. Promosi dini merupakan sumber stres jika peristiwa itu dirasakan sebagai perubahan drastis, karena karyawan kurang dipersiapkan untuk promosi. Promosi dini menimbulkan masalah bagi pekerja karena ketidaksiapan mental, pengetahuan, dan ketrampilan yang akan

berdampak pada penghayatan harga diri yang rendah. Stres ini muncul dalam bentuk “groggi”, ragu-ragu atau sebaliknya sikap mentang-mentang/arogan.

Promosi terlambat juga dapat menjadi penyebab stres. Pada organisasi yang tidak berkembang atau mengalami kemunduran, atau ketidakpekaan atasan terhadap kesiapan bawahan untuk dipromosi menyebabkan bawahan mengalami stres. Perilaku stres ini berupa semangat kerja yang rendah, ketegangan hubungan antar pribadi, dan keresahan.

4. Hubungan Kerja

a. Hubungan Kerja Antarkaryawan. Hubungan dengan orang lain merupakan salah satu penyebab stres. Tuntutan terhadap terciptanya kohesivitas tim kerja juga memberikan tekanan yang besar kepada anggota tim kerja untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma tim kerja (padahal norma pribadi berbeda).

b. Gaya Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam berbagai buku literature pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu otokratik, partisipatif dan *laissez-faire*. Gaya kepemimpinan otokratik lebih memfokuskan pada tugas dan mengabaikan hubungan antarmanusia. Semua pengambilan keputusan dilakukan oleh atasan tanpa melibatkan bawahan. Gaya kepemimpinan seperti ini mematkan inisiatif dan kreativitas bawahan.

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan, baik dalam pengambilan keputusan dan eksekusinya. Bawahan diajak untuk berperan dan terlibat, sedangkan pemimpin tidak meninggalkan, tetap menerima pertanyaan, pendapat, dan penyelesaian masalah pekerjaan.

Gaya kepemimpinan *laissez-faire* adalah kebalikan dari otokratik. Bawahan diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Tidak adanya fungsi pengendalian menyebabkan perusahaan tidak terarah dan tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta konflik pihak-pihak yang berkepentingan sangat tinggi. Gaya kepemimpinan seperti ini dapat menimbulkan

dualisme kepemimpinan atau lebih sangat membingungkan bawahan.

Dengan asumsi di atas maka gaya kepemimpinan yang diasumsikan menyebabkan stres adalah otokratik dan *laissez-faire*. Pada gaya otokratik, bawahan yang memiliki orientasi pencapaian yang tinggi akan lebih mudah stres menghadapi gaya kepemimpinan yang demikian, sedangkan pada gaya *laissez-faire* stres muncul, karena bawahan tidak memiliki kejelasan peran yang dilakukan. Gaya kepemimpinan yang diasumsikan menyebabkan stres adalah gaya kepemimpinan otokratik dan *laissez-faire*.

5. Struktur dan Karakteristik Organisasi

Weiss (1970) menunjukkan struktur organisasi dan inovasi yang dilakukan dalam organisasi secara signifikan merupakan *stressor* potensial bagi manajer sistem informasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Li menyimpulkan bahwa karakteristik organisasional yang dapat meningkatkan kepuasan kerja secara signifikan dan mengurangi stres karyawan adalah kejelasan dan penyebaran misi ke seluruh anggota organisasi, *quality of work life* yang baik, kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan dan melakukan inovasi, dan fleksibilitas proses organisasi.

Era globalisasi saat ini membuka peluang untuk terjadinya keragaman budaya dalam organisasi, seorang pekerja dengan latar budaya yang berbeda memasuki suatu organisasi dengan budaya organisasi tertentu serta berinteraksi dengan individu lain yang memiliki budaya berbeda. Berry (1990) meneliti perpindahan guru ke institusi yang memiliki budaya yang berbeda dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kebingungan, kecemasan, perasaan marginal yang dapat menyebabkan stres. Hal yang sama juga akan berlaku bagi individu yang bekerja di suatu organisasi yang berbeda.

Tuntutan dari Luar Organisasi

Kategori penyebab stres potensial ini juga mencakup segala unsur kehidupan seseorang di luar organisasi seperti masalah keluarga, kesulitan keuangan, keyakinan pribadi dan organisasi yang bertentangan, konflik antar tuntutan keluarga dan tuntutan

perusahaan. Semua permasalahan tersebut dapat merupakan tekanan pada individu dalam melakukan tugas pekerjaannya. Namun demikian, peristiwa kehidupan pribadi dapat meringankan akibat dari penyebab stres organisasi. Jadi dukungan sosial berfungsi sebagai penahan stres. Sebaliknya kepuasan kerja dapat membantu individu untuk menghadapi kehidupan pribadi yang penuh stres dengan berfungsi sebagai penahan stres.

Peristiwa kehidupan pribadi yang terjadi sebagai akibat perubahan dalam dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan dapat menimbulkan stres. Thomas H. Holmes dan Richard Rahe (1967) dalam Higgins (1982) meneliti keterkaitan peristiwa-peristiwa kehidupan pribadi dengan stres dan sakit. Penelitian dilakukan atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang dianggap berperan diberi bobot/dikuantifikasi untuk memperoleh gambaran pengaruh terhadap pemicu penyakit. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyebabkan perubahan yang drastis dalam jangka waktu yang singkat, akan menambahkan stres seseorang, misalnya Ibu Amir tinggal di Yogyakarta, akan menikahakan puterinya dan setelah ini si puteri dan suami akan tinggal di Papua. Pada bulan ini juga, Ibu Amir memasuki usia pensiun. Dua peristiwa kehidupan yang mengubah kehidupan yang sudah selama ini dapat menyebabkan stres, apalagi jika terdapat lebih dari dua peristiwa kehidupan yang terjadi secara bersamaan.

MENGHIDUPI STRES

Menghidupi stres mengandung pokok pengertian bahwa memandang stres adalah normal dalam kehidupan individu dan organisasi dan bagaimana stres dapat dicegah atau dihadapi tanpa berdampak negatif. Mencegah dampak buruk berarti berusaha mencegah timbulnya stres yang berlebihan, meningkatkan ambang stres, dan menampung akibat fisiologikal dari stres yang bertujuan untuk mencegah perkembangan stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang (kronis).

Dalam kehidupan seseorang selalu ada situasi yang tidak terduga sebagai penyebab stres. Stres diperlukan, karena itu harus dimaklumi bahwa stres adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tidak selalu berhasil untuk mencegah stres, sehingga perlu

diusahakan agar stres dapat dipertahankan pada suatu tingkat yang positif konstruktif, dengan mencegah dan membuang dampak negatif destruktif dan kronis.

Selama ini dikenal ada dua reaksi menghadapi stres yaitu “kabur” atau “tempuh”. “Kabur” dimaksud sebagai reaksi “melarikan diri” baik secara fisik atau psikis dari situasi yang penuh stres. “Kabur” secara fisik ialah meninggalkan ruang kerja yang menimbulkan stres, minta mutasi pekerjaan, mengundurkan diri sementara dari tugas pekerjaan/jabatan, atau bahkan perusahaan dan mencari pekerjaan di tempat lain. “Kabur” secara psikologis ialah membawa pikiran dari dunia nyata ke dunia khayal, mencoba melupakan stres dengan minum alkohol, menggunakan obat penenang/napsa, sikap emosional, marah-marah tanpa sebab berarti, tidak selera makan atau bahkan makan berlebihan.

Reaksi “kabur” dari situasi stres tidak menyelesaikan masalah, situasi yang ada tetap sama, bahkan makin memburuk. Perubahan yang ada bersifat negatif, kondisi mental dan fisik yang tertekan. Solusi terbaik menghadapi stres adalah “tempuh” dan mengelola stres dengan tepat. Stres adalah suatu keadaan yang dialami seseorang karena terjadinya interaksi antara faktor-faktor di lingkungan dan faktor-faktor dari pribadi individu. Oleh karena itu, mengelola stres harus diusahakan untuk:

1. Mengubah faktor-faktor di lingkungan agar tidak merupakan faktor penyebab stres.
2. Mengubah faktor-faktor dalam pribadi individu agar dapat diperoleh:
 - a. meningkatkan ambang stres, yakni tidak cepat merasa suatu situasi yang dihadapi sebagai situasi yang penuh stres; dan
 - b. meningkatkan toleransi terhadap stres, yakni dapat bertahan lebih lama dalam situasi yang penuh stres dengan kondisi badan yang tetap sehat.

Langkah-langkah awal untuk mengatasi stres dapat dengan berbagai cara, antara lain meninggalkan ruang kerja untuk berbincang-bincang santai dengan rekan kerja, mendengarkan musik, olahraga, menonton TV, istirahat, tidur, dan melihat gambar-gambar yang bersifat menghibur. Sub-sub judul setelah ini akan dibahas metoda mengelola stres dari secara organisasional dan individual, karena pada prinsipnya tanggung jawab pengelolaan stres ada pada kedua

pihak ini.

MENGELOLA STRES: PENDEKATAN ORGANISASIONAL

Berikut ini ada beberapa pendekatan organisasional untuk mengelola stres, yaitu penerapan MBO, sistem seleksi dan penempatan, pendesainan kembali pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, komunikasi dalam organisasi, *wellness program*, perekrutan organisasi, program pelatihan, pembentukan tim kerja, dan penyuluhan jabatan.

1. Penerapan *Management by Objective* (MBO) dan *Time Management*

Strategi yang dapat dilakukan untuk para manajer menengah ke atas dengan pekerjaan-pekerjaan yang dirasakan memiliki beban berlebihan yakni *Work by Objectives* dan *Time Management*. *Work by Objectives* merupakan salah satu teknik yang termasuk dalam *Management by Objectives*. *Work by Objectives* terdiri dari empat langkah-langkah yaitu: (1) menetapkan sasaran yang realistis bagi satuan kerja, yang dapat dicapai dalam waktu yang ditetapkan, (2) merancang perangkat perencanaan, tindakan atau metode untuk dapat mencapai sasaran, (3) menciptakan strategi untuk dapat mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pada suatu periode tertentu, dan (4) melakukan pengukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pada akhir waktu yang ditentukan.

Penetapan tujuan pekerjaan yang akan dicapai dengan melibatkan karyawan menimbulkan kejelasan dan memotivasi karyawan dalam pencapaian prestasi, sehingga mengurangi tingkat frustrasi karyawan, ambiguitas pekerjaan, dan stres. Gambar 1 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kejelasan pekerjaan dengan pencapaian kinerja yang tinggi. Menurut Higgins (1982), salah satu hal yang penting untuk mengatasi stres adalah mengelola waktu kita. Mengelola waktu dengan baik dapat mencegah beban stres pelaku-pelaku bisnis modern. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Berapa lama waktu yang kita buang sia-sia? Mengelola waktu dengan baik memungkinkan kita untuk mencapai suatu kehidupan yang seimbang antara pekerjaan, keluarga, diri sendiri, meningkatkan produktivitas, dan memberi kesempatan kepada kita untuk mencapai tujuan pribadi dan pekerjaan pada

waktu yang tersedia.

Waktu adalah sumber daya yang unik. Pada dasarnya, kita ingin melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat, namun ketersediaan sumberdaya dan waktu terbatas. Kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk mengelola waktunya. Sebaliknya kegagalan seseorang mengelola waktu merupakan salah satu sumber stres, antara lain keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa dan pekerjaan dilakukan di bawah tekanan waktu yang ketat. Setiap pemikiran, setiap tindakan membutuhkan waktu, segala aktivitas menggunakan waktu yang tersedia, dan menimbulkan peluang terjadinya waktu terbuang, serta menunda pekerjaan penting.

Manajemen waktu merupakan proses yang sederhana. Pertama apa yang akan kita lakukan dengan waktu kita, kedua, kita perlu menganalisa penggunaan waktu kita untuk memperoleh hasil yang produktif, ketiga, kita dapat menggunakan waktu yang tidak produktif untuk istirahat kita secara pribadi. Salah satu alat bantu untuk menganalisis kegiatan kita menggunakan tabel "Analisis Waktu Harian." Kita dapat mengkopi tabel ini rangkap tujuh untuk mengelola waktu kita selama seminggu. Setelah kita menyiapkan tabel waktu, kita perlu membuat prioritas aktivitas.

Aktivitas yang mendesak dikelompokkan tipe 1 (satu). Aktivitas yang penting akan tetapi tidak mendesak dikelompokkan tipe 2 (dua). Untuk aktivitas yang tidak penting, tidak mendesak, dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, dikelompokkan tipe 3 (tiga), antara lain: menjawab telepon, menghadiri pertemuan yang tidak penting, membuang waktu untuk kekuatiran, politik, berdebat, sering minum di pantry, dan perilaku tidak produktif lainnya. Setelah mengidentifikasi aktivitas tipe 3 (tiga), yang perlu kita lakukan adalah mengubah perilaku dengan menghilangkan kebiasaan pada aktivitas tipe 3 (tiga) tersebut. Bahkan, jika diperlukan kita mengurangi aktivitas tipe 2 (dua).

Tabel 1
Analisis Waktu Harian

Tanggal:
Sasaran hari ini:
1.
2.
3.

Waktu	Aktivitas	Persentase Pencapaian Aktivitas terhadap Tujuan yang Telah Ditetapkan (%)	Tipe Aktivitas (1/2/3)
8:00			
8:30			
9:00			
9:30			
dan seterusnya			

Hal ini tampaknya mudah akan tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan, karena perlu mengubah kebiasaan seseorang, Akan tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan, karena perlu mengubah kebiasaan seorang. Dalam mengelola waktu kita, kita harus belajar berkata “tidak”, kita harus belajar “tegas”, dan jika memungkinkan mendelegasikan tanggung jawab pada orang lain.

2. Sistem Seleksi dan Penempatan

Ketika departemen SDM melakukan proses seleksi dan penempatan karyawan baru, mereka perlu memilih karyawan yang memiliki *internal locus of control*, yaitu keyakinan seseorang bahwa keberhasilan tergantung pada faktor-faktor internal daripada faktor-faktor eksternal (Nelson & Quick, 1997). Karyawan yang demikian memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi dan mengelola stres dalam bekerja dan lingkungan yang baru.

3. Pendisainan Kembali Pekerjaan

Bagi karyawan yang menyukai tantangan dan memiliki kebutuhan untuk berkembang, perusahaan perlu mendisain ulang pekerjaan yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar, pekerjaan yang berarti, lebih banyak otonomi, dan memberikan umpan balik secara periodik. Faktor-faktor tersebut memberikan kepada karyawan tersebut wewenang yang lebih besar terhadap pekerjaan dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain, sehingga dapat mengurangi stres.

Sebaliknya bagi karyawan yang memiliki kebutuhan yang rendah untuk berkembang lebih menyukai pekerjaan yang terstruktur dan rutin, tidak terlalu bervariasi, dan memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah.

4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu sumber stres ketika karyawan merasakan ketidakpastian dalam tujuan, harapan, dan bagaimana kinerja karyawan akan dievaluasi. Dengan melibatkan karyawan untuk memberikan usulan dan pendapat terhadap pengambilan keputusan perusahaan secara umum, serta pengambilan keputusan dalam departemen mereka pada khususnya, manajemen telah meningkatkan “*sense of belonging*” karyawan sehingga mampu mengurangi stres.

5. Komunikasi dalam Organisasi

Pihak manajemen perlu membangun komunikasi formal dengan karyawan secara periodik untuk mengurangi rasa ketidakpastian terhadap ambiguitas peran, konflik peran, serta isu-isu penting lainnya. Komunikasi formal dapat membentuk persepsi yang benar pada karyawan mengenai perusahaan, manajemen, pekerjaan, dan hubungan antarkaryawan. Kurangnya komunikasi formal dapat menimbulkan komunikasi informal yang tidak benar, seperti; gosip, yang dapat meningkatkan ketidakpuasan kerja, stres, dan menurunkan kinerja.

6. *Wellness Programs*

Perusahaan perlu menyelenggarakan program yang berfokus pada kesehatan fisik dan kondisi mental karyawan, antara lain *workshop* yang membantu karyawan untuk berhenti merokok, mengendalikan penggunaan alkohol, mengurangi berat badan, kebiasaan makan yang baik, dan mengembangkan program olahraga yang teratur. Perusahaan berfungsi sebagai fasilitator agar program ini dapat dilakukan oleh karyawan secara teratur dan penuh disiplin. (Robbins, 1993)

7. *Perekayasaan Organisasi*

Teknik ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres, yakni dilakukan perubahan pada faktor-faktor stres seperti faktor intrinsik pekerjaan, faktor peran organisasi, faktor pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, dan faktor struktur dan karakteristik organisasi.

Kondisi kerja fisik seperti bising, getaran, dan paparan pada risiko dan bahaya dapat diatur kembali melalui analisis kondisi kerja. Hasil kajian atas analisis beban kerja dan metode perekayasaan dapat disusun suatu pola pekerjaan baru dengan beban yang lebih seimbang. Secara kuantitatif, pengurangan beban kerja dilakukan dengan mengurangi banyaknya kegiatan misalnya dengan penambahan karyawan, sedangkan secara kualitatif dapat dikurangi derajat kemajemukan ketrampilan yang diperlukan dan dapat dikurangi tanggung jawabnya juga. Sebaliknya untuk pekerjaan dengan beban terlalu sedikit dilakukan perluasan pekerjaan (*job enlargement*) dan pemerayaan pekerjaan (*job enrichment*).

Penyebab stres yang bersumber pada gaya kepemimpinan perlu ditinjau kembali. Pemimpin perlu melakukan inspeksi dan dengan segala kerendahan hati bersedia mengubah gaya kepemimpinan yang menimbulkan stres kepada bawahannya menjadi yang sebaliknya.

8. *Program Pelatihan*

Program pelatihan dimaksud untuk meningkatkan ketrampilan kerja sehingga menimbulkan rasa percaya diri akan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Program pelatihan orientasi bagi pekerja baru dibutuhkan untuk mencegah timbulnya stres,

karena terdapat perbedaan nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai pribadi. Hal ini juga dimaksudkan sebagai proses sosialisasi pekerja dalam perusahaan yang baru.

9. *Pembentukan Tim Kerja*

Tim kerja dapat mencegah atau mengatasi stres yang timbul karena konflik peran, ketaksamaan peran, hubungan interpersonal yang kurang baik, tekanan kelompok, pribadi yang kasar, pimpinan yang menekan, serta struktur dan iklim organisasi. Cikal bakal suatu organisasi berasal dari suatu tim kerja, dan manusia itu memiliki hakekat dasar sebagai makhluk sosial. Hubungan yang baik antar anggota dari suatu tim kerja merupakan faktor utama dalam kesehatan individu dan organisasi (Munandar, 2001).

10. *Penyuluhan Jabatan*

Penyuluhan Jabatan dapat diberikan dalam kombinasi dengan strategi lainnya dimaksudkan agar dapat diketahui kelemahan dan kekuatan pekerja dan kesesuaiannya untuk berbagai macam pekerjaan sehingga dapat direncanakan pengembangan karir dalam perusahaan (Munandar, 2001).

MENGELOLASTRES: PENDEKATAN INDIVIDUAL

Berikut ini ada beberapa pendekatan organisasional untuk mengelola stres, yaitu perekayasaan pribadi, penenangan pikiran, aktivitas fisik, dan konseling.

1. *Perekayasaan Kepribadian*

Teknik ini digunakan dalam upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam kepribadian individu agar dapat mencegah timbulnya stres sekaligus meningkatkan ambang stres. Perekayasaan yang diharapkan oleh perusahaan dapat berupa peningkatan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, dan pemahaman kepribadian atas nilai-nilai yang mempengaruhi persepsi dan sikap pekerja terhadap profesinya.

2. *Penenangan Pikiran*

Tujuan teknik-teknik penenangan pikiran ialah untuk mengurangi kegiatan pikiran. Dalam keadaan sadar seseorang selalu mengalami proses berpikir dalam bentuk merencanakan, mengingat, berkhayal,

menalar secara sinambung. Jika seseorang mengalami stres, proses berpikir tersebut dapat berubah kegiatan pikiran diharap akan muncul sikap tenang. Teknik-teknik penenangan pikiran meliputi (Munandar 2001):

a. Meditasi. Meditasi adalah suatu proses penenangan pikiran dengan cara memusatkan perhatian pada suatu keadaan pikiran untuk memperoleh kekuatan mental. Berbagai teknik seperti yoga, dzikir, relaksasi progresif adalah cara untuk menuju pencapaian keadaan mental tersebut. Inti meditasi adalah kemampuan mengendalikan pikiran pada suatu gagasan tertentu. Dengan berlatih akan diperoleh kemampuan pengendalian pikiran dari kecenderungan melamun atau berganti gagasan. Konsentrasi dilakukan dalam posisi tubuh tertentu, tidak bergerak selama jangka waktu tertentu, memusatkan pikiran pada suatu hal, satu kata, satu ungkapan yang dilafalkan berulang-ulang selama waktu tertentu (ritmis).

b. Relaksasi Autogenik. Penenangan pikiran yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri berdasar pada rasa tertentu yang dihayati dengan kuat pada suatu peristiwa tertentu yang terekam kuat dalam ingatan, sehingga timbulnya kenangan tentang peristiwa akan menimbulkan pula penghayatan gambaran perasaan yang sama. Dalam kehidupan seseorang ada peristiwa yang menegangkan, kesakitan yang luar biasa, atau sebaliknya kehangatan, kenyamanan, santai, sejuk, dan segar sebagai bentuk pengalaman pribadi masing-masing. Bila pikiran dipusatkan pada peristiwa yang menegangkan maka akan dirasakan ketegangan pada badan kita, sebaliknya kalau pikiran dipusatkan pada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan penghayatan kehangatan dan kenyamanan maka badan akan merasakan santai.

Pelatihan relaksasi autogenik berusaha mengaitkan penghayatan yang menenangkan dengan peristiwa yang menimbulkan ketegangan, sehingga badan terkondisi untuk memberikan penghayatan yang tetap nyaman meskipun menghadapi pekerjaan yang menegangkan. Keberhasilan pelatihan metode ini ditentukan kemampuan diri melakukan

sugesti (meyakinkan diri sendiri) dan keberagaman pengalaman yang memberi penghayatan yang terekam kuat dalam ingatan.

c. Relaksasi *Neuromuscular*. Pelatihan ini berupa suatu program latihan sistematis yang melatih otot dan komponen sistem syaraf yang mengendalikan aktivitas otot. Dasar pemikiran adalah otot merupakan bagian yang besar dari tubuh manusia dan ketegangan pikiran dan kelelahan fisik yang dialami seseorang selalu direfleksikan di otot, maka dengan melakukan pelatihan yang mengurangi ketegangan otot berarti pengurangan ketegangan yang nyata dari seluruh tubuh.

Latihan yang dilakukan secara sadar mampu merelaksasikan otot sesuai kemauan kita setiap saat. Untuk dapat mencapai kemampuan itu sebagai dasar latihan "milikilah kesadaran perasaan pikiran tentang bagaimana membedakan rasa relaks dan rasa tegang". Latihan relaksasi *neuromuscular* dilakukan dengan konsentrasi untuk menegangkan otot atau merelaksasikan otot berdasar kemauan kita, latihan dilakukan selama jangka waktu tertentu.

3. Aktivitas Fisik

Tujuan penggunaan teknik mengelola stres melalui aktivitas fisik ialah untuk membuang sampai habis hasil-hasil stres yang diproduksi oleh ketakutan, ancaman, yang mengubah sistem hormon dan syaraf ke dalam sikap mempertahankan stres. Manfaat lain dari aktivitas fisik ini ialah dapat memberikan rasa sehat, tenang, segar, dan ringan yang timbul sesudah latihan-latihan fisik. Aktivitas fisik baik dilakukan sebelum menghadapi kondisi stres dan sesudah menghadapi stres dengan bergerak memanaskan badan agar membakar gula dan lemak dalam darah. Menghabiskan produk (sisa-sisa) stres dan membersihkan badan dari kekuatan destruktif yang dapat menyerang orang yang duduk diam. Aktivitas latihan keseluruhan badan seperti berenang, lari, menari, bersepeda, atau olahraga lain yang memanaskan badan, menaikkan detak jantung, pernafasan, otot-otot dan pusat kendali di otak dalam waktu yang cukup. Sekitar 90 menit setelah aktivitas fisik yang baik akan timbul rasa relaksasi yang mendalam, rasa dingin dan tenang. Aktivitas

fisik yang dilakukan rutin dapat membantu seseorang untuk lebih tahan terhadap stres.

4. **Konseling**

Penderita stres dapat meminta tenaga ahli untuk membantu menyelesaikan masalah masalah yang dapat menimbulkan stres, melalui penanganan selama beberapa periode tertentu. Pengakuan dan keterbukaan membantu penderita stres mengalami “hubungan” sehingga dia tidak merasa sendiri (Nelson & Quick, 1997). Karyawan bisa secara mandiri dapat memperoleh bantuan profesional atau organisasi yang menyediakan melalui *Employee Assistance Programs* (EAPs).

PENUTUP

Stres merupakan hal yang biasa dialami dalam kehidupan setiap orang, selama kehidupannya. Seorang yang bekerja, tentu saja akan mendapatkan sumber stres dari lingkungan kerjanya. Stres mempunyai dampak baik dan buruk, tergantung dari sikap cara pandang terhadap stres dan bagaimana mengelolanya. Seseorang dengan cara pandang bahwa stres adalah sesuatu yang harus “dinikmati” dan membawa kebaikan akan berbeda dengan sikap awal seseorang yang selalu menghindari stres. Tanggung jawab atau beban baru bagi sebagian orang merupakan tantangan yang layak dihadapi, walaupun harus menghadapi “sedikit” stres.

Tugas mengelola stres dalam organisasi adalah tanggung jawab individu dan organisasi. Menurut teori yang telah dibahas, tingkat stres yang terlalu rendah atau tinggi tidak baik, walau ukuran ini relatif untuk masing-masing orang. Pendekatan terbaik adalah “menjaga” agar tingkat stres pada kondisi optimal. Jadi, jika stres terlalu rendah organisasi harusnya memberi tantangan baru, sehingga vitalitas karyawan bertambah, sedangkan jika terjadi simtom stres terlalu tinggi, maka sebaliknya organisasi menahannya agar tidak menimbulkan akibat stres yang berdampak negatif. Individu harus bersikap positif dalam memandang stres. Individu juga harus mampu mengelola stres pribadinya. Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk mengelolanya. Apabila terlalu rendah, individu secara mandiri mencari hal-hal baru yang menantang. Sedangkan apabila dia merasa stres yang dihadapi terlalu besar, maka iapun harus tahu cara terbaik untuk

mengatasinya. Relaksasi, olah raga, melakukan hobi merupakan contoh sederhana dari banyak hal yang bisa dilakukan. Stres bukan hal yang harus selalu dihindari, namun hidupilah bersama dengan stres. Hidupilah stres, karena stres sendiri menandakan masih adanya kehidupan.

Akhirnya, ide penelitian yang dihubungkan dengan stres sangat terbuka lebar, melihat dimensi stres yang luas dan pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan organisasi. Variabel yang berhubungan dengan stres juga sangat luas. Hal ini tergantung dari kebutuhan organisasi dalam memanfaatkan penelitian atau dimensi penelitian yang dikonstruksikan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, J. W., “Psychology of Acculturation: Understanding Individuals Moving between Cultures In R. W. Brsilin (Ed.).” *Aplied Cross-Cultural Psychology*, 1990, 232-253.
- Conti, R., Jannis Angelis, Cary Cooper, Brian Faragher, and Colin Gill, “The Effect of Lean Production on Worker Job Stress.” *International Journal of Operations & Production Management*, 2006, 1013-1038.
- Cooper, C.L. & J. Marshall, *Understanding Executive Stress*, London: MacMillan, 1978.
- Donovan, S.B. and B.H. Kleiner, “Effective Stress Management.” *Managerial Auditing Journal*, 1994, 31-34.
- Everly, G.S. and D.A Girdano, *The Stress Mess Solution*. Maryland: Prentice Hall, Inc., 1980.
- Fincham, R. and P.S. Rhodes, *The Individual, Work, and Organization*. London: Weidenfeld and Nicolsel, 1988.
- Gold, Y. & R.A. Roth, *Teacher Managing Stress and Preventing Burnout: The Professional Health Solution*, Washington, D.C.: Falmer Press, 1993.

- Higgins, James M., *Human Relations Concepts and Skill*, 1 st ed. Random House Inc., 1982.
- Ivancevich, J.M. and M.T. Matteson, *Stress at Work*, Lilinois: Scott Foresman, 1980.
- Li, Eldon Y., and Abraham B. Shani, "Stress Dynamics of Information Systems Managers: A Contingency Model, project research supported in part by a grant from the RGH Foundation." ?.
- Mackenzie, Alec, *The Time Trap*, First Edition, American Management Association, 1990.
- Melamed, S., Ben-Avi I., Luz J., and Green M., "Objective and Subjective Work Monotony: Effect on Job Satisfaction Psychological Distress and Absenteeism in Blue-Collar Workers." *Journal of Applied Psychology*, 1995, 29-42.
- Minter, Stephen G. "Relieving Workplace Stress." *Occupational Hazards*, April 1999, 38-42.
- Munandar, Ashar Sunyoto, *Psikologi Industri dan Organisasi*, ed 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Nelson, Debra L. and James Campbell Quick, *Organizational Behavior*, Sixth Edition, Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall, Inc., 1997.
- Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior*, Sixth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1993.
- Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior*, Tenth Edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2003.
- Selye, H. *Stress without distress*, Philadelphia and New York: J. B. Lipincott, 1974.
- Shepherd, John S., "Manage the Five C's of Stress." *Personnel Journal*, July 1990, 64-69.
- Smith, A., "Perceptions of Stress at Work." *Human Resource Management Journal*, 2001, 74-86.
- Sutherland, Valeria J. and C.L. Cooper, "Chief Executive Lifestyle Stress." *Leadership & Organization Development Journal*, 1995, 18-28.
- Sutherland, Valeria J. and C.L. Cooper, *Man and Accidents Offshore: the Cost of Stress among Workers on Oil and Gas Rigs*, London: Lloyd's List/Dietsmann, 1986.
- Van Sell, M., A.P. Brief and R.S. Schuler, "Role Conflict and Role Ambiguity: Integration of the Literature and Directions for Future Research." *Human Relations Journal*, 1981, 43-71.
- Weiss, M., "Effects of Work Stress and Social Support on Information Systems Managers." *MIS Quarterly*, Vol. 7, No. 1, March 1983, 29-43.

INDEKS PENULIS DAN ARTIKEL JAM STIE YKPN YOGYAKARTA

Vol. 16, No. 1, April 2005

Lo, Eko Widodo, pp. 1-10, Penjelasan Teori Prospek Terhadap Manajemen Laba

Tjahyono, Heru Kurnianto, pp. 11-24, Peran Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasian Hubungan Budaya Organisasional dengan Keefektifan Organisasional (Studi pada Perguruan Tinggi Swasta di Propinsi DIY)

Astuti, Sri dan M. Hanad Hainafi, pp. 250-34, Pengaruh Laporan Auditor Dengan Modifikasi *Going Concern* Terhadap *Abnormal Accrual*

Siregar, Baldric dan Twenty Selvia Sari Sianturi, pp. 35-49, ; Reaksi Pasar Modal Terhadap Hasil Pemilihan Umum dan Pergantian Pemerintahan Tahun 2004

Prajogo, Wisnu, pp. 51-65, Pengaruh Pemediasian *Trust* Dalam Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan *Organizational Citizenship Behavior*

Widiastuti, Sri Wahyuni dan Sri Suryaningrum, pp. 67-77, Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)

Vol. 16, No. 2, Agustus 2005

Heriningsih, Sucahyo, Sri Suryaningrum, Windyastuti, pp. 79-91, *Pengaruh Kecerdasan Emosional pada Pemahaman Pengetahuan Akuntansi di Tingkat Pengantar dengan Penalaran dan Pendekatan Sistem*

Susanto, Djoko dan Baldric Siregar, pp. 93-105, *Peran Saling Melengkapi Laba dan Arus Kas Operasi dalam Menjelaskan Variasi Return Saham*

Rahdi, Fahmy, pp. 107-119, *Industry Policy and Technology Transfer: Review and Analysis of The Indonesian Automotive Industry During New Orde Era*

Yudiarti, Fr. Ninik dan Eko Widodo Lo, pp. 121-127, *Pengaruh Framing; Pertanggungjawaban, dan Jenis Kelamin dalam Keputusan Investasi Tambahan: Keputusan Individual dan Grup*

Vol. 18, No. 2, Agustus 2007

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Vol. 16, No. 2, Agustus 2005

Asakdiyah, Salamatun, pp. 129-139, *Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Saputro, Julianto Agung, pp. 141-152, *Konsep dan Pengukuran Investment Opportunity Set Serta Pengaruhnya pada Proses Kontrak*

Vol. 16, No. 3, Desember 2005

Ciptono, Wakhid Slamet, pp. 153-171, *The Critical Success Factors Of Tqm Underlying The Deming Management Method: Evidence From The Indonesia's Oil and Gas Industry*

Lo, Eko Widodo, pp. 173-181, *Manajemen Laba: Suatu Sistesa Teori*

Sanjaya, I Putu Sugiarta, pp. 183-193, *Analisis Pengaruh Akrual Diskresioner Terhadap Return Saham Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan Non-Big Four*

Sudarini, Sinta dan Silisia Mita Alloy, pp. 195-207, *Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba Pada Masa yang Akan Datang (Studi Kasus di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*

Winarso, Beni Suhendra, pp. 209-218, *Analisis Empiris Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Perusahaan yang Melakukan Stock Split dengan Perusahaan yang Tidak Melakukan Stock Split Pengujian The Signaling Hypothesis*

Siregar, Baldric, pp. 219-230, *Hubungan antara Dividen, Leverage Keuangan, dan Investasi*

Vol. 17, No. 1, April 2006

Nurim, Yavida, pp. 1-10, *Pengaruh Karakteristik Pembuat Judgment dalam Prediksi Failure Perusahaan*

Kusuma, Deden Iwan, pp. 11-24, *Studi Empiris Pemilihan Metode Akuntansi pada Perusahaan yang Melaksanakan Akuisisi di Indonesia*

Yunani, Akhmad, pp. 25-40, *Perancangan Model Sales Force Automation (SFA) dalam Rangka Menunjang Customer Relationship Management (CRM): Studi Kasus pada PT Pos Indonesia (Persero)*

Vol. 18, No. 2, Agustus 2007

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Vol. 17, No. 1, April 2006

Suripto, Bambang, pp. 41-56, *Praktik Pelaporan Keuangan dalam Web Site Perusahaan Indonesia*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 57-78, *Kajian Usaha Ternak Kambing dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman*

Dongoran, Johnson, pp. 79-92, *Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Kinerja pada Hotel Bintang di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*

Vol. 17, No. 2, Agustus 2006

Sri Darma. Gede, pp. 93-117, *Employee Perception of The Impact of Information Technology Investment in Organizations: A Survey of The Hotel Industry*

Hapsoro, Dody, pp. 119-135, *Pengaruh Transparansi Terhadap Konsekuensi Ekonomik: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Indahwati, Weliana dan Erni Ekawati, pp. 137-152, *Relevansi dan Reliabilitas Nilai Informasi Akuntansi Goodwill di Indonesia*

Rahmawati, pp. 153-169, *Hubungan Nonlinier antara Earnings dan Nilai Buku dengan Kinerja Saham*

Siswanti, Yuni, pp. 171-180, *Alliance Experience, Alliance Capability, Function Alliance Dedicated dan Alliance Learning dalam Aliansi Strategik untuk Meraih Kesuksesan Jangka Panjang di Era Kompetisi Global*

Widjaya, NH Setiadi, pp. 181-196, *Pengaruh Komponen Komitmen Organisasional pada Hubungan Persepsi Kaitan Kinerja-Gaji dan Organizational Citizenship Behavior*

Vol. 17, No. 3, Desember 2006

Arsyad, Lincoln, pp. 197-218, *A Process of Creating Business Plan for Microfinance Institution: Case Study of LPD Mas, Gianyar, Bali*

Hapsoro, Dody, pp. 219-234, *Pengaruh Struktur Pengelolaan Korporasi Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Sri Darma, Gede, pp. 235-255, *The Impact of Information Technology Investment on The Hospitality Industry*

Vol. 18, No. 2, Agustus 2007

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Vol. 17, No. 3, Desember 2006

Sulistiyani, Tina, pp. 257-267, *Analisis Perilaku Brand Switching Produk Air Minum Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Siregar, Baldric, pp. 269-282, *Determinan Risiko Ekspropriasi*

Bawono, Icuk Rangga, dkk., pp. 283-294, *Persepsi Mahasiswa SI Akuntansi Reguler Tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Negeri di Purwokerto, Jawa Tengah)*

Vol. 18, No. 1, April 2007

Kartikasari, Lisa, pp. 1-9, *Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Risiko Sistemik pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*

Norpratiwi, Agustina M.V., pp. 9-22, *Analisis Korelasi Investment Opportunity Set terhadap Return Saham pada Saat Pelaporan Keuangan Perusahaan*

Rahmawati, pp. 23-34, *Model Pendeteksian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perbankan*

Dewi, Sherly Friska dan Eko Widodo Lo, pp. 35-42, *Hubungan Sinyal-Sinyal Fundamental dengan Harga Saham*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 43-50, *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulonprogo Tahun 2004 dan 2005*

Suranto, Anto, pp. 51-64, *Hubungan Antara Sikap dan Perilaku Pejabat Public Relations dengan Efeknya dalam Kinerja (Studi Hubungan antara Sikap Terhadap Penerapan Budaya Korporat dan Perilaku Penerapan Budaya Korporat dengan Efeknya dalam Kinerja Pejabat Public Relations Perbankan Swasta Nasional Anggota Perbanas)*

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

KEBIJAKAN EDITORIAL Jurnal Akuntansi & Manajemen

Format Penulisan

1. Naskah adalah hasil karya penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
3. Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (8.5 x 11 inch.) dengan jarak 2 spasi pada satu permukaan dan diberi nomor untuk setiap halaman.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan batas margin minimal 1 inch untuk margin atas, bawah, dan kedua sisi.
5. Halaman pertama harus memuat judul, nama penulis (lengkap dengan gelar kesarjanaan yang disandang), dan beberapa keterangan mengenai naskah dan penulis yang perlu disampaikan (dianjurkan dalam bentuk *footnote*).
6. Naskah sebaiknya diawali dengan penulisan abstraksi berbahasa Indonesia untuk naskah berbahasa Inggris, dan abstraksi berbahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonesia. Abstraksi berisi *keyword* mengenai topik bahasan, metode, dan penemuan.
7. Penulisan yang mengacu pada suatu referensi tertentu diharuskan mencantumkan *bodynote* dalam tanda kurung dengan urutan penulis (nama belakang), tahun, dan nomor halaman. Contoh penulisan:
 - a. Satu referensi:
(Kotler 1997, 125)
 - b. Dua referensi atau lebih:
(Kotler & Armstrong 1994, 120; Stanton 1993, 321)
 - c. Lebih dari satu referensi untuk penulis yang sama pada tahun terbitan yang sama:
(Jones 1995a, 225) atau (Jones 1995b, 336; Freeman 1992a, 235)
 - d. Nama pengarang telah disebutkan dalam naskah:
(Kotler (1997, 125) menyatakan bahwa
 - e. Referensi institusi:
(AICPA Cohen Commission Report, 1995) atau (BPS Statistik Indonesia, 1995)
8. Daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis tanpa nomor urut. Contoh penulisan daftar pustaka:

Kotler, Philip and Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Seventh Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996

Indriantoro, Nur. "Sistem Informasi Strategik; Dampak Teknologi Informasi terhadap Organisasi dan Keunggulan Kompetitif." *KOMPAK* No. 9, Februari 1996; 12-27.

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review* (Summer 1994): 57-67.

Paliwoda, Stan. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince., 1994.

Prosedur Penerbitan

1. Naskah dikirim dalam bentuk *print-out* untuk direview oleh *Editors JAM*.
2. Editing terhadap naskah hanya akan dilakukan apabila penulis mengikuti kebijakan editorial di atas.
3. Naskah yang sudah diterima/disetujui akan dimintakan *file* naskah dalam bentuk disket kepada penulis untuk dimasukkan dalam penerbitan JAM.
4. Koresponden mengenai proses editing dilakukan dengan *Managing Editor*
5. Pendapat yang dinyatakan dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi, tidak mencerminkan pendapat redaksi atau penerbit. Surat menyurat mengenai permohonan ijin untuk menerbitkan kembali atau menterjemahkan artikel dan sebagainya dapat dialamatkan ke *Editorial Secretary*.